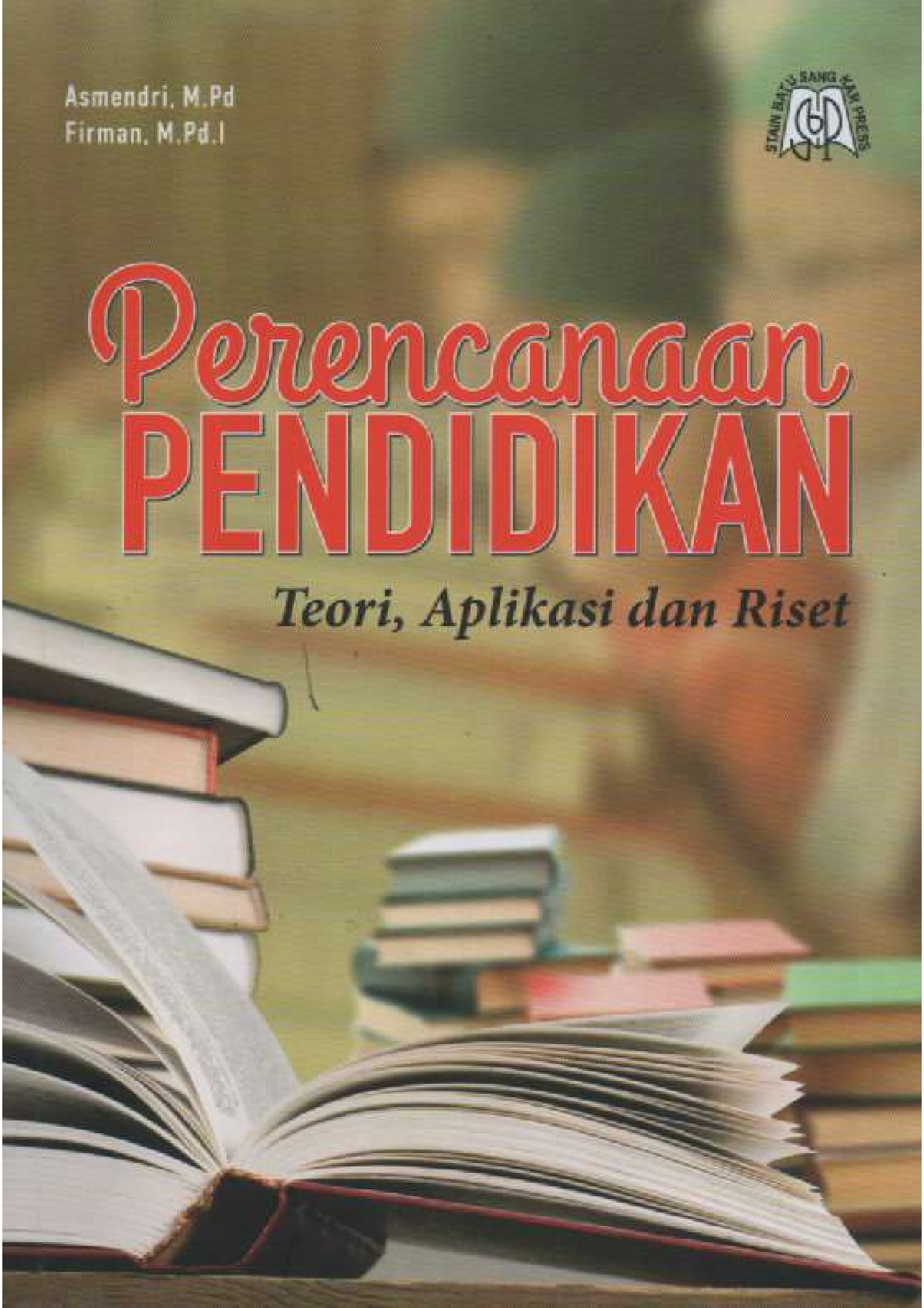
Asmendri, M.Pd
Firman, M.Pd.I

STAIN BATUSANGKAR PRESS

Perencanaan PENDIDIKAN

Teori, Aplikasi dan Riset



Perencanaan PENDIDIKAN

Teori, Aplikasi dan Riset

Perencanaan pendidikan merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang permasalahan dan tantangan dunia pendidikan untuk masa yang akan datang khususnya di Indonesia. Untuk menjadikan sekolah/madrasah yang bermutu serta mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat maka diperlukan perencanaan yang matang.Buku ini mencoba memberi penjelasan tentang konsep dasar perencanaan pendidikan, termasuk di dalamnya tujuan, fungsi, prinsip-prinsip dan ruang lingkupnya. Kemudian juga menjelaskan jenis-jenis perencanaan, metode perencanaan pendidikan, ramalan pendidikan, aspek- aspek dalam perencanaan serta statistik perencanaan pendidikan.

Buku ini dapat digunakan untuk semua pembaca dari berbagai profesi, terutama bagi yang berkecimpung dalam dunia pendidikan (dosen, guru, pengawas, kepala sekolah, mahasiswa, birokrat pendidikan, dan para aktivis LSM dan Yayasan yang peduli dengan dunia pendidikan).

STAIN BATU SANGKAR PRESS

ISBN 978-602-3290-29-1

9 786023 290291

ASMENDRI, M.Pd

FIRMAN, M.Pd.I

PERENCANAAN PENDIDIKAN

Teori, Aplikasi dan Riset

STAIN Batusangkar Press

2015

PERENCANAAN PENDIDIKAN
Teori, Aplikasi dan Riset

STAIN Batusangkar 2015
All rights reserved

---

x + 258 hlm; 14.5 x 20.5 cm
Cetakan ke 1, November 2015
ISBN: 978-602-329-029-1

Penulis: Asmendri, M.Pd & Firman, M.Pd.I
Layout: Lingkar Media
Desain Cover: Lingkar Media

Copyright © 2015
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit

---

Diterbitkan Oleh:
STAIN Batusangkar Press

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Perencanaan pendidikan merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang permasalahan dan tantangan dunia pendidikan untuk masa yang akan datang khususnya di Indonesia. Untuk menjadikan sekolah/ madrasah yang bermutu serta mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat maka diperlukan perencanaan yang matang.Buku ini mencoba memberi penjelasan tentang konsep dasar perencanaan pendidikan, termasuk di dalamnya tujuan, fungsi, prinsip-prinsip dan ruang lingkupnya. Kemudian juga menjelaskan jenis-jenis perencanaan, metode perencanaan pendidikan, ramalan pendidikan, aspek- aspek dalam perencanaan serta statistik perencanaan pendidikan.

Buku ini dapat digunakan untuk semua pembaca dari berbagai profesi, terutama bagi yang berkecimpung dalam dunia pendidikan (dosen, guru, pengawas, kepala sekolah, mahasiswa, birokrat pendidikan, dan para aktivis LSM dan Yayasan yang peduli dengan dunia pendidikan).

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STAIN Batusangkar beserta staf yang telah memberikan dukungan yang sangat berharga untukpenerbitan buku ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada bapak Marhen, M.Pd.I yang membantu untuk perbaikan penulisan dan saudari Febrineng, M.Pd.I yang telah meluangkan waktunya beridiskusi untuk penyempurnaan isi yang sangat bermanfaat sekali.

Kritikan dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan dari pembaca semuauntuk perbaikan penerbitan selanjutnya.

Batusangkar, 07 September 2015

Penulis,

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR PUSTAKA ..... **v**

BAB I

PENGERTIAN, UNSUR, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PENDIDIKAN **1**

A. Pengertian Perencanaan Pendidikan 1

B. Konsep Dasar Pendidikan 5

C. Unsur- Unsur dan Ciri Pendidikan 13

D. Ruang Lingkup Perencanaan Pendidikan..... 17

BAB II

PERKEMBANGAN PERENCANAAAN PENDIDIDKAN DAN ALIRAN-ALIRAN PERENCANAAN **23**

A. Usul Perencanaan..... 23

B. Aliran-Aliran Perencanaan..... 27

C. Perencanaan Tradisional dan Modern 35

BAB III

TEORI DAN RAMALAN (FORECASTING) DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN **39**

A. Perencanaan Pendidikan..... 39

B. Kedudukan Ramalan dalam Perencanaan 42
C. Bentuk-Bentuk Ramalan Kebijakan 44
D. Jenis Masa Depan..... 45
E. Sumber – sumber tujuan, Sasaran dan Alternatif..... 45
F. Pendekatan-Pendekatan Peramalan 47
G. Metode dan Teknik Peramalan Kebijakan 49
H. Peramalan Kebijakan Di Bidang Pendidikan 54
I. Rekomendasi dan Aksi..... 57

BAB IV

PERAN DAN FUNGSI ADMINISTRAS PADA PERENCANAAN PENDIDIKAN 61

A. Makna Administrasi (Tinjauan Umum)..... 61
B. Administrasi Secara Praktis..... 64
C. Organisasi 68
D. Proses Perencanaan Umum dan Agama..... 75
E. Proses Perencanaan Umum dan Agama..... 88
F. Tanggung Jawab Administrasi Pendidikan 90
G. Administrasi Pendidikan 93

BAB V

HUBUNGAN PERENCANAAN PENDIDIKAN DENGAN ASPEK DEMOGRAFI, SOSIAL, POLITIK, DAN EKONOMI..... 99

A. Faktor-faktor Umum 99

B. Hubungan dengan Aspek Demografi Kependudukan 100
C. Hubungan dengan Aspek Sosial Kemasyarakatan 101
D. Hubungan dengan Aspek Ekonomi 104
E. Hubungan dengan Aspek Politik 112

BAB VI

MODEL EVALUASI DAN UKURAN-UKURAN DALAM PENILAIAN PERENCANAAN PENDIDIKAN 117
A. Pengertian Evaluasi Pendidikan..... 117
B. Ruang Lingkup Evaluasi 121
C. Model Evaluasi Program Pendidikan..... 121
D. Desain Evaluasi 126
E. Langkah Penyusun Desain 128
F. Kriteria Evaluator..... 129
G. Benefit Monitoring and Evaluation (BME)..... 131
H. Ukuran-ukuran Nonteknis dalam Penilaian 132
I. Langkah-Langkah dalam Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pendidikan 133

BAB VII

ALAT-ALAT DAN DATA-DATA DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PENDIDIKAN 139
A. Alat-alat Perencanaan Pendidikan 139
B. Teknik Pengumpulan Data..... 146

BAB VIII

PERENCANAAN PENDIDIKAN PADA MASA DEPAN 153

A. Faktor Reformasi..... 153

B. Faktor Sosial Budaya 157

C. Faktor Globalisasi, Humanisasi, dan Demokratisasi . 159

D. Faktor Kombinasi Pendekatan 160

E. Perencanaan Pendidikan Islam Seiring Paradigma Baru Pendidikan Islam..... 161

BAB IX

PERATURAN DAN KEBIJAKKAN PERENCANAAN . 169

A. Peraturan dan Kebijakan dalam Perencanaan 169

B. Kebijakan 170

C. Kebijakan Negara..... 170

D. Kebijakan Pendidikan 171

E. Kriteria Kebijakan Pendidikan..... 173

F. Anatomi Kebijakan Pendidikan Indonesia..... 175

G. Kebijakan Departemen Agaama Terhadap Pendidikan..... 176

H. Penerapan Perencanaan dalam Sistem Pendidikan Nasional 178

BAB X

VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN..... 185

A. Misi, dan Tujuan 185

B. Desain Konseptual 193
C. Formulasi Strategi Pelaksanaan 195
D. Alokasi Sumber Daya 198

BAB XI

PENGEMBANGAN STRATEGI PERENCANAAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA 201
A. Perencanaan Pendidikan Islam 201
B. Konsep Perencanaan Pendidikan (Educational Planning) 204
C. Strategi Perencanaan Pendidikan Islam 209

BAB XII

STATISTIK DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN 225
A. Proyeksi Penduduk 226
B. Sprague Multiplier 229
C. Siswa (***Enrolment Ratio)*** ***..... 231***
D. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan 234
E. Metode Proyeksi Siswa 236
F. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan 239
G. Proyeksi Kebutuhan Biaya Pendidikan 241
H. Analisis Kohort 244

I. Analisis Efesiensi Internal Penyelenggaraan Pendidikan 245
J. Metode Analisis Indiktor-Indikator Pendidikan 247
DAFTAR BACAAN 251
RIWAYAT HIDUP PENULIS..... 255

BAB 1

PENGERTIAN, UNSUR, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN PENDIDIKAN

A. Pengertian Perencanaan Pendidikan

Banyak pakar memandang bahwa perencanaan *(planning),* pengorganisasian *(organizing)*, pemotivasian *(motivating)* dan pengendalian *(controlling)* sebagai inti pembicaraan tentang manajemen. Walaupun ketiga fungsi manajemen ini relevan pada setiap level organisasi atau lembaga, namun tetap ingin disempurnakan dengan memasukkan teori kemanusiaan.

Perencanaan secara umum dapat diartikan sebagai proses penyusunan tujuan dan sasaran organisasi serta penyusunan peta kerja dan cara-cara kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran. Jika rencana telah tersusun maka proses pengorganisasian menjadi sangat penting dan inilah kaitan yang sangat erat dengan manajemen.

Makna perencanaan tidak bisa berdiri sendiri dan terbatas pada satu pengertian. Hal itu disebabkan beragamnya makna perencanaan bergantung pada sudut pandang serta latar belakang yang mempengaruhi seseorang. Berikut ini, penulis akan menguraikan defenisi perencanaan dari berbagai pakar dan beberapa sumber.

1. ***Oxford advanced learners Dictionary of current English***
   - Garis besar gambaran tentang suatu bangunan, baik ukuran, posisi, dan berbagai bagian lainya .
   - Diagram bagian-bagian mesin
   - Diagram yang memperlihatkan luasnya kebun, taman, kota, atau area tanah
   - Penyusunan sesuatuyang harus di kerjakan dan di gunakan
2. ***Wikipedia, the free encyclopedia*** menyebutkan bahwa perencanaan dalam organisasi dan kebijakan public adalah proses penciptaan dan memelihara rencana serta proses pisikologis tentang kegiatan yang di butuhkan
3. ***Roger A. Kaufman*** mengemukakan bahwa Perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang di perlukan dalam mencapai tujuan yang bernilai
4. ***Muhamad Afandi*** mengatakan bahwa ada beberapa pemahaman perencanaan yang mengandung enam pokok pikiran yaitu:
   - Perencanan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang di inginkan
   - Keadaan masa depan itu di banding dengan masa sekarang sehingga dapat di lihat kesenjanganya
   - Utuk mentup kesenjangan itu perludilakukan usaha-usaha
   - Untuk menutup kesenjangan dapat beragam dan merupakan alternative yangmungkin di tempuh
   - Pemilihan alternative yang paling baik dalam arti yang mempunyai efektifitas dan efisiensi yang paling tinggi

- Alternative yang di pilih harus di perinci sehingga jadi pedoman dalam mengambilkeputusan.

5. ***Banghart dan Trull*** Perencanaan adalah awal semua proses yang rasional dan mengandung sifat optimisme yang di dasarkan atas kepercayaan dapat mengatasi berbagai mcam permasalahan
6. ***Arthur W. Steller*** menyatakan bahwa Perencanaan adalah hubungan antara apa adanya sekarang *(what is)* dan bagamana seharusnya*(what should be)*yang bertalian dengan kebutuhan
7. ***Stephen P. Robbins*** menjelaskan secara sederhana bahwa Perncanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan menyeimbangkan perubahan
8. ***Prajudi Atmusudirdjo*** membatasi Perencanaan sebagai perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan di jalankan untuk mencapai tujuan tertentu.
9. ***Bintoro Tjokroamidjojo*** perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah proses mempersiapkan kegiatan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu
10. ***M.Fikry*** mengatakan bahwa Perencanaan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan di laksanakanpada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan
11. ***Sondang P, Siagian*** merumuskan Perencanan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dalam hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang
12. ***Albert Waterston*** merumuskan perencanaan Usaha pemikiran yang teratur guna memilih alternative yang tesedia utuk mencapai tujuan tertentu

13. ***Fakry Gaffar*** mengartikan Perencanaan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan di laksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang akan di tentukan keputusan itu di susun secara sistematis, rasional dan dapat di benarkan.secara ilmiah
14. ***Garth N.Jone*** Perencanaan adalah proses pemilihan dan pengembangan daripada tindakan yang paling baik untuk mencapai tujuan
15. ***Mc.Farland*** Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan kemungkinan menggunakan pengaruh daripada kewenanganya
16. ***W.H. Newman*** berpendapat Perencanaan adalah keputusan yang akan di kerjakan utuk waktu yang akan datang

Dari beberapa defenisi diatas, dapat kita analisis dan perlu dijadikan pegangan dalam menyusun suatu rencana, yaitu: (a) berhubungan dengan masa depan, (b) seperangkat kegiatan, (c) proses yang sistematis, dan (d) hasil serta tjuan tertentu. Dengan paparan tersebut, diharabkan kita memiliki wawasan dan pemahaman yang luas mengenai perencanaan dan membentuk pola pikir yang jernih yang selanjutnya mampu menjelaskan pengertian perencanaan dalam bahasa dan pemahaman sendiri pula. Perencanaan dibagi menjadi empat unsur, yaitu :

1. Proses, yaitu kegiatan yang bergerak maju dari satu titik ketitik berikutnya sesuai dengan urutannya. Perencanaan sutu konsep yang orientik, statis, fleksibel, dan dinamis.
2. Berisikan langkah-langkah, yaitu serangkaian langkah-langkah ini ditunjukkan oleh metode ilmiah, metode kreatif atau pendekatan pemecahan masalah.

3. Dibuat berdasarkan suatu maksud, yaitu serangkaian dari kegiatan yang mempunyai sasara dan tujuan yang sasaran dan tujuannya adalah tujuan dari rencana tersebut.
4. Perencanaan yang berisikan kegiatan jasmani, rohani dan konseptual.

Dari beberapa definisi tentang perencanaan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep yang ada dalam pengertian perencanaan pendidikan adalah: (1) suatu rumusan rancangan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi dan tujuan pendidikan; (2) memuat langkah atau prosedur dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan; (3) merupakan alat kontrol pengendalian perilaku warga satuan pendidikan (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, komite sekolah); (4) memuat rumusan hasil yang ingin dicapai dalam proses layanan pendidikan kepada peserta didik; dan (5) menyangkut masa depan proses pengembangan dan pembangunan pendidikan dalam waktu tertentu, yang lebih berkualitas.

B. Konsep Dasar Pendidikan

1. Batasan pendidikan

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercapat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan padanya, karena hanya manusia yang dapat didik dan mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, moral, serta keimanan dan ketaqwaan manusia.

Banyak pandangan teantang makna pendidikan. Hal itu sangat bergantung pada sisi Garapan pendidikan itu akan di kaji, ada kesamaan focus yang menjadi ciri hakikiMakna

pendidikan, yaitu bahwa pendidikan merupakan usaha manusia.

Dalam Islam pendidikan di kenal dengan istilah *Tarbiyah* yang berasal dari bahasa arab Secara istilah makna tarbiyah berdasarkan akar kata tarbiyah adalah

a. Proses pengembangan dan bimbingan, meliputi jasad, akal dan jiwa dengan tujuan anak didik tumbuh dewasa dan hidup mandiri di tengah masyarakat
b. Kegiatan yang di sertai dengan penuh kasih sayang, kelembutan hati, perhatian, bijak, dan menyenangkan.
c. Menyempurnakan fitra kemanusiaan, memberi kesenangan dan kemuliaan tanpa batas sesuai syariat Allah SWT
d. Proses yang dilakukan dengan pengaturan yang bijak dan dilaksanakan secara bertahap dari yang mudah ke yang sulit
e. Mendidik anak melalui penyampaian ilmu, menggunakan metode yang mudah diterima sehingga ia dapat mengamalkanya dalam kehidupan sehari- hari
f. Tarbiyah terdiri atas (1) *tarbiyah qalkiyyat* yaitu pembinaan dan pengembangan jasat , akal, jiwa , potensi, perasaan dengan berbagai petnjuk (2) *tarbiyah diinyyat tahdzibiyyat*yaitu pembinaan jwa dengan wahyu untuk kesempurnaan akal dan kesucian jiwa.

Ary H. Gunawanmengatakan pendidikan adalah interaksi manusia antara guru ataupendidik dengan peserta didikyang dapat menunjang pengembangan manusia seutuhnya. Zuhairini menyebutkan aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadianya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya (piker, rasa, karsa, cipta dan budi nurani). Menurutundang-undang No 20 th 2003 tentang system

pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencanauntuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik Secara aktif mengembangkan potensi dirinya.

Wikipedia menyebutkan pendidikn adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan Suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potesi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan ,pengendalian diri, kepribadian.

Sedangkan Udin syaefudin dan abin syamsudin berpendapat bahwa pendidikan dinyatakan suatusistem dengan komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi sbb:

a. Individu peserta didik yang memiliki potensi dan kemauan untuk berkembang dan dikembangkan semaksimal mungkin
b. Individu peserta didik yang mewakili unsure upaya sengaja, terencana, evektif
c. Hubungan antara pendidik dan peserta didik yang dapat di nyatakan sebagai situasi pendidikan yang menjadi landasan tempat berpijak
d. Struktur sosiokultural yang mewakili lingkungan di antara kenyataanya berupanorma yang bersumber dari ullum budaya atau religi

Aktualisasi upaya pendidikan termaksud dapat dilakukan dalam tataran praktis operasional terbatas, tataran satuan institusional, dan tataran structural (regional, nasional, dan internasional)

2. Tujuan dan proses pendidikan

a. Tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan memuat gambaran nilai yang baik dan indah untuk kehidupan, pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah pada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Ada beberapa tujuan perlunya penyusunan suatu perencanaan pendidikan, antara lain: (1) untuk standar pengawasan pola perilaku pelaksana pendidikan, yaitu untuk mencocokkan antara pelaksanaan atau tindakan pemimpin dan anggota organisasi pendidikan dengan program atau perencanaan yang telah disusun; (2) untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diberlakukan dan bagaimana proses penyelesaian suatu kegiatan layanan pendidikan; (3) untuk mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya) dalam pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan, baik aspek kualitas maupun kuantitasnya, dan baik menyangkut aspek akademik-nonakademik; (4) untuk mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan; (5) untuk meminimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien, baik dari segi biaya, tenaga dan waktu selama proses layanan pendidikan; (6) untuk memberikan gambaran secara menyeluruh (*integral*) dan khusus (*spefisik*) tentang jenis kegiatan atau pekerjaan bidang pendidikan yang harus dilakukan; (7) untuk menyerasikan atau memadukan beberapa sub pekerjaan dalam suatu organisasi pendidikan sebagai '*suatu sistem*'; (8) untuk mengetahui beragam peluang,

hambatan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi organisasi pendidikan; dan (9) untuk mengarahkan proses pencapaikan tujuan pendidikan (Dahana, OP and Bhatnagar, OP. 1980; Banghart, F.W and Trull, A. 1990; Sagala, S. 2009).

b. Proses pendidikan

Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilitas segenap komponen pendidikan oleh Pendidik yang terarah pada pencapaian tujuan pendidikan, kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu, kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya, pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso,, dan makro. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal.

Proses atau tahapan penyusunan perencanaan pendidikan. Menurut Banghart and Trull dalam Sa'ud (2007) ada beberapa tahapan yang semestinya dilalui dalam penyusunan perencanaan pendidikan, antara lain:

- Tahap *needassessment*, yaitu melakukan kajian terhadap beragam kebutuhan atau taksiran yang diperlukan dalam proses pembangunan atau pelayanan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Kajian awal ini harus cermat, karena fungsi kajian akan memberikan masukan tentang: (a) pencapaian program sebelumnya; (b) sumber daya apa yang tersedia, dan (c) apa yang akan dilakukan dan bagaimana tantangan ke depan yang akan dihadapi.
- Tahap *formulation of goals and objective*, yaitu perumusan tujuan dan sasaran perencanaan yang hendak dicapai. Perumusan tujuan perencanaan pendidikan harus berdasarkan pada visi, misi dan hasil

kajian awal tentang beragam kebutuhan atau taksiran (*assessment*) layanan pendidikan yang diperlukan.

- Tahap *policy and priority setting*, yaitu merancang tentang rumusan prioritas kebijakan apa yang akan dilaksanakan dalam layanan pendidikan. Rumusan prioritas kebijakan ini harus dijabarkan kedalam strategi dasar layanan pendidikan yang jelas, agar memudahkan dalam pencapaian tujuan.
- Tahap *program and project formulation*, yaitu rumusan program dan proyek pelaksanaan kegiatan operasional perencanaan pendidikan, menyangkut layanan pedidikan pada aspek akademik dan non akademik.
- Tahap *feasibilitytesting*, yaitu dilakukan uji kelayakan tentang beragam sumber daya (sumber daya internal/ eksternal; atau sumber daya manusia/ material). Apabila perencanaan disusun berdasarkan sumber daya yang tersedia secara cermat dan akurat, akan menghasilkan tingkat kelayakan rencana pendidikan yang baik.
- Tahap *planimplementation*, yaitu tahap pelaksanaan perencanaan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Keberhasilan tahap ini sangat ditentukan oleh: (a) kualitas sumber daya manusianya (kepala sekolah, guru, komite sekolah, karyawan, dan siswa); (b) iklim atau pola kerjasama antar unsur dalam satuan pendidikan sebagai suatu tim kerja (*teamwork*) yang handal; dan (c) kontrol atau pengawasan dan pengendalian kegiatan selama proses pelaksanaan atau implementasi program layanan pendidikan.
- Tahap *evaluationand revision for future plan*, yaitu kegiatan untuk menilai (mengevaluasi) tingkat

keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan, sebagai *feedback* (masukan atau umpan balik), selanjutnya dilakukan revisi program untuk rencana layanan pendidikan berikutnya yang lebih baik.

Merujuk pada uraian dari pengertian perencanaan pendidikan sampai tahapan dalam penyusunan perencanaan pendidikan tersebut di atas, menunjukkan bahwa kedudukan perencanaan pendidikan dalam proses layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan adalah sangat penting, karena dengan adanya perencanaan pendidikan yang baik dapat:

1. Meningkatkan kualitas kegiatan atau aktivitas layanan pendidikan anak secara maksimal, baik menyangkut aspek akademik atau non akademiknya. Hal ini disebabkan seluruh aktivitas warga sekolah harus berdasarkan pada program yang telah disusun dengan baik dalam suatu perencanaan pendidikan secara sistematik dan integral.
2. Mengetahui beberapa sumber daya internal dan eksternal yang dimiliki untuk dimanfaatkan secara maksimal, dan juga mengetahui beberapa kendala, hambatan dan tantangan yang akan dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan. Hal ini disebabkan, suatu perencanaan pendidikan yang baik pasti akan memuat tentang beberapa peluang dalam mencapai tujuan dan prediksi tantangan atau hambatan yang akan muncul, serta strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.
3. Memberi peluang pada setiap warga sekolah dalam meningkatkan beragam kemampuan, keahlian atau ketrampilan secara maksimal, dalam rangka mewujudkan tujuan layanan pendidikan.

4. Memberikan kesempatan bagi pelaksana program untuk memilih beberapa alternatif pilihan tentang metode atau strategi atau pendekatan yang tepat dalam pelaksanaan perencanaan pendidikan, agar efektif dalam upaya mencapai tujuan pendidikan.
5. Memudahkan dalam pencapaian tujuan pendidikan, karena perencanaan pendidikan yang baik selalu dirancang dengan tahapan-tahapan pelaksanaan program layanan pendidikan (jangka pendek, menengah dan panjang), disamping itu telah disusun skala prioritas sasaran tujuan yang akan dicapai.
6. Memudahkan dalam melakukan evaluasi tentang seberapa besar pencapaian tujuan layanan pendidikan yang telah diraih, karena dalam perencanaan pendidikan yang baik selalu merumuskan indikator-indikator pencapaian tujuan dan instrumen apa yang dipakai dalam mengukur keberhasilan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan.
7. Memudahkan dalam melakukan revisi program layanan pendidikan dan proses penyusunan perencanaan pendidikan berikutnya, sesuai dengan dinamika dan perkembangan kehidupan sosial-budaya (Banghart, F.W and Trull, A. 1990; Tilaar.H.A.R. 1998; Sa'ud, S. dan Makmun A,S. 2007).

Konsep pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu proses berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hidup Kemandirian dalam belajar.Arti dan prinsip yang melandasi: kemandirian dalam belajar di artikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih di dorong oleh kemauan, pilihan dan tanggung jawab dari pembelajaran

C. Unsur- Unsur dan Ciri Pendidikan

1. Unsur perencanaan pendidikan yang di uraikan oleh Udin Syaefudin dan Abin Syamsudin yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis dalam perencanaan pendidikan yang menyangkut metodologi dalam perencanaan

b. Proses pembangunan dan pengembangan pendidikan yaitu perencanaan pendidikan di lakukan dalam rangka reformasi pendidikan

c. Prinsip efektifitas dan efisiensi

d. Kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat (local, regional, nasional dan internasional

e. Tujuan pembangunan nasional bangsa yang akan mengambil keputusan dalam rangka kebijaknasional dalam bidang pendidikan

f. Masalah strategi yaitu termasuk penanganan policy (kebijakan) secara operasional yang akan mewarnai proses pelaksanaan dari perencanaan pendidikan hal yang perlu dapat perhatian dalam penanganan policy adalah.sifat dan kebijakan nasional pendidikan , proses social dalam tingkat sedang berkembang , cara pendektan sebagai watak sistem perencanaan.

2. Ciri perencanaan pendidikan

Ciri-ciri (karakteristik) suatu perencanaan pendidikan antara lain, perencanaan pendidikan harus: (1) berorientasi pada visi, misi kelembagaan yang akan diwujudkan; (2) mempunyai tahapan program jangka waktu tertentu (jangka pendek, menengah dan panjang) yang akan dicapai secara berkesinambungan; (3) mengutamakan nilai-nilai manusiawi,

kerena pendidikan itu membangun manusia yang berkualitas, yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakatnya; (4) memberikan kesempatan untuk mengembangkan segala potensi peserta didik secara maksimal; (5) komprehensif dan sistematis dalam arti tidak praktikal atau segmentasi tetapi menyeluruh, terpadu (*integral*) dan disusun secara logis, rasional serta mencakup berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan; (6) diorientasikan untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang sanggup mengisi berbagai sektor pembangunan; (7) dikembangkan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan berbagai komponen pendidikan secara sistematis; (8) menggunakan sumber daya (*resources)* internal dan eksternal secermat mungkin; (9) berorientasi kepada masa datang, karena pendidikan adalah proses jangka panjang dan jauh untuk menghadapi berbagai persoalan di masa depan; (10) responsif terhadap kebutuhan yang berkembang di masyarakat dan bersifat dinamik; dan (11) merupakan sarana untuk mengembangkan inovasi pendidikan, sehingga proses pembaharuan pendidikan terus berlangsung dengan baik. Menurut pendapat lain ciri-ciri perencanaan pendidikan sebagai berikut ini:

a. Perencanaan pendidikan dalah proses intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan serta memutuskan denga keputusan yang konsistensi
b. Perencanaan pendidikan selalu memerhatikan masalah kebutuhan situasi dan tujuan ,keadaan perekonomian
c. Tujuan perencanaan pendidikan yaitu menyusun kebijaksanaan dan menggariskan strategi pendidikan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah
d. Perencanaan pendidikan sebagai printis atau pelopor dalam kegiatan pembangunan

e. Perencanaan pendidikan selalu memerhatikan dan menganalisis factor ekologi
f. Perencanaan pendidikan harus di orientasikan pe pada mbangunan
g. Perencanaan pendidikan harus di kembangkan dengan berbagai komponen pedidikan secara sistematis
h. Perencanan pendidikan harus menggunakan resources secermat mungkin
i. Perencanaan pedidikan harus berorientasi pada masa datang
j. Perencanaan pendidikan harus elastic dan responsive terhadap kebutuhan yang berkembang di masyarakat .
k. Perencanaan pendidikan merupakan sarana untuk mengembnagkan inovasi pendidikan hingga pembaharuan terus berlangsung

3. Prinsip internal perencanaan pendidikan

Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pendidikan, antara lain:

a. *Prinsipinterdisipliner*, yaitu menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. Hal ini penting karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik harus menyangkut berbagai jenis pengetahuan, beragam ketrampilan dan nilai-norma kehidupan yang berlaku di masyarakat.

b. *Prinsip fleksibel*, yaitu bersifat lentur, dinamik dan responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Hal ini penting, karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik adalah menyiapkan siswa untuk mampu menghadapi perkembangan Ilmu

pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan beragam tantangan kehidupan terkini.

c. *Prinsip efektifitas-efisiensi*, artinya dalam penyusunan perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang, sehingga perencanaan itu 'berhasil guna' dan 'bernilai guna' dalam pencapaian tujuan pendidikan.

d. *Prinsip progress of change*, yaitu terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk berkarya dan bergerak maju ke depan dengan beragam pembaharuan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, sesuai dengan peranan masing-masing.

e. *Prinsip objektif, rasional dan sistematis*, artinya perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisa kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional (memungkinkan untuk diwujudkan secara nyata), dan mempunyai sistematika dan tahapan pencapaian program secara jelas dan berkesinambungan.

f. *Prinsipkooperatif-komprehensif*, artinya perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai suatu tim (*team work*) yang baik. Disamping itu perencanaan yang disusun harus mencakup seluruh aspek esensial (mendasar) tentang layanan pendidikan akademik dan non akademik setiap peserta didik.

g. *Prinsiphuman resources development*, artinya perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal dalam mensukseskan program pembangunan pendidikan. Layanan pendidikan pada

peserta didik harus betul-betul mampu membangun individu yang unggul baik dari aspek *intelektual* (penguasaan *science and technology*), aspek *emosional* (kepribadian atau akhlak), dan aspek *spiritual* (keimanan dan ketakwaan) , atau disebut IESQ yang unggul.

D. Ruang Lingkup Perencanaan Pendidikan

Perencanaan pendidikan ada yang bersifat nasional atau makro, daerah atau regional local ada pula yang bersifat kelembagaan atau institusional perencanaan pendidikan pada tingkat nasional mencakup seluruh usaha pendidikan untuk mencerdaskan atau membangun bangsa,perencanaan pendidikan regional adalah perencanaan pada tingkat daerah provinsi atau kabupaten.Perencanaan pendidikan local adalah perencanaan yang mencakup berbagai kegiatan untuk kota atau kabupaten Perencanaan pendidikan kelembagaan adalah perencanaan yang mencakup satu institusi atau lembaga pendidikan tertentu.

Ruang lingkup perencanaan pendidikan mempunyai jangkauan yang cukup luas, dan dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain:

1. Ditinjau dari *aspekspasialnya*, yaitu perencanaan pendidikan yang memiliki karakter yang terkait dengan ruang, tempat atau batasan wilayah. Perencanaan ini dapat terbagi menjadi: (1) perencanaan pendidikan nasional, yaitu mencakup seluruh proses usaha layanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, yang diatur dalam sistem pendidikan nasional (sispenas) melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional; (2) perencanaan pendidikan

regional, yaitu perencanaan pendidikan yang dibuat dan diberlakukan dalam wilayah regional tertentu, misalnya perencanaan pengembangan layanan pendidikan tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kota, yang menyangut seluruh jenis layanan pendidikan di semua jenjang untuk daerah atau propinsi tertentu; (3) perencanaan pendidikan kelembagaan, yaitu perencanaan pendidikan yang mencakup satu institusi atau lembaga pendidikan tertentu, misalnya perencanaan pengembangan layanan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 'Mandiri' kota 'Maju' tahun 2010, perencanaan Universitas 'Citra Bangsa', dan sejenisnya.

2. Dintinjau dari *aspeksifat dan karakteristik modelnya,* dapat dibagi menjadi: (1) perencanaan pendidikan terpadu (*integratededucational planning*), yaitu perencanaan pendidikan yang mencakup seluruh aspek yang terkait dengan proses pembangunan pendidikan yang esensial (mendasar), dalam koridor perencanaan pembangunan nasional, dalam hal ini perencanaan pendidikan ada keterpaduan atau keterkaitan secara sistemik dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, politik, hukum dan sebagainya; (2) perencanaan pendidikan komprehensif (*comprehension educational planning*), yaitu perencanaan pendidikan yang disusun secara sistematik, rasional, objektif yang menyangkut keseluruhan konsep penting dalam layanan pendidikan, sehingga perencanaan itu memberikan suatu pemahaman yang lengkap atau sempurna tentang 'apa' dan 'bagaimana' memberikan layanan pendidikan yang berkualitas; (3) perencanaan pendidikan strategik (*strategic educational planning*), yaitu perencanaan pendidikan yang mengandung pokok-pokok

perencanaan untuk menjawab persoalan atau opini, atau isu mutakhir yang dihadapi oleh dunia pendidikan, misalnya, persoalan yang dihadapi dunia pendidikan sekarang adalah masalah 'tranformasi teknologi', atau masalah 'rendahnya kualitas guru', atau masalah 'keterkaitan antara dunia usaha dengan *output* lulusan', dan sebagainya. Jadi, perencanaan ini menyangkut beragam strategi untuk menghadapi persoalan yang muncul.

3. Ditinjau dari *aspek waktunya*. Perencanaan pendidikan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: (1) perencanaan pendidikan jangka panjang (*long term educational planning*), yaitu perencanaan pendidikan yang disusun dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ke atas, isi perencanaan jangka panjang ini belum ditampilkan sasaran yang bersifat kuantitatif, melainkan dalam bentuk proyeksi atau perspektif atas keadaan ideal yang diinginkan dalam pembangunan pendidikan. Contoh, program pendidikan nasional dalam sistem pendidikan nasional; (2) perencanaan pendidikan jangka menengah (*mediumterm educational planning)*, yaitu perencanaan pendidikan yang disusun dalam jangka waktu antara tiga sampai delapan tahun (perencanaan untuk empat atau lima tahun atau satu periode kepemimpinan). Perencanaan jangka menengah merupakan penjabaran lebih kongkrit dari perencanaan jangka panjang, yang sudah merumuskan sasaran atau tujuan yang secara kuantitatif akan dicapai; dan (3) perencanaan pendidikan jangka pendek (*short term educational planning)*, yaitu perencanaan pendidikan yang disusun dalam jangka waktu maksimal satu tahun. Perencanaan ini sering disebut perencanaan operasional tahunan (*annual operational planning*), yang memuat

langkah-langkah strategis dan operasional sehari-hari, yang merupakan penjabaran lebih rinci dan aplikatif dari perencanaan jangka memengah.

4. Ditinjau dari *aspek tingkatan teknis perencanaan*. Perencanaan ini dibedakan menjadi: (1) perencanaan pendidikan makro, yaitu perencanaan pendidikan yang bersifat nasional atau sering disebut dengan perencanaan pendidikan nasional, yang berlaku di seluruh negara kesatuan RI dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Perencanaan pendidikan makro ini disebut juga dengan 'sistem pendidikan nasional' (Sispenas); (2) perencanaan pendidikan mikro, yaitu perencanaan pendidikan yang disusun dan disesuaikan dengan kondisi otonomi daerah masing-masing. Dalam perencanaan pendidikan mikro, secara teknis perlu memperhatikan: (a) ketentuan/ standar; (b) kondisi geografis dan demografis; dan (c) infrastruktur yang ada di daerah, sedangkan secara non teknis perlu memperhatikan: (a) aspirasi dan peran serta masyarakat terhadap pendidikan; (b) kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik dan kamanan daerah; (3) perencanaan pendidikan sektoral, yaitu kumpulan program atau kegiatan pendidikan yang menekankan pada sektor tertentu, namun tetap ada keterkaitan dengan sektor lainnya; (4) perencanaan pendidikan kawasan, yaitu perencanaan pendidikan yang memperhatikan kawasan lingkungan tertentu sebagai pusat kegiatan pendidikan, misalnya perencanaan pendidikan kawasan pesisir, kawasan pinggiran kota; (5) perencanaan pendidikan proyek, yaitu perencanaan operasional yang menyangkut implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan, misalnya perencanaan proyek unik sekolah baru SMK.

5. Ditinjau dari *aspekjenis perencanaan*. Perencanaan pendidikan ini dibedakan menjadi: (1) perencanaan pendidikan dari atas ke bawah (*top down educational planning*), perencanaan ini sering disebut juga perencanaan pendidikan makro atau perencanaan pendidikan nasional; (2) perencanaan pendidikan dari bawah ke atas (*bottom up educational planning*), yaitu perencanaan pendidikan yang dibuat oleh tenaga perencana dari tingkat bawah kemudian disampaikan ke pusat, misalnya perencanaan yang dibuat oleh guru, kepala sekolah, Dinas Pendidikan kemudian disampaikan ke Kementrian Pendidikan Nasional; (3) perencanaan pendidikan menyerong dan menyamping (*diagonaleducational planning),* perencanaan ini sering disebut perencanaan sektoral, yaitu perencanaan yang melibatkan kerjasama antar departemen atau lembaga, misalnya, lembaga Kementrian Pendidikan Nasional dengan Bappeda Propinsi; (4) perencanaan pendidikan mendatar (*horizontaleducational planning),* yaitu perencanaan pendidikan yang dibuat dengan menjalin kerjasama antar lembaga atau departemen yang sederajat, misalnya perencanaan pendidikan antara kementrian pendidikan dan kementrian agama dan kementrian sosial; (5) perencanaan pendidikan menggelinding (*rollingeducational planning),* yaitu perencanaan pendidikan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang; (6) perencanaan pendidikan gabungan atas ke bawah dan bawah ke atas (*top down and bottom up educational planning),* yaitu perencanaan pendidikan yang mengintegrasikan atau mengakomodasi kepentingan pusat dan daerah (lokal) (Oliver, Paul, ed. 1996; Usman, H. 2008).

BAB II

PERKEMBANGAN PERENCANAAAN PENDIDIDKAN DAN ALIRAN-ALIRAN PERENCANAAN

A. Asal Usul Perencanaan

Secara historis, perencanaan telah dimulai sejak zaman primtif, bahkan secara teoretis, sejak zaman azali. Secara realistis,perencanaan dapat dilihat pada budaya mesir kuno dalam memperbaiki lingkungannya. Pada masyarakat primitif, perkembangan lingkungan fisik padad umumnya mengekspresikan kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan dari pihak luar. Sebagai contoh, manusia pada awalnya menggunakan lingkungan fisik seperti gua unyuk berteduh dan berlindung. Kemudian, mereka belajar menetap dengan membangun tempat tinggal dengan mengambil keuntungan dari alam, seperti rawa tempat tinggal, gunung, dan sungai. Kemudian telah memiliki kemajuan, ia mulai memerlukan orang lain agar terhidar dari bahaya dan terisolasi. Selain itu, agar mengejakan sesuatu secara bersama-sama proses ini, secara tidak langsung menyangkut perencanaan. Selanjutnya, jizarah Turki ketika membangun pertahanan. Sam halnya dengan yang dilakukan oleh orang-orang Palestinadi Jericho,selanjutnya, perencanaan dan pendidikan pada peradaban Mesopotamia di Irak, kota Syria, Babilonia, Persia, Pulau-pulaudi laut di Aegian. Selanjutnya perencanaan dan pendidikan di Roma, Byzantium, masa renaisans di Eropa, dan mas Baroque. Perencanaan

berlanjut pada konsep taman kota sampai akhirnya melahirkan konsep perencanaan pada pendidikan

Afifudin manengaskan bahwa pemikiran tentang perencanaan pendidikan sebenarnya telah lama, seperti yang dikatakan Olrh Xenophon dalaam "*Lacedaemonian conclusion*" sejak tahun 2500 tahun yang lalu , negara sparta telah membuat recana pendidikan bagi warganya untuk memenuhi keperluan kepemimpinan dalam maksud-maksud politik rakyat Athena. Cina pada masa Dinasti Han dan Peru pada waktu kerajaan Inca telah merencanakan rencana pendidikan mereka agar sesuai dengan kebutuhan yang dituntut oleh tujuan-tujuan pemerintah. Kemudian pada pertengahan ke-16 , jhon knox mengusulkan rencana sistem nasional persekolahan dan prguruan tinggi yang dapat memberikan bekal berupa kombinasi yang serasi antara aspek spiritual kekayaan material bagi kehidupan pada bangsa scot. Salah satu rencana pendidikan yang terkenal dalam kebangkittan eropa pada abad ke-18 dan ke-19 adalah *"plan d'une l'eniversitepour le goverment drussiee"* yang disiapkan oleh diderot atas pesanan tsar katherina II dari rusia. Perealisasiannya untuk membentuk masyarakat baru adalah rencana lima tahun kedepan negara Uni Soviet muda pada tahun 1923.

Beberapa contoh dari sejarah perkembangan pendidikan tersebut tentu berbeda satu sama lainnya dalam hal tujuan, ruang lingkup, komplesitasnya. Setelah itu, perencanaan penididkan terus berkembang sampai terjadi perang Dunia ke-Dua, tetapi dalam bentuk yang persial dan sporadis.Pada umumnya, percanaan pendidikan saat itu mencerminkan hal-hal berikut:

1. berpenglihatan jangka pendek dan biasnya meliputi satu tahun anggaran saja

2. bersifat trakmentaris , yaitu bagian-bagian dari sistem pendidikan direncanakan terpisah satu sama lainnya.
3. tidak diitekgrasikan dengan kebutuhan dan kecenderungan masyrakat dan ekonomi secara keseluruhan.
4. bersifat statis dalam arti model pendidikan yang dianut terus berjalan dengan ciri-ciri yang sama tahun demi tahun

Selama 25 tahun sesudah prang dunia ke-Dua, yaitu dari tahun 1945-1970, sistem pendidikan dan lingkungan mengalami perkembangan yang dahsyat di seluruh dunia. Perkembangan ilmu dan teknologi,penduduk, politik, ekonomi, dan perubahan kebudayaan telah menggucang segalanya. Akibat terhadap pendidikan adalah tugas-tugas baru, tekanan, dan masalah-masalah yang berat,baik dalam kuantitas maipun kualitas. Cara-cara perencanaan dan pengelolaan yang dilakukan tidak memadai lagi.maslah perencanaan pendidikan muncul kepermukaan secara spektakuler digugah oleh keluarnya sebuah buku yang ditulis oleh Dr.phillip-combs yang berjudul "*the worldeducational crisis a syistem analisis*" pada tahu 1968. dalam buku combs dengan brilian mengemukakan bahwa dunia pendidikan tengah mengalami krisis besar karna kebutuhan dan perkembangan pendidikan tidak akan dapat dipenuhi dengan sumber-sumber yang tersedia. Oleh kerena itu, ia mengimbau agar pendidikan direncanakan secara seksama dengan melihat keterbatasan-keterbatasan yang ada dan diarahkan pada penyelegaraan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan ekonomi dan sosialmasyarakat yang bersangkutan.

Sejak tahun 1960-an, mulailah dunia diramaikan oleh beberapa tanggapan, tulisan, seminar, dan sebagiannya yang mengulas dan membicarakan masalah pentingnya perencanaan pendidikan. Pada awal 1960-an itulah,UNESCO (United Nation

for Education,Social and Cultural organization) mengambil prakasa untuk mengoordinasikan srgala usaha kearah lahirnya perencanaan pendidikan sebagai suatu aplikasi dari rasional dan sistematis terhadap proses perkembangan pendidikan. Tujuannya adalah pendidikan lebih efektif dan efesien dalam menanggapi kebutuhan anak didik dan masyarakat pada umumnya.

Puncak dari perkembangan tersebut ialah didirikannya internotional institut for educational planning (HEP) PADA pada tahun1963 oleh UNESCO yang berkadudukan diParis. Tujuan HEP tersebut adalah memperluas pengatahuan dan memasok ahli-ahli yang kompeten dalam bidang perencanaan pendidikan untuk membantu bangsa-bangsa di dunia untuk meningkatkan pembangunan mereka. Usaha-usaha yang dilalakukan HEP antara lain ialah mengadakan penelitian pendidikan dan latihan yang bertailian dengan perencanaan pendidikan. Denga bantuan dari United notion development program (UNDP). Proyek ini mendapat bantuan besar dari berbagai pihak, baik dari dalam luar negri kegiatan proyek ini terutama mengadkan penelitian, seminar, simposium, dan diskusi yang semuanya diarahkan untuk menghasilkan diagnosis tentang keadaan pendidikan di indonesia kanpendidikan dari sekolah dasar samapai perguruan tinggi dan semua pendidikan, baik umum maupun kejuruan. Hasil PPNP tersebut mendapat sambutan baik dari UNECO/ UNDP sehingga mereka membuat proyek khusu untuk membantu indonesia dalam mengembangkan perencanaan penddidikannya.untuk menampung kegiatan proyek UNESCO tersebut, depertemen pendidikan dan kebudayaan pada tahun 1969 mendirikan sebuah badan yang bernama badan pembinaan pendidikan (BPP). BPP adalah wadah gabungan

dari peleburan biro perencanaaan Depdikbud dan PPNP. Sejak tahun 1975, BPP diubah namanya mejadi bada penelitian dan pengebanga pendidikan dan kebudayaan (BALITBANG DIKBUD). Sejak itulah kiprah mengenai perwncanaan pendidikan di indonesia mandapat mementumnya.dengan berdirinya BPP dan didukung oleh UNESCO, terdilah suatu kegaiatan pendidikan yangdapat mempertemukan berbagai gagasan para ahli, dan interaksi antara dunia pedidikan indonesia dan dilur dengan skala besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya.sejak saat itulah, melalui BPP tersebut indonesia mengirim tenaga-tenaga pendidik ke luar negeri yang meliputiberbagai bidang garapan. Khusus untuk tenaga-tenaga perencnaan pendidikan, secara beangsur-angsur dikirim tenga untuk mengikuti pendidikan SKEP dan di Pari dan Regional Center for Education Innovation and Technology (INNOTECH) di Manila.

B. Aliran-Aliran Perencanaan

Dalam sejarah praktik perencanaan , pendekatan perencanaan koprehensif yang saat ini di pakai di indonesia, bukan stu-satunya pendekatan,aliran, atau caoarak perencanaan. Tipe atau corak perencanaan yang lebih baru muncul sebagai respons terhadap corak yang telah ada. Selain itu, corak perencanaan yang sudah lama sekali, yaitu perencanaan induk (Master planning) yang tekait dengan urban design juga dipakai lagi, terutama dalam perencanaan kota-kota baru.Secara umum , keragaman corak perencanaan yang ada dalam pratik saat ini yaitu :

1. Perencanaan koonfrehensif (*comprehensifplannning*)
2. Perencanaan induk (*masterplanning*)
3. perencanaan strategis (*strategicplanning*)

4. Perencanaan ekuiti (*ekuityplanning*)
5. Perencanaa advokasi (*advocaciplannning*)
6. Perencanaan intrikmental (*incrementalplanning*)

Meskipun termasuk yang paling "tua" corak perencanaan induk (Master plannning) muncul lagi di indonesia untuk perencanaan koto-kota baru (sebagai ueban disgn) pada perencanaan kota baru, prencanaan tidsk dpat dilakukan dngan cara komprehensif karena belum dad penduduk atau calon penduduk yang pasti, dehingga tidak ada data kependudukan, sosial ekonomi dan sebagainya yang perludananlisi secara komprehensif. Aspek yang pasti hanyalah fisi dan tat ruang yang mejadi fokus perencanaan induk. Perencanaan komprehansif melakukan perencanaan secara menyaluruh yang berarti mempunyai skala luas, denga pengambilan keputusan yang komplek. Menanggapi hal ini, aliran instrimentalis mempunyai cakupan perencanaan yang lebih senpit dan terjangkau. Apabila perencanaan koprehesif menganagap satu kepentingan umum (satu kesepakatan), perencanaan advokasi mengangap bahwa ad pihak-pihak yang tidak terwadahi kepentingannya dan perlu mendapat "pembelaan" (advokasi). Contoh dalah hal ini kuam miskin minoritas di perkotaan yang suaranya tidak dapat tertampung dalam perencanaan komprehensif.

Perencanaan ekuiti menganggap bahwa perencanaan komprehenf tidak mampu menjangkau akar-akar keniskinan dan tidak dapat mengatasi ketidak adilan, serta tidak menepetkan pemerataan sebagai tujuan utama bersama perencanaan advokasi. Aliran ekuiti bersama dalam pihak bersebrangan dengan perencanaan komprehensif yang dianggap"tidak cukup adil. Dalam menangani masalah perkotaan. Perenanaan advolasi bersama-sama dapat disebut sebagai perencanaan "perencanaan parti sipatori" meski

partisipasi masyarakat yang besar juga dalam perencanaan strategis hanya menfokuskan oerhatiannya ppada beberaoa isu utama dan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Tujuan dan sasaran dalam perencanaan komprehensif karena bersifat menyeluruh , sering dituduh "terlalu luas" ,ambisius.

Menangapi hal ini, perencanaan strategis hanya memfokuskan pada beberapa isu utama dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Berikut ini merupakan penjelasan dari beberapa aliran perencanaan.

1. Aliran perencanaan komprehensif

Seperti arti namanya yaitu komprehensif, menyeluruh, analisisi perencanaan komprehebsif dilakukan dari semua aspek kehidupan perkotaan (kependudukan, perekonomian sosial,fisik,dan sebagainya), proses perencanaan komprehansif dilakukan secara sekuensial langkah-langkah sekuensial meliputi:

a. pengupulan dan pengolahan data
b. Analisis
c. Perumusan tujuan dan sasaran perencanaan
d. Pengembangan alternatif rencana
e. Evaluasi dan seleksi alternatifrencana
f. Penyusunan dokumen rencana

Perencanaan bersifat terperinci, jelas, dan berupa rancang pengembangan fisik atau tat ruang yang meliputi peta rencana guna lahan, peta rencana jaringan jalan dan sebagainya. Rencana komprehensif di indonesia disebut sebagai rencan umum tat ruang kota.

2. Aliran perencanaaan induk

Perencanaan induk (master planning) biasa diterapkan pada perencanaan komplek bagunan/kota secara fisik dilakukan secara satu disiplin, yaitu arsitektur. Keduanya perencanaan induk dan perencanaan komprehensif mempunyai kesamaan produk akhir yang jelas. Proses perencanaan induk mengacu pada perencanaan dan perancangan arsitektur, dengan langkah sekuensial:

a. Problem seeking
b. Programming
c. Designing

3. Aliran perencanaan strategis

Pendekatan perencanaanstrategis yang biasa dipakai dalam dunia usaha dan miter. Pendekatan strategis menfokuskan secara efisien pada tujuan spesifik dengan meniru cara persahaan swasta yang diterap pada gaya perencanaan publik tanpa kepemilikan publik mereka menyimpulkan bahwa banyak unsur dasar perencanaan strategis seperti berorientasi tindakan, kajian lingkungan, partisipasi,kajian kekuataan dan kelemahan masyarakat.perencanaan strategis tidak mengenal standar baku dan prosesnya mempunyai variasi yang tidak terbatas. Meskipun demikian proses perencanaan strategis memuat unsur-unsur:

a. Perumusan visi dan misi
b. Pengkajian lingkungan eksternal
c. Pengkajian lingkungan internal
d. Perumusan isu-isu strategis
e. Penyusunan stategi pengembangan (yang dapat ditambah dengan tujuan dan sasaran)

Proses perencanaan strategis tidak bersifat sekuensaial penuh, tetapi dapat dimulai dari salah satu langkah ke 1,2,dan 3.setelah ketiga langkah ini selesai,barulah dilakukan langkah ke 4,yang disusul dengan langkah ke 5. Setelah rencana strategis renstra seselai disusun, diimplementasikan dengan terlebih dahulu menyusun rencana-rencana kerja aksi/tindakan. Suatu rencana kerja dapat berupa rencana zoning-seperti diterapkan pada perencanaan strategis pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan,yang dikembangkan dalam proyek Marine Resource Evaluation and Plenning (MREP) di Depdagri. Pada suatu masa transisi dari pemerintahan yang bersifat sentralistik kuat yang menyeragamkan tipe perencanaan yang dipakai-misalnya pemerintahan orde baru ke pemerintahan desentralistik dalam era otonomi daerah mungkin sekali dipakai suatu versi rancangan strategis yang diseragamkan untuk semua daerah.

Sekalipun demkian dapat ditarik benang merah nya bahwa inti perencanaan strategi selalu muncul karena ada antisipasi terhadap perubahan atau masalah dalam pendidikan yang perlu diselesaikan.apapun masalah itu,baik sederhana atau kompleks,membutuhkan penyelesaian yang tuntas,artinya penyelesaian yang tidak setengah-setengah sehingga masalah itu tidak muncul lagi dalam waktu yang lama atau untuk selamanya karena pemecahan masalah merupakan suatu strategi yang dinamakan program strategi.program strategi inilah yang merupakan wujud misi,tujuan ideal (*goal*) ,tujuan yang bisa dilaksanakan (objective),dan kebijakan dalam melaksanakan.

Perencanaan strategi pada hakikatnya merupakan proses melahirkan tujuan ideal,tujuan yang dapat dilaksanakan dan kebijakan.itulah sebabnya cunningham mengatakan perencanaan strategi sebagai "*doing to the right things*"

,sedangkan perencanaan operasional dikatakan sebagai " *doingthingsright* ". Hal tersebut berkaitan dengan perubahan lingkungan,pengembangan organisasi pendidikan,misi yang diemban oleh organisasi,dan tujuan perencanaan.

Perencanaan strategi, seperti sudah diuraikan, ini berarti sifat perencanaan strategi adalah menjangkau waktu yang panjang untuk masa yang akan datang.selain itu, perencanaan ini juga bersifat mengantisipasi perubahan untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan penyesuaian terhadap lingkungan.perencanaan strategi yang dimulai dari mencari informasi,menganalisis, menyeleksi sampai dengan membentuk program untuk jangka panjang yang sumber-sumber nya belum jelas lebih sulit daripada membuat perencanaan operasional untuk jangaka pendek yang hanya bertugas melaksanakan program dengan sumber-sumber yang sudah jelas.

Selain tujuan yang harus dijelaskan, perencanaan stategi juga diminta memberi alasan atau rasional alasan pemilihan program seperti itu untuk menyonsong perubahan dan menyelesaikan masalah atau alasan suatu misi harus dipikul. perencanaan ini dengan misi nya harus juga menjelaskan kondisi tempat perencanaan itu akan dilaksanakan, yaitu hal-hal yang akan dikerjakan.

Pembuatan perencanaan strategi untuk meningkatkan hasil belajar matematika misalnya, adalah atas dasar prestasi para siswa dibidang itu masih dapat ditingkatkan.syarat-syarat harus dipenuhi, misalnya fasilitas belajar mencukupi,lingkungan belajar yang kondusif, orang tua yang memberi layanan yang positif,dan guru-guru yang tidak mengenal putus asa. Apakah perncanaan strategi sudah selesai apabila program strategi telah terwujud? Pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan ini sebetulnya belum selesai.lebih-lebih,apabila

hasil perencanaan itu sudah dilaksanakan dalam jangka panjang yang tidak mustahil akan ada rintangan ditengah jalan. Sekalipun demikian, akan lebih baik kalau kemungkinan halangan-halangan itu sudah dipikirkan sejak masih dalam perencanaan. Ada juga ahli yang membandingkan perencanaan pada fase awal ini sebagai manajemen strategi yaitu perluasan dari perencanaan strategi

Fase pertama perencanaan ini sebagai pengembangan, sedangkan fase disebutkan sebagai usaha mangerjakan (menyelesaikan) rencana tersebut.

Perecanaan dipandang belum cukup hanya merupakan dokumentasi hasil pikiran, melainkan proses penciptaan dokumen itu, implementasinya, pelaksanaan hasilnya di lapangan dapat dijauhkan dari gangguan-gangguan baik yang bersumber dari dalam lembaga pendidikan itu maupun dari luar lembaga, yaitu dari pihak para stake holder. Manajemen strategi menghadapi tujuan yang ambigu, yaitu aturan-aturan yang harus dipatuhi sebagai lembaga pendidikan negara serta kebutuhan, minat, dan tuntutan orangtua/masyarakat. Dengan demikian perencanaan mepunyai dua sisi. Sisi pertama membentuk tujuan,misi dan program yang tepat dan sisi adalah upaya mengkreasikan organisasi yang hangat, kerja sama yang harmonis dari segala pihak yang berkepentingan. Dengan demikian perencanaan strategis mempunyai dua sisi. Sisi peretama membentuk tujuan, misi,dan program yang tepat dan sisi lainnya adalah upaya mengkreasikan organisasi yang hangat kerja sama yang harmonis dari segala pihak yang berkepentingan.

4. Aliran perencanaan ekuiti

Perencanaan ekuiti mengikuti pendapat perencanaan advokasi bahwa akar-akar ketidak adilan sosio ekonisme

perkotaan perlu diatasi, tetapi tidak sependapat bahwa perencanaan mempunyai tanggung jawab eksplisit untu membantu pihak-pihak yang tidak beruntung.Dilaporkan oleh Norman kromholz pada tahun 1982, yang pernah bertugas sebagai direktur perencanaan Cleveland(AS) mempunyai pengalaman imprensift dalam melakukan pemerataan sosial di sebuah kota industri yang mengalami pertumbuhan negatif. Hasil perencanaan ekuiti dapat saja menjadi satu dengan hasil perencanaan atau perencanaan strategis apabila partisipasi"kaum pingiran".

5. Aliran perencanaan advokasi

Perencanaan advokasi meragukan adanya "kepentingan umum". Sebaliknya perencanaan harus dapat pluralisme yang berimbang dengan cara mengadvokasi ("memberi hak besuara") pihak-pihak yang tidak mampu menyalurkan aspirasinya. Perencanaan tradisional menghambat tumbuhnya luralisme yang efektif karena:

a. Komisi perecanaan (semacam bappeda) tidak demokratis dan kurang sekali mewakili kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat yang beragam (flural).
b. Perencanaan kota tradisional berfokus pada aspek fisik yang terpisah dengan aspek sosial sehingga mengabaikan adanya konflik sosial dan ketidakadilan di kota. Menurut perencanaan advokasi tiap kelompok masyarakat dapat mempunyai rencana sendiri.

6. Aliran Perencanaan Instrimental

Kritik paling awal dalam sejarah terhadap pendekatan perencanaan komprehensif dan sangat mempengaruhi dilakukan oleh *Charles Lind Blom* pada tahun 1959. Ia mengkritik pendekatan perencanaan sebagai model perencanaan yang

membutuhkan tingkat ketersediaan data dan kompleksitas analisis yang berada diluar jangkauan dan kemampuan para perencana pada umumnya. Menurutnya, praktik jarang perencanaan dilakukan secara komprehensif sehingga lebih baik perencanaan dilakukan secara inkrimental sepotong demi sepotong menggunakan "perbandingan terbatas dari hasil-hasil berurutan" untuk mencapai tujuan jangka pendek yang realistis. Pendekatan ini juga dikritik dengan kelemahannya dalam berpikir induktif dengan berasumsi bahwa stimulus dan respon jangka pendek dapat menggantikan kebutuhan terhadap visi dan teori. Meskipun menerima kritikan tersebut, pendekatan ini merupakan argumen balik(kontra) terhadap perencanaan tradisional "master planning" yang berbasis kekomprehensifan arsitektur dan oerancangan kota. Pendekatan instrimental meningkatkan orientasi pada analisis marginal dari kebijakan ekonomi dan politik pragmatis.

C. Perencanaan Tradisional dan Modern

Secara diagletika,tradisional merupakan lawan dari modern.persoalannya adalah maksud perencanaan tradisional & modern.

1. Perencanaan Tradisional mempunyai karakteristik bahwa penetapan tujuan perencanaan & cara pencapaian tujuan dilakukan oleh perencana, dalam *Fains Tein* alasan bahwa hal itu sebaik nya dilakukan oleh perencana adalah para perencanalah yang paling mengetahui tujuan & cara yang benar karna mereka adalah pakar berpengalaman sehingga mereka dapat dipercaya untuk menerapkan kkeahliannya dalam perncanaan publik.

Perencanaan tradisional merupakan produk dari teori politik tekno kratik teori politik teknokratik ini muncul dalam

era industri,yang pada era tersebut kekuatan politik berada pada golongan atas yang menguasai teknologi.

2. Perencanaan modern

Lahir sebagai akibat dari lemahnya perencanaan tradisional dalam hal ini lahir beberapa pendidikan beberapa diataranya perencanaan demokratis, ekuiti, intrimental

a. Perencanaan demokratis mulai muncul pada tahun 1960-an dengan mengkritik perencanaan tradisional "memaksa" kritik ini memulai era bergesernya perencanaan "stop down". Perencanaan parsipatory yang di anut oleh tipe perencanaan demokratis (flaintein dan flaintein,1996:268) teori demokrasi yang melandasi perencanaan demokratis menganggap bahwa setiap orang adalah sama dan pendapat tiap orang adalah benar menurut orang (flantain dan flantain,1996:275). Dalam perencanaan demokratis, tujuan dan cara harus berdasarkan kepentingan atau pendapat mayoritas tersebut.
b. Perencanaan ekuiti Agak mirip dengan perencanaan apabila perencanaan demokratis menfokuskan pada proses partisipasi,perencanaan ekuiti menekankan pada program substantif. fokus ini bergeser dari "siapa yang berwenang menetapkan tujuan dan cara" menjadi "siapa mendapatkan apa". Dalam hal ini,istilah perencanaan ekuiti dan perencanaan advokasi (pembelaan) sering diperuntukkan, meskipun dari lontaran aslinya sebagaimana menurut *David Off* dua ragam perencanaan ini berbeda.dari pandangan teori sosialis,kaum tersingkir atau tertindas harus mendapat perimbangan kekuatan politik.mereka harus dibela dalam proses perencanaan biasanya tidak melibatkan kaum " pinggiran " tersebut.
c. Perencanaan inkrimental

d. Melakukan perencanaan dalam jangka pendek,sepotong demi sepotong bersambung,bukan dipikirkan secara jangka panjang.kalau perencanaan ekuiti atau advokasi melihat bahwa antar kelompok atau antar kepentingan terhadap konflik,perencanaan inkrimental melihat sebagai harmoni dari potongan-potongan perencanaan di masyarakat.

BAB III

TEORI DAN RAMALAN (FORECASTING) DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN

A. Teori Perencanaan Pendidikan

Tidak ada teori yang baku dalam ilmu pengetahuan sepanjang teori tersebut dinamis seiring perkembangan pemikiran manusia. Teori perencaan pendidikan pun mengalami pasang surut dalam perjalanannya. Hudson yang di kutip made pidarta, menunjukkan lima proses perencanaan yaitu : radical, advocacy, transactive, synoptic, dan incremental. Tiap-tiap teori perencanaan ini mempunyai ciri-ciri sendiri. Sementara itu, tanner mencoba membentuk teori tersendiri yang disebut teori SITAR sebagai gabungan dari kelima teori tersebut.

1. Teroti radikal

Menekankan pentingnya kebebasan lembaga atau organisasi lokal untuk melakukan perencanaan sendiri, dengan maksud mengubah keadaan lembaga dengan cepat supaya tepat dengan kebutuhan.

2. Teori advocer (advocacy)

Berbeda dengan teori radikal, teori advocer menekankan hal hal yang bersiifat umum atau jamak. Perbedaan lembaga, perbedaan lingkungan, dan perbedaan daerah tidak begitu dihiraukan. Kebaikan teori ini adalah untuk kepentingan umum secara nasional karena ia meningkatkan kerja sama

secara nasional, toleransi, kemanusiaan, perlindungan terhadap minoritas, menekankan hak sama, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Perencaan yang memakai teori ini dilaksanakan oleh pemerintah badan pusat.

3. Teori *transactive*

Teori ini menekankan harkat individu, menjunjung tinggi kepentingan pribadi, keinginan, kebutuhan dan nilai – nilai individud teliti satu persatu sebelum perncanaan dimulai. Toeri ini juga menekankan sifat perencanaan yang desentralisasi suatu desentralisasi yang transactif, yaitu berkembang dari satu individu ke individu secara keseluruhan.

4. Teori *synoptic*

Toeri synoptic paling komprehensip. Oleh karena itu, dalam kepustakaan sering disebut sistem planning, rational system approach, atau rasional komprehensive planning. Teori ini telah menggunakan model berpikir sistem dalam perencanaan. Objek yang direncanakan sering dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat, dan tujuannya sering disebut misi. Proses perencaan synoptic adalah sebagai berikut:

a. Mengenal problem dan lingkungan
b. Mengestimasi ruang lingkup problem dan lingkungan
c. Mengklasifiksi kemungkinan penyelesaian
d. Menginvestigasi problem dan lingkungan
e. Memprediksi alternative
f. Mengevalusai kemajuan atas penyelesaian yang spesifik.

5. Teori incremental

Teori incremental dalam perencaan berpegang pada kemampuan lembaga dan performan para personaliannya. Teori ini berhati - hati sekali terhadap ruang lingkup objek yang

akan ditanganinya. Objek yang ditangani selalu diukur atau dibandingkan dengan kemampuan lembaga dan personalia, kalau cocok dalam arti dapat dikerjakan dengan perkiraan hasil yang memedai barulah direncanakan. Atas dasar pertimbangan tersebut, perencaan tidak dibuat jangka panjang sebab disamping sukar meramal dalam waktu yang panjang juga sukar menentukan kemampuan lembaga dan performan personalianya. Jadi, perencanaan ini menekankan perncanaan jangka pendek saja. Perencanaan untuk masa beberapa tahun dilakukan dengan menambahkan perencanaan- perencanaan pendek yang sudah lampau. Inilah artinya increment.

6. Teori SITAR

Kata sitar adalah diambil dalam huruf depan kelima teori diatas, yaitu *synoptic, incremental, transaktive, advocacy,* dan *radical.* ini menunjukkan bahwa teori SITAR merupakan gabungan dari kelima teori itu. ''Tanner '' mengatakan teori ini sebagai *complementary planning process.* Satu proses saling melengkapi antara kelima teori yang ada. Kelima teori itu yang dikatakan sebagai tradisinal, bila masing masing dipraktikkan secara terpisah, ia akan mencapai sasaran yang tidak lengkap, sebab masing masing mempunyai ciri dan penekanannya sendiri sendiri.

7. Teori lain

Disamping keenam teori perencanaan yang telah disebutkan ada beberapa model perencanna yang tidak dimasukkan kesalah satu teori itu. Dua diataranya adalah simulasi dan *game* (permainan). Mengapa simulasi dan *game* dapat dimasukkan sebagai teori, konsep, atau model ? sebab, keduanya memenuhikriteria yang dituntut oleh suatu model.

Kriteria yang harusa dipenuhi suatu model adalah sebagai berikut:

a. Memiliki langkah – langkah proses, yaitu langkah – langkah dalam membuat konsep.
b. Ada *perspektive origins*, yaitu wawasan yang asli dari orang – orang atau kelompok yang terlibat dalam proses.
c. Memiliki *representation form*, yaitu bentuk konsep yang final.

Dalam perencanaan lembaga pendidikan, kadang-kadang seorang perencana belum tahu banyak tentang hal – hal yang harus ia kerjakan dalam rangka merencanakan perbaikan suatu unit sekolah. Salah satu cara yang dia tempuh adalah langsung terjun dan berpura pura menjadi personalia tetap pada kantor pendidikan tingkat kabupaten yang membawakan beberapa sekolah.

B. Kedudukan Ramalan dalam Perencanaan

Secara Eksplisit, pembahasan mengenai teori peramalan kebijakan sangatlah sedikit. Namun, secara implisit, peramalan kebijakan terkait menjadi satu dengan proses analisa kebijakan. Karena didalam menganalisa kebijakan, untuk menformulasikan sebuah rekomendasi kebijakan baru, maka diperlukan adanya peramalan-peramalan atau prediksi mengenai kebijakan yang akan diberlakukan dimasa yang akan datang. Namun, satu dari sekian banyak prosedur yang ditawarkan oleh para pakar Dunn, masih memberikan pembahasan tersendiri mengenai peramalan kebijakan. Menurut Dunn, Peramalan Kebijakan (*policy forecasting*) merupakan suatu prosedur untuk membuat informasi factual tentang situasi social masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan.

Tujuan daripada diadakannya peramalan kebijakan adalah untuk memperoleh informasi mengenai perubahan dimasa yang akan datang yang akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan serta konsekuensinya. Oleh karenanya, sebelum rekomendasi diformulasikan perlu adanya peramalan kebijakan sehingga akan diperoleh hasil rekomendasi yang benar-benar akurat untuk diberlakukan pada masa yang akan. Didalam memprediksi kebutuhan yang akan datang dengan berpijak pada masa lalu, dibutuhkan seseorang yang memiliki daya sensitifitas tinggi dan mampu membaca kemungkinan-kemungkinan dimasa yang akan datang.

Permalan kebijakan juga diperlukan untuk mengontrol , dalam artian, berusaha merencanakan dan menetapkan kebijakan sehingga dapat memberikan alternative-alternatif tindakan yang terbaik yang dapat dipilih diantara berbagai kemungkinan yang ditawarkan oleh masa depan. Masa depan juga terkadang banyak dipengaruhi oleh masa lalu. Dengan mengacu pada masa depan analisis kebijakan harus mampu menaksir nilai apa yang bisa atau harus membimbing tindakan di masa depan.

Ramalan tidak haya berlaku di dunia cuaca dan ilmu astronomi. Ramalan telah merambah kedalam berbagai ilmu aspek pengetahuan. Bahkan, dalam ramalan pun terdapat praramalan. Lewis menyatakan bahwa asumsi asumsi dalam perncanaan menunjuk pada ramalan yaitu, apa kira – kira yang terjadi pada masa yang akan datang. Adapun perencaan mengacu pada bagaimana seharusnya masa yang akan datang itu. Dengan kata lain, ramalan tentang program meruoakan konsep perencanaan.

Dalam meramalkan perencanaan dibutuhkan teknik – teknik jitu dalam meramal, Kotler menyebutkan tiga macam

teknik, yaitu ekstrapolasi kecendrungan, metode konsensus dengan teknik delphi, dan metide delphi dampak silang (cross-impact matric methods). Lewis mengatakan tujuh metode yaitu metode delphi, metode ETE (estimate-talk-estimate), metode matematika, metode kecendrungan dan sirkel, metode kohort, metode amalgamasi, dan metode lembaran kerja(worksheet).

C. Bentuk-Bentuk Ramalan Kebijakan

Peramalan kebijakan menurut Dunn memilki tiga bentuk utama yang antara lain: proyeksi, prediksi dan perkiraan. Suatu *proyeksi* adalah ramalan yang didasarkan kepada ekstrapolasi atas kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa yang akan datang. Biasanya, penggunaan bentuk proyeksi di peroleh melalui kasus parallel, dimana asumsi mengenai validitas metode tertentu atau kemiripan kasus digunakan untuk memperkuat pernyataan.

Bentuk yang kedua yaitu *prediksi*. Ramalan didasarkan kerangka teoritik yang tegas. Asumsi ini dapat berbentuk hokum teoritis, seperti misal hokum berkurangnya nilai uang, atau proposrsi yang menyatakan bahwa pecahnya masyarakat sipil disebabkan oleh adanya kesenjangan antra harpan dan kemampuan. Prediksi ini dapat dilengkapi dengan argumentasi dari mereka yang berwenang (missal penilaian yang informative) dan metode (misalnya model ekonomerik).

Bentuk yang ketiga adalah peramalan prediksi, yaitu peramalan yang berdasarkan penilaian informative atau penilaian para pakar tentang situasi masyarakat masa depan. Penilaian ini dapat berbentuk penilaian intuitif dimana lebih banyak mengkombinasikan antara daya kekuatan batin dan kreatifitas para pakar intelektual.

D. Jenis-Jenis Masa Depan

Dunn membagi waktu masa depan untuk mengestimasi situasi social menjadi 3 yang antara lain adalah; masa depan potensial (potensial future), masa depan yang masuk akal (plausible future), dan masa depan normative. Masa depan potensial disebut juga masa depan alternative, merupakan situasi social yang mungkin terjadi, yang berbeda dengan situasi social yang memang terjadi. Situasi masa depan tidak pernah pasti sampai benar-benar terjadi, dan oleh karenanya ada banyak sekali masa depan potensial.

Sedangkan masa depan yang masuk akal (plausible future) adalah situasi masa depan yang atas dasar asumsi tentang hubungan antar lingkungan dan masyarakat, dan ini diyakini akan berlangsung jika pembuat kebijakan tidak mengintervensi guna mengubah arah suatu peristiwa. Dan masa depan normative adalah masa depan yang potensial maupun plausible yang konsisten dengan konsep analis tentang kebutuhan, nilai dan kesempatan yang ada di masa depan. Salah satu aspek penting dari masa depan normative adalah spesifikasi *tujuan dan sasaran*. Pada masa depan normative ini perlu adanya analisa yang teliti terhadap perubahan yang terjadi dalam hasil akhir maupun cara-cara kebijakan di masa depan. Menurut Dunn, dalam menentukan sebuah kebijakan ada baiknya antara tujuan (*goal*) dan sasaran (objevktives). Walaupun keduanya sama-sama berorientasi ke depan, tujuan mengekspresikan maksud-maksud yang luas dan jarang diungkapkan dalam bentuk definisi operasional sedangkan sasaran bersifat lebih spesifik dan mengungkapkan definisi operasional.

E. Sumber – sumber tujuan, Sasaran dan Alternatif

Dalam meramalkan kebijakan yang akan diberlakukan, maka baik seorang analis maupun pembuat kebijakan harus

menemukan sumber tujuan, sasaran serta alternative yang akan digunakan dalam membuat kebijakan uang antara lain:

1. *wewenang*, dalam memprediksi sebuah kebijakan yang akan datang, seorang analis dapat berdiskusi dengan para pakar untuk mencari alternative pemecahan permasalahan.
2. *Wawasan,* seorang analis dapat menggunakan intuisinya, penilaian (judgment), atau pengetahuan tersembunyi dari orang – orang yang dipercayai cukup memahami suatu masalah.
3. *Metode*, pencarian alternative pemecahan permasalahan dapat dilakukan dengan melakukan analisa dengan menggunakan metode yang tepat dan inovatif.
4. *Teori Ilmiah,* teori yang dibuat dalam ilmu-ilmu social dan eksakta dapat digunakan sebagai pijakan pencarian alternative pemecahan permasalahan kebijakan.
5. *Motivasi,* keyakinan, nilai dan kebutuhan dari para penentu kebijakan dapat dijadikan sebagai sumber pemecahan permasalahan kebijakan. Alternative dapat dibuat dari tujuan serta sasaran dari suatu kelompok.
6. *Kasus Paralel.* Pengalaman kebijakan dari negara atau kota lain serta kasus – kasus permasalahan kebijakan dapat digunakan sebagai peramalan alternative kebijakan.
7. *Analogi,* kemiripan antar permasalahan yang berbeda juga dapat digunakan sebagai sumber alternative kebijakan. Semisal undang – undang yang dirancang untuk meningkatkan kesamaan kesempatan kerja bagi wanita merupakan hasil dari analogi terhadap perlindungan hak – hak kaum minoritas.
8. *System etik,* teori tentang keadilan social yang dibangun oleh para filsuf dan pemikir social lain dapat juga digunakan

sebagai sumber alternative pemecahan kebijakan di berbagai bidang.

Hal – hal tersebut diatas dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi kewenangan kebijakan, tujuan serta alternative dalam meramalkan sebuah kebijakan.

F. Pendekatan-Pendekatan Peramalan

Sebuah permasalahan kebijakan, tujuan, sasaran serta alternative ditetapkan. Ada beberapa jenis pendekatan yang dapat digunakan sebagai alternative pemecahan masalah kebijakan. Pendekatan ini digunakan agar seorang analis 1) Memutuskan apa yang diramal, yakni menentukan obyek ramalan 2) Menentukan bagaimana membuat ramalan, yakni memilih satu atau lebih dasar untuk meramal; 3) Memilik teknik yang paling sesuai dengan obyek dan dasar yang dipakai. Yang menjadi Obyek dari suatu ramalan adalah titik pijakan suatu proyeksi, prediksi atau perkiraan. Ramalan memiliki empat objek antara lain:

1. *Konsekuensidari kebijakan yang ada*. Ramalan dapat digunakan untuk mengestimasi perubahan yang mungkin terjadi jika pemerintah tidak menempuh tindakan baru.*Konsekuensi dari kebijakan baru.* Ramalan dapat digunakan untuk mengestimasi perubahan yang ada didalam masyarakat yang dperkirakan akan terjadi jika kebijakan baru diterapkan.
2. *Isi dari kebijakan baru.* Ramalan dapat digunakan untuk mengestimasi perubahan dalam isi dari kebijakan yang baru.
3. *Perilaku para penentu kebijakan.* Ramalan dapat digunakan untuk mengestimasi dukungan (atau oposisi) yang mungkin muncul atas rancangan kebijakn baru.

Basis dari ramalan merupakan seperangkat asumsi atau data yang digunakan untuk menetapkan kemungkinan (plausibility) dari ramalan atas konsekuensi dari kebijakan baru maupun kebijakan yang telah ada, isi dari kebijakan baru, atau perilaku para penentu kebijakan. Terdapat tiga basis utama ramalan kebijakan yang utama:

Ekstaplorasi kecenderungan adalah pemanjangan kecenderungan masa lalu ke masa depan. Ekstaplorasi ini berdasar pada asumsi bahwa apa yang telah terjadi dimasa lalu juga akan berlangsung dimasa yang akan datang, bila tidak ada kebijakan baru atau peristiwa yang tak terduga yang mempengaruhi suatu peristiwa. Ektraplorasi kecenderungan ini berdasarkan pada logika induktif, yaitu proses berpikir yang berangkat dari pengamatan khusus ke kesimpulan atau pernyataan umum.

Asumsi teoritik merupakan seperangkat hokum atau proposisi yang terstruktur secara sistematis dan teruji secara empiric yang membangun suatu prediksi tentang berlangsungnya suatu peristiwa atas dasar peristiwa yang lain. Asumsi teoritik berbentuk kausal, dan perannya adalah menjelaskan atau memprediksi. Penggunaan asumsi teoritik didasarkan pada logika deduktif, yakni proses berpikir dari dari pernyataan, hokum atau proposisi umum ke sejumlah pernyataan, hokum atau proposisi umum ke sejumlah pernyataan dan informasi khusus.

Penilaian informative merupakan pengetahuan yang didasarkan pada pengetahuan dan intuisi, ketimbang berdasarkan pemikiran induktif atau deduktif. Penilaian informative ini biasanya diungkapkan oleh para pakar atau orang yang berpengetahuan dan digunakan dalam kasus – kasus dimana teori dan/atau data empiric tidak tersedia atau

kurang memadai. Penilaian informative ini berdasarkan pada logika retroduktif, yaitu proses berpikir yang mulai dengan pernyataan tentang masa depan dan kemudian kembali ke informasi dan asumsi yang diperlukan untuk mendukung pernyataan tersebut.

Dari ketiga basis tersebut diatas, dalam praktik, batas – batas antara cara berpikir induktif, deduktif dan retroduktif seringkali tidak jelas. Ketiga cara tersebut keberadaannya bisa melengkapi satu sama lain. Metode retroduktif merupakan cara yang paling kreatif untuk digunakan sebagai cara untuk meramalkan masa depan potensial. Sedangkan metode berpikir induktif dan deduktif dapat digunakan sebagai penghimpun informasi dan teori baru untuk membuat pernyataan tentang situasi social masa depan. Namun, pada dasarnya metode berpikir induktif dan deduktif ini adalah konservatif, karena penggunaan penggunaan informasi tentang peristiwa masa lalu atau penerapan teori ilmiah yang telah mapan dapat membatasi pandangan seseorang tentang masa depan yang potensial (yang berbeda dengan plausible).

G. Metode dan Teknik Peramalan Kebijakan

1. Peramalan Ekstrapolatif

a. Pengertian

Peramalan ekstrapolatif adalah peramalan yang berdasarkan pada beberapa bentuk analisis antar waktu (time series analysis), yakni analisis data numerik yang dihimpun pada beberapa titik waktu dan ditampilkan secara kronologis.

b. Kegunaan peramalan ekstrapolatif

Peramalan jenis ini telah digunakan untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya

penduduk, konsumsi energi, kualitas hidup, dan beban kerja pemerintah. Ketika digunakan untuk membuat proyeksi, maka peramalan ekstrapolatif ini berdasarkan pada 3 asumsi dasar, yaitu:

- **Persistensi**

  Pola-pola yang teramati dimasa lampau akan tetap ditemui dimasa depan

  Contoh : Jika pemilihan jalur pendidikan yang lebih tinggi telah meningkat dimasa lalu, maka akan meningkat pula dimasa depan.

- **Keteraturan**

  Variasi pada masa lalu sebagaimana ditunjukkan oleh kecenderungannya akan terulang secara kontinyu dimasa depan.

  Contoh : Jika kurikulum berubah setiap 10 tahun, maka siklus ini akan trulang dimasa depan.

- **Reliabilitas dan Validitas Data**

  Pengukuran trend akan reliabel (cukup cermat atau memiliki konsistensi internal) dan valid (mengukur apa yang hendak di ukur)

  Contoh : Statistik tingkat kelulusan siswa merupakan alat ukur yang relatif tidak cermat (persis) atas tingkat kecerdasan siswa yang sebenarnya.

Jika ketiga asumsi di atas dipenuhi, maka peramalan ekstraplatif lebih baik dibandingkan dengan intuisi tentang dinamika perubahan dan memberikan pemahamn yang lebih besar tentang situasi masyarakat masyang lurus a depan. Tetapi jika salah satunya tidak dipenuhi, maka teknik peramalan ekstrapolatif tampaknya akan memberikan hasil yang tidak akurat atau salah arah. Hal ini dikarenakan

kepatuhan terhadap asumsi metodologid ini dan juga asumsi metodologi lain tidak dijamin akurasinya. Menurut dunn kurang akuratnya dua atau lebih ramalan seringkali diakibatkan oleh keputusan yang kaku atas asumsi teknik. Itulah sebabnya penilaian (judgment) merupakan hal yang begitu penting bagi semua bentuk ramalan, termasuk peramalan yang menggunakan model yang kompleks.

2. Peramalan Teoritik

a. Pengertian

Adalah peramalan yang didasarkan pada asumsi tentang sebab dan akibat yang terkandung di dalam berbagai teori dengan menggunakan logika deduktif.

b. Kegunaan peramalan ekstrapolatif

Metode ini digunakan untuk membantu analis membuat prediksi tentang situasi masyarakat di masa depan atas dasar asumsi teoritik dan data masa lalu maupun masa kini.

c. Beberapa prosedur dalam pembuatan peramalan teoritik antara lain:

- **Pemetaan teori**

  Pemetaan teori merupakan teknik yang membantu analis untuk mengidentifikasi dan merancang asumsi-asumsi kunci di dalam suatu argumen teori atau kausal.

  Pemetaan teori dapat membantu mengungkap empat jenis argumen kausal: Konvergen, Divergen, Serial, dan Siklik. *Argumen konvergen* adalah argumen yang didalamnya terdapat dua atau lebih asumsi tentang sebab akibat yang digunakan untuk mendukung suatu kesimpulan atau pernyataan. *Argumen divergen* adalah argumen yang didalamnya

terdapat sebuah asumsi yang mendukung lebih dari satu pernyataan atau kesimpulan. *Argumen serial* adalah sebuah kesimpulan atau pernyataan yang digunakan sebagai asunsi untuk mendukung sejumlah kesimpulan atau pernyataan lanjutan. Sedangkan *argumen siklik* adalah argumen serial yang didalamnya terdapat kesimpulan atau pernyataan akhir dalam suatu rangkaian yang dikaitkan dengan pernyataan akhir dalam suatu rangkaian dikaitkan dengan pernyataan atau kesimpulan pertama dalam rangkaian itu.

- **Pembuatan model teoritik**

  Pembuatan model teoritik *(theoritical Modelling)* menunjuk pada suatu teknik dan asumsi yang luas untuk membentuk representasi (model) sederhana dari teori. Pembuatan model merupakan bagian yang sangat penting dalam peramalan teoritik, karena analis jarang membuat peramalan teoritik secara langsung dari suatu teori. Jika analis memulai dari teori, mereka harus mengembangkan model dari teori itu sebelum mereka secara nyata meramal peristiwa masa depan. Pemodelan teori sangat penting karena biasanya teori ini sedemikian rumit, sehinggga perlu disederhanakan terlebih dahulu sebelum diterapkan terhadap masalah-masalah publik, dan karena proses analisis data untuk mengukur plausibilitas suatu teori mencakup perumusan dan pengujian model-modl teori, bukan dibuat dan diujinya teori itu sendiri.

- **PembuatanModelKausal**

  Adalah representasi teori secara sederhana yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik.

Asumsi dasarnya adalah bahwa kovariasi antara dua atau lebih variabel. Hubungan sebab akibat diungkapkan oleh hukum dan proporsi yang terkandumg di dalam suatu teori yang dimodelkan oleh analis.

3. Peramalan Pendapat / Peramalam Intuitif

a. Pengertian

Adalah teknik peramalan yang berusaha untuk memperoleh dan mensintesakan pendapat-pendapat para ahli, sering kali didasarkan pada pendapat atau argument dari perasaan, karena assumsi tentang daya kreasi seseorang dalam membuat peramalan digunakan sebagai pembenar pernyataan mengenai masa depan.

b. Kegunaan Peramalan Pendapat

Peramalan jenis ini sering digunakan dalam pemerintahan dan industri, terutama sesuai untuk jenis-jenis masalah yang pelik dan rumit. Karena salah satu sifat dari amsalah yang rumit adalah bahwa alternative kebijakan dan konsekuansi mereka tidak dapat diketahui maka dalam kondisi seperti itu tidak ada teori atau data empiric yang relevan untuk membuat ramalan, dalam hal ini teknik peramalan pendapat menjadi sangat bermanfaat dan bahkan sangat perlu.

Logika dari peramalan intuitif pada dasrnya bersifat retroduktif karena analis memulai dengan dugaan tentang suatu keadaan. (Misalnya masa depan normative seperti perdamaian dunia) dan kemudian berbalik ke data atau asumsi yang diperlukan untuk mendukung dugaan tersebut. Macam-macam Peramalan Pendapat antara lain

: teknik Delphi, analisi dampak silang, dan penaksiran kelayakan

H. Peramalan Kebijakan Di Bidang Pendidikan

Permasalahan pendidikan merupakan permasalahan bersama, yang harus ditangani secara bersama – sama pula oleh para stakeholder pendidikan. Seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa agar pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karenanya pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, bukan lantas bermakna bahwa pendidikan nasional adalah hanya milik pemerintah. Penerapan kebijakan system pendidikan nasional tidak boleh hanya berkiblat pada satu pusat "pemerintah saja".

Perjalanan pendidikan dimasa lalu cukup dijadikan sebagai batu pijakan bagi pemerintah serta seluruh warga Indonesia dalam merumuskan kebijakan. Seperti yang disinyalir dalam tajuk rencana media Indonesia yang menyatakan bahwa dalam negara demokrasi pemerintah masih tampak belum melibatkan suara guru dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan (Tilaar, 2005:2) Oleh karenanya, kebijakan yang berlaku hingga saat ini masih dalam kekalutan dan keterpurukan.

Toisuta menyatakan bahwa kekacauan manajemen pendidikan Indonesia disebabkan karena pemerintah tidak mempunyai suatu *platform pendidikan nasional*. Sehingga yang terjadi adalah adanya kebijakan yang tidak berkesinambungan. "ganti menteri ganti kebijakan" jargon yang sering diperdengarkan. Kebijakan silih berganti yang tidak berkesinambungan tersebut yang pada akhirnya menyebabkan evaluasi yang dilakukan tidak tuntas sehingga melahirkan kebijakan – kebijakan baru yang tidak mantap (Tilaar, 2005:2) Oleh karenanya, dalam pembuatan kebijakan pendidikan

tentunya para analis harus menggunakan peramalan kebijakan. Meramalkan tentang kejadian yang akan terjadi di masa depan merupakan faktor penting, karena sesuai dengan konsep peramalan ekstrapolatif bahwa kejadian-kejadian di masa lalu akan mempunyai kecenderungan dan siklus yang sama di masa yang akan datang.

Saat ini banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah kaitannya dengan pendidikan yang ada di indonesia ini mempunyai dampak yang luar biasa baik terhadap pengelola pendidikan maupun terhadap peserta didik. Misalnya kita dapat cermati pada kebijakan yang saat ini sedang mendapat sorotan dari masyarakat yaitu tentang kebijakan Ujian Akhir Nasional (UAN).

Ujian pada akhir satuan pendidikan secara nasional merupakan kegiatan rutin. UAN (Ujian Akhir Nasional) pada tahun 2008 menuai kritikan tajam dari berbagai kalangan. Kontroversi tentang UAN diawali oleh munculnya penolakan sekelompok masyarakat terhadap kebijakan kenaikan batas kelulusan dari 3,01 pada tahun 2003 menjadi 4,01 pada tahun 2004.kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 4,25 bahkan pada tahun 2008 ini naik menjadi 5, 25 dan munculnya tambahan 3 Mata Pelajaran untuk tingkat SMU yang tentu saja akan menambah deretan panjang penderitaan pada siswa.

Di antara mereka berpendapat bahwa UAN bertentangan dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 58 ayat 1 dan pasal 59 ayat 1). Sebagian berpendapat bahwa UAN berdampak negatif terhadap pembelajaran di sekolah, menghamburkan biaya, dan hanya mengukur aspek kognitif. Argumentasi lain adalah kondisi mutu sekolah yang sangat beragam sehingga tidak adil jika

harus diukur dengan menggunakan ukuran (standar) yang sama.

Salah satu isu yang mendapat perhatian banyak pihak adalah kekhawatiran tentang kemungkinan banyaknya siswa yang tidak lulus (tidak dapat mencapai batas minimal 5,05). Berbagai survei pra-UAN dilakukan di sejumlah daerah yang menunjukkan proporsi siswa yang tidak lulus, cukup besar.

Selain keadaan diatas UAN dengan standar kelulusannya sangat bertentangan dengan prinsip KBK yang lebih menekankan pada pembelajaran tuntas, sehingga kemampuan (kompetensi) siswa tidak hanya diukur dengan kognitifnya saja yang hanya merupakan beberapa lembar soal.

Pendapat yang mendukung agar UAN tetap dipertahankan antara lain didasarkan kepada argumentasi tentang pentingnya UAN sebagai pengendali mutu pendidikan secara nasional dan pendorong bagi pendidik, peserta didik, dan penyelenggara pendidikan untuk bekerja lebih keras guna meningkatkan mutu pendidikan (prestasi belajar).

Mereka berpendapat bahwa UU No. 20 tahun 2003 mengamanatkan perlunya evaluasi untuk mengendalikan mutu pendidikan secara nasional (pasal 57) dan untuk memantau tingkat ketercapaian standar nasional tentang kompetensi lulusan (pasal 35). Selain itu, mereka juga melihat perlunya ukuran (skala) baku nasional yang dapat digunakan untuk membandingkan posisi antara sekolah, kabupaten, dan antar provinsi, serta perbandingan antar waktu bagi suatu sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Sejumlah pengamat tidak terlalu mempersoalkan ada-tidaknya UAN. Mereka lebih memusatkan perhatiannya kepada sejumlah kelemahan dan kekurangan UAN, seperti mutu soal (termasuk mutu kertas dan cetakan) yang kurang memadai

di sejumlah lokasi, sosialisasi kebijakan yang tergesa-gesa, kurangnya balikan (*feedback*) ke sekolah berdasarkan hasil ujian, distribusi dana yang lambat, dan kekurangterbukaan di dalam pengelolaan (misalnya, tabel konversi).

Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan, antara lain, dengan menerapkan sistem ujian yang baik pada setiap akhir tahun pelajaran untuk kenaikan kelas dan pada akhir setiap satuan pendidikan. Ujian merupakan strategi yang umum digunakan oleh negara-negara berkembang dalam meningkatkan mutu pendidikannya karena merupakan cara yang efektif dan murah dalam memengaruhi apa yang diajarkan guru dan apa yang dipelajari peserta didik. Penggunaan tes dan ujian dalam dunia pendidikan, walaupun dengan misi dan tujuan yang beragam, terus berkembang di berbagai negara, termasuk di negara-negara Mediterranean and Anglo-Saxon.

Untuk memahami mengapa ujian yang dilaksanakan selama ini belum mampu mewujudkan fungsinya secara optimal dapat merujuk, antara lain, kepada temuan tim dari Bank Dunia yang menyatakan bahwa dua hal penting yang menentukan manfaat ujian bagi peningkatan mutu pendidikan adalah (a) mutu tes yang digunakan, dan (b) mutu balikan yang diberikan. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa prasyarat agar kedua faktor tersebut berfungsi dengan baik dalam meningkatkan prestasi akademik peserta didik adalah kesamaan persepsi guru, kepala sekolah, orang tua, dan siswa tentang pentingnya ujian dalam proses pendidikan.

I. Rekomendasi dan Aksi

Peramalan apapun bentuknya, memberikan informasi tentang perubahan di masa yang akan datang dalam kebijakan dan akibat-akibatnya. Jika peramalan dapat meningkatkan pemahaman, maka biasanya hal tersebut berhubungan dengan

control social. Peramalan dapat membentuk masa depan dengan cara yang aktif dan kreatif, daripada secara pasif menerima masa lalu sebagai penentu masa depan. Dalam membuat kebijakan seharusnya pemerintah juga memperhatikan dan meramalkan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi sebagai akibat dari diberlakukannnya kebijakan tersebut. Misalnya dengan adanya kebijakan terbaru mengenai UAN harusnya pemerintah tidak menutup diri dengan masukan dari suara masyarakat.

Dengan berbagai macam teknik peramalan tentang masa depan tentunya pemerintah setelah merumuskan kebijakan tersebut akan meramal kejadian apa sebagai akibat dari munculnya kebijakan tersebut. Namun seharusnya tidak menutup mata dengan reaksi dari masyarakat yang selama ini kurang didengar oleh pemerintah pusat. Terlepas dari adanya kepentingan dari berbagai pihak yang mendompleng kebijakan tersebut, tentunya setiap kebijakan yang diambil adalah untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kesejahteraan kelompok tertentu. Misalnya kebijakan UAN harusnya fungsinya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

UU No. 20 tahun 2003 mengamanatkan perlunya ujian untuk menentukan tingkat kemampuan (prestasi belajar) peserta didik pada akhir setiap satuan pendidikan. Selain menekankan perlunya evaluasi untuk mengendalikan mutu pendidikan secara nasional dan memantau ketercapaian standar nasional (termasuk kompetensi lulusan), UU No. 20 tahun 2003 juga memberikan peluang kepada pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi profesi untuk membentuk lembaga serta melakukan kegiatan evaluasi (di dalamnya dapat mencakup pengujian hasil belajar peserta didik). Berbagai kegiatan evaluasi dan ujian yang dimungkinkan

oleh UU tersebut perlu dipetakan dan dirancang ke dalam suatu sistem evaluasi dan ujian di dalam kegiatan pendidikan secara keseluruhan.

Sistem ujian yang diharapkan adalah suatu sistem yang mampu membantu penyelenggara pendidikan menegakkan akuntabilitas publik, memberikan balikan yang bermanfaat kepada sistem pendidikan untuk meningkatkan mutu kinerja dan efektivitasnya, serta mampu mengendalikan dan mendorong terjadinya peningkatan mutu pendidikan (sekurang-kurangnya prestasi akademik peserta didik). Studi yang dilakukan oleh tim dari Bank Dunia memberikan pelajaran bahwa sistem apa pun yang dihasilkan hanya akan efektif jika didukung oleh kesamaan persepsi dan komitmen dari pihak-pihak yang terkait untuk mengimplementasikan sistem itu secara konsekuen.

BAB IV

PERAN DAN FUNGSI ADMINISTRASI PADA PERENCANAAN PENDIDIKAN

A. Makna Administrasi (Tinjauan Umum)

Administrasi sebagai suatu kegiatan bersama terdapat dimana-mana selama ada manusia yang hidup dan bekerja sama dalam kelompok. Jika ada kegiatan sekelompok orang secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu sebagai tujuan bersama, disitu ada administrasi. Secara teoritis, pengertian administrasi adalah melayani secara intensif sedangkan secara etimologis, administrasi dalam bahasa inggris " administer", yaitu kombinasi dari kata latin yang terdiri ad dan ministrare, yang berarti "to serve" melayani , membantu, dan memenuhi. Lebih jelas lagi, kata ad artinya intensif, sedangkan ministrare berbentuk kata benda yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan.Jadi, secara etimologis, administrasi adalah melayani secara intensif.

Administrasi di Indonesia dikenal dengan istilah administrate yang berasal dari bahasa Belanda, namun pengertiannya lebih sempit sebab hanya terbatas pada aktivitas ketatausahaan, yaitu kegiatan penyusunan keterangan secara sistematis dan pencatatan secara tertulis semua keterangan yang diperoleh dan diperlukan mengenai hubungannya satu sama lain.

Administrasi dalam arti luas menurut Albert Lepawsky mencakup organisasi dan manajemen. Hal ini sejalan dengan

pendapat William H.Newman yang mengatakan bahwa administrasi dapat dipahamki sebagai pembimbingan , kepemimpinan dan pengawasan usaha-usaha kelompok orang ke arah pencapaian tujuan bersama.

Slamet Wijadi Atmosudarso mengemukakan bahwa pengertian administrasi administrasi dapat ditinjau dari sudut:

1. Institusional , yaitu administrasi adalah keseluruhan orang atau kelompok orang sebagai suatu kesatuan menjalankan proses kegiatan untuk mencapai tujuan berama.
2. Fungsional, yaitu segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan termasuk tindakan untuk menentukan tujuan ilmu. Tindakan tersebut bersifat melihat kedepan.
3. Aministrasi sebagai proses, yaitu keseluruhan proses yang berupa kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, pengaturan-prngaturan sejak dari penentuan tujuan sampai penyelenggaran sehingga tercapai tujuan tujuan tersebut.

Sedangkan administrasi yang dipaparkan oleh Luther Gulick, ahli Publik Administration Amerika ia mengemukakan addministrasi beralian dengan pelaksaan kerja, dengan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan , sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bhwa ada tujuh jenis kegiatan administrasi yang juga menjadi fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting).

1. **Kegiatan manusia yang disebut administrasi mengandung tiga faktor:**

a. Tujuan tertentu sebagai tujuan organisasi maupun tujuan antara dari setiap kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Aktivitas atau proses kegiatan manusia sebagai gejala sosial berlangsung dalam interaksi antar sejumlah manusia yang diuraikan dalam setiap unit kerja, yaitu usaha untuk mencapai tujuan tersebut yang dilakukan secara teratur, terorganisasi dan sistematis.

c. Rangkaian itu berupa usaha kerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau achievement of goal, yaitu tercapainya tujuan melalui pembagian tugas dalam satu kesatuan kerja dengan melakukan pengawasan terhadap mutu yang diharapkan.

Konsep administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan yang berkaitan dengan system,asas, prosedur dan teknik kerja sama dengan setepat-tepatnya. Proses adalah serangkain perbuatan manusia yang mengandung maksud tertentu yang memang dikehendaki oleh yang melakukan kegiatan itu, Perbuatan adalah suatu kegiatan manusia yang mengandung maksud tertentu. Jadi perbuatan dilihat dari segi aktifnya, sedangkan kejadian dilihat dari segi pasifnya.

Konsep administrasi jika diimplementasikan pada kegiatan perancanaan pendidikan menjadikan administrasi sebagai suatu proses system perilaku. Hal ini mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, terjadilah suatu proses interaksi manusia dalam system yang terarah dan terkoordinasi dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Karena itu, administrasi pendidikan merupakan serangkain kegiatan atau proses yang berurutan dan beraturan menggunakan prinsip-prinsip

administrasi. Kegiatan administrasi pendidikan dalam rangka memanfaatkan semua potensi atau sumber daya yang tersedia, untuk mencapai tujuan, yaitu kebutuhan yang diperjuangkan agar terpenuhi secara efektif dan efisien. Kegiatan atau aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya ataupun pelaksanaannya disebut fungsi. Aktfitas-aktifitas tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan dan diserahkan menjadi tanggung jawab seseorang yang bertanggungjawab terhadap satuan organisasi tertentu.

B. Peran Administrasi Secara Praktis

Peran nyata administrasi terhadap perencanaan pendidikan dapat dilihat dari fungsinya. Hal ini merupakan sifat dasar kegiatan administrasi yang memiliki fungsi pokok, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengordinasian, pembiayaan, dan pengawasan dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia adalah penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

1. Fungsi perencanaan pada perencanaan pendidikan

Fungsi administrasi pertama ini tampaknya sejalan dengan perencanaan pendidikan, yaitu meliputi kegiatan menetapkan kegiatan yang ingin dicapai, cara mencapainya, waktu yang dibutuhkan, jumlah orang yang diperlukan, dan besarnya biaya.Perencanaan pendidikan adalah awal dan proses-proses rasional, dan mengandung sifat optmisme yang didasarkan atasa kepercayaan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan. Perencanaan merupakan proses penetapan dan pemanfaatan sumber-sember daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang berbagai kegiatan dan upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan.

Perencanaan adalah sasaran untuk bergerak dari keadaan masa kini ke keadaan masa yang akan dating sebagai suatu proses yang menggambarkan kerja sama untuk mengembangkan upaya peningkatan organisasi secara menyeluruh. Ruang lingkup perencanaan meliputi komponen administrsi pendidikan dalam kurikulum, pembelajaran,supervisi, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana, kepegawaian, layanan khusus, hubungan masyarakat, fasilitas proses belajar mengajar dan ketatausahaan sekolah.selanjut nya, untuk membangun kerja sama yang baik dan membuat perencanaan pendidikan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat di perlukan personel perencana yang berpengalaman dan berpengetahuan dalam bidang perencanaan pendidikan agar dapat menentukan dengan tepat apa yang harus dikerjakan. Fungsi perencanaan ini akan menghasilakan program-program yang luwes dan berpusat pada keberhasilan belajar siswa, yang mencakup program pembelajaran , pengajaran , pengembanagan kurikuler, elaborasi kurikulum menjadi bahan pengajaran, kegiatan siswa, keuangan sekolah, gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan humas.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi perencanaan dalam administrasi sangat vital dan sejalan dengan perencanaan pendidikan , yaitu suatu proses menentukan sasaran, alat, metode, tuntutan, taksiran, pos tujuan, pedoman, dan kesepakatan (commitment) yang menghasilkan program pendidikan yang terus berkembang.

2. Fungsi pengorganisasian pada perencanaan pendidikan

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerja sama pendidikan. Kegiatan pengorganisasian adalah menetukan

oranrg-orang yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian dan proporsional.

Fungsi pengorganisasian dalam perencanan pendidikan dapat terlihat sebagai keseluruhan proses untuk memilih orang-orang serta mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas dalam organisasi. Pengorganisasian juga dimaksudan mengatur mekanisme kerja organisasi.

Pendapat Koontz menggambarkan 4 syarat yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian, yaitu legitimasi (legitimacy), efisiensi (efficiency), keefektifan (effectiveness), dan keunggulan (excelence). Legitimasi sekolah memberikan respons dan tuntutan eksternal, yaitu sekolah mampu menampilkan performansi organisasi yang dapat meyakinkan pihak-pihak terkait akan kemampuan sekolah mecapai tujuan melakukan tindakan melalaui sasaran. Efisiensi dalam pengorganisasian pengakuan terhadap sekolah pada penggunaan waktu ,uang ,dan sumber daya sekolah. Ke efektifan dalam pengorganisasian sekolah menggambarkan ketepatan pembagian tugas, hak, tanggung jawab, hubungan kerja bagian-bagian organisasi, dan menentukan personel (guru dan non guru) melaksanakan tugas nya. Adapun keunggulan dalam pengorganisasian menggambarkan kemam puan organisasi dan kepala sekolah untuk melaksanakan fungsidan tugas nya sehingga dapat meningkat kan kualitas sekolah.

Secara terperinci Quiqley menjelaskan bahwa Joseph V. Mengemukakan lima kesuksesan organisasi, yaitu:

a. Kualitas (quality), yaitu organisasi memberikan kualitas pelayanan yang tertinggi kepada pelanggan (costomers) untuk menjamin kepuasan pelanggan.

b. Pertumbuhan (growth), yaitu menjamin ada nya pertumbuhan jangka panjang dan pertumbuhan pasar secara kompetitif.
c. Orang-orang (people), yaitu menjamin bahwa pemerintah dan saluran pendidikan mempunyai orang-orang yang di perlukan untuk mengemban misi.
d. Tingkah laku etis (ethical conduct), yaitu mengatur bisnis organisasi dalam tindakan yang konsisten yang mengacu pada kualiatas pendidikan sebagai standar pertumbuhan utama dari organisasi dam memaksimalisasi nilai-nilai pencapaian misi.
e. Keuanagan (financial),yaitu kemampuan memelihara dan mengelola keuanagan atau anggran secara konsisten sebagai factor utama pertumbuhan organisasi dan memaksimal kan nilai para pemakai nya.

Prinsip lainnya adalah:

a. Adanya kesatuan arah dari berbagai bagian organisasi, yaitu arah yang konsisten terhadap visi dan misi
b. Adanya kesatuan pemerintah atau kesatuan komando sehinnga tidak kehilanagan arah.
c. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas nya.
d. Adanya pembagian tugas yang jelas dan tegas.
e. Struktur organisasi yang di susun sesederhana mungkin.
f. Pola organisasi relative permanen
g. Adanya jaminan terhadap jabatan-jabatan dalam organisasi
h. Adanya balas jasa setimpal kepada setiap anggota organisasi
i. Penempatan orang yang bekerja dalam organisasi sesuai dengan kemampuannya

C. Organisasi

1. Konsep organisasi

Studi organisasi, perilaku organisasi, dan teori organisasi merupakan istilah yang saling berkaitan dalam studi ilmiah mengenai organisasi, dengan memanfaatkan metode dalam ilmu ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Studi- studi organisasi adalah studi terhadap dinamika individu dan kelompok dalam sebuah lingkungan organisasi, termasuk sifat organisasi. Seperti lmu sosial lainnya, studi organisasi berusaha mengontrol, meramalkan, dan menjelas kan perilaku dalam organisasi. Dalam organisasi di perlukan manusia karena manusia adalah pendukung utama setiap organisasi, apa pun bentuk organisasi tersebut. Karena setiap perilaku manusia yang berada dalam suatu kelompok atau organisasi adalah awal dari perilaku manusia. Perilaku organisasi menjadi penting dalam ekonomi global mengingat keragaman asal-usul kebudayaan dan nilai dari para pekerja yang di tuntut untuk secara besama-sama bekerja secara efektif dan efisien.

Beberapa asumsi utama yang melandasi studi organisasi adalah sebagai berikut:

a. Manusia adalah pelaku yang rasional. Orang normal bertindak dengan cara rasional. Pada, umum nya, ia memiliki akses terhadap semua informasi yang di butuh kan untuk membuat keputusan yang sedapat mungkin rasional.
b. Data yang teruji menurut logika formal atau empiris. Kita harus memahami komunikasi dalam organisasi sebagai (a) perilaku yang dapat di amati dan dapat di ulangi, sehingga dapat ditransformasikan ke dalam variabel-variabel dengan

beberapabentuk pengukuran, dan (b) silogisme yang dapat direflikasikan secara formal dapat memperluas teori dan data pengamatan kepada kelompok atau lingkungan lain.

c. Komunikasi merupakan sebuah proses mekanis, yaitu pesan dikirimkan oleh pengirim, di sampaikan melalui beberapa saluran, dan di terima oleh penerima pesan

d. Organisai merupakan sesuatu yang bersifat mekanis, yang bagian bagiannya (termasuk fungsi pegawai dalam batasan peran mereka) dapat bertukar posisi satu sama lain. Apa yang bekerja pada suatu organisasi akan bekerja pula pada organisasi lainnya yang sama. Perbedaan individual dapat di minimalkan atau bahkan di hilangkan dengan teknik manajemen yang hati-hati.

e. Fungsi-fungsi organisasi merupakan wadah bagi keberlangsungan komunikasi. Setiap perbedaan dalam bentuk atau fungsi komunikasi antara yang terjadi dalam organisasi dan dalam lingkungan lain dapat diidentifikasi dan di pelajari sebagai factor-faktor yang memengaruhi kegiatan komunikasi.

Dewasa ini, bidang studi organisasi telah bergeser dari penerimaan atas model mekanistik (misalnya, informasi berpindah dari pengirim ke penerima) menuju studi atas cara-cara yang menetap, hegemonis, dan di terima apa ada nya sehingga kita tidak hanya menggunakan komunikasi untuk menyelesaikan persoalan dalam konteks organisasi (misal nya pidato), tetapi juga berupaya agar oganisasi tempat kita berpartisipasi memengaruhi kita. Pendekata – pendekatan ini mencakup pendekatan postmodern, critical, participatory, feminist, power / political, organic, dan sebagainya dan bersumber dari berbagai disiplin, seperti sosiologi, filsafat, psikologi.

Bidang studi organisasi pun meluas hingga mencakup studi -studi terhadap gejala seperti berikut:

1. Konstitusi, misalnya:
   - Perilaku komunikatif membentuk atau mengubah proses atau hasil pengorganisasian
   - Organisasi tempat kiat berinteraksi memengaruhi perilaku komunikasi kita
   - Struktur selain organisasi yang dapat di bangun melalui kegitan komunikasi kita (seperti pasar, koperasi, suku, partai politik, gerakan sosial)
2. Naratif, misalnya
   - Anggota kelompok menggunakan menggunakan narasi mengiidoktrinasi anggota baru.
   - sejarah keorganisasian terjadi pada tahap-tahap perbedaan narasi mempermudah pencapaian tujuan tertentu, pesan khusus dari "periwayat keorganisasian". Jika demikian, apakah kisah yang di riwayatkan pembawa cerita di terima secara berbeda daripada kisah yang di riwayat kan oleh yang lain dalam suatu organisasi.
3. Identitas misalnya,
   - Cara kita mengidentifikasi diri sendiri berdasarkan alifiasi keorganisasian kita
   - Perilaku atau peristiwa komunikasi dalam atau beberapa organisasi yang kta ikuti memengaruhi kita
   - Orang yang membatasi dirinya berdasarkan keanggotaan dalam organisasi kerja melakukan komunikasi berbeda dibandingkan dengan orang yang

yang mendefinisikan dirinya berdasarkan keanggotaan dalam organisasi lainnya.

4. Kesalingterkaitan dari pengalaman organisasi misalnya:
   - Hubungan komunikasi dalam suatu organisasi akan memengaruhi tindakan komunikasi kita dalam organisasi lain.
   - Pengalaman fenomenologis dari para pelaku komunikasi dalam lingkungan komunikasi memengaruhi perubahan bidang kehidupan lain mereka.
   - Status keorganisasian seorang anggota mengalami perubahan signifikan (misalnya, melalui promosi atau pemindahan) bagaimana keaggotaan dalam organisasi lain berpengaruh.
5. Kekuasaan misalnya:
   - Bagaimana penggunaan praktik komunikasi tertentu dalam sebuah lingkunganorganisasi memaksa atau mengubah berbagai hubungan kekuasaan yang saling terkait dalam dalam sebuah organisasi.
   - Apakah pelaksanaan pekerjaan yang secara keorganisasian harus diterima apa adanya dilakukan untuk menguatkan narasi dominan yang bersifat hegemonis ? individu menghambat /menentang praktik-praktik ini melalui tindakan-tindakan lansung atau agen-agen tertentu, dan dampaknya.
   - Apakah perubahan status dalam sebuah organisai (misalnya, promosi, pemutusan hubungan kerja, restrukturisasi, perubahan anggran) merubah perilaku komunikasi ? kriteria-kriteria yang di tetapkan oleh anggota organisasi untuk membedakan antar yang

"sah" dari yang "tidak sah" mengenai pelaksanaa organisasi.

2. Teori Organisasi

a. Pendekatan sistem informasi.

Weick menggunaka sistim umum untuk menjelaskan teori sistim umum untuk menjelaskan hubungan antar individu pada suatu organisai. Organisai Menggunakan proses pembentukan, pemilihan, dan pemeliharaan. Orang yang bekerja dalam suatu sistim yang memiliki ikata longgar akan memanfaatkan interaksi ganda dalam mengurangi ketidakjelasan dan memudahkan komunikasi yang mereka terima dari yang lain dalam mencapai tujuan. Sekalipun pendekatan teri informasi menggunakan sebuah model yang tampak matematis, ia merupakan sebuah teori humanistic. Ia menggambarkan berbagai kecenderungan intrepreratif dalam usahanya menggunakan interaksi ganda sat individu-individu berkomunikasi dalam suatu organisasi. Model interaksi ganda melibatkan sebuah tindakan, respon, dan penyesuaian di antar dua orang. Hal ini terjadi antara, individudalam suatu organisasi, yang membantu dalam cara menggambarkan cara orang dalam organisasi menciptakan realita yang baik.

b. Sosialisai/Asimilasi dalam Organisasi

Teori asimilasi organisas berusaha menjelaskan cara individu baru dalam suatu organisasi (pendatan baru) berasimilasi dalam organisasi dengan menggunakan organisasi. Seperti teori-teori yang di dasarkan pada teori sistim, teori asimilasi organisai berakar kuat pada dua sisi yang terpisah yaitu, teori alamiah dan teori humanistic.

c. Pendekatan Budaya dalam Organisasi

Geertz dan Pacanowsky menggambarkan organisasi sebagai sesuatu yang memilki kebudayaan tersendiri. Ini berarti bahwa setiap organisasi mempunyai kebudayaan khas yang member landasan makna bagi setiap anggota dalam memahami segala sesuatu. Kebudayaan di pelajari melalui penggunaan riwayat (metafora) yang di pakai untuk menggungkapkan pesan mengenai keinginan perusahaan dan berbagi dengan par pekerja. Ada tiga jenis riwayat yang di ceritakan, yaitu (1) riwayat perusahaan, informasi yang di harapkan jajaran manajemen dipahami oleh semua pekerja, (2) riwayat pribadi, yang mencakup pertimbangan pribadi mengenai diri mereka yang di anut semua pekerja dan saling membantu dalam mendefinisikan satu sama lain dalam organisasi, dan (3), riwayat rekanan, yaitu cerita (positive dan negative) yang di ceritakan pegawai satu sama lain.

d. Critical Approach to Organizations

Berasal dari pandangan bahwa manusia memiliki kehendak bebas, teori kritis menekankan pada kejelsan hakikat hubungan timbale balik dan hubungan timbal balik dan hubungan manajemen dengan orang lainnya. Jika banyak organisasi mengambil pendekatan kritis akan terjadi kesamaan dalam kepuasan kerja yang lebih puas. Tujuannya adalah menjadikan tempat kerja lebih kohesif, dan mengembangkan kesamaan paham tentang tjuan organisasi. Berbeda dengan birokrasi tradisional, organisasi harus mencari dan mengembangkan hubungan dengan individu- individu yang benar-benar melakukan pekerjaan.

3. Struktur Organisasi yang dapat di Aplikasikan Pada Perencanaan Pendidikan

Organisasi berorientasi pada tujuan dan maksud tertentu. Ini berarti bahwa struktur organisasi berorientasi pada maksud dan tujuan tertentu. R.McDaniel (dalam Gibson et.all., 1997 :104) konsep kita atas struktur organisasi akan memerhatikan keberadaan maksud dan tujuan tersebut. Struktur organisasi yang akan di bentuk tentunya struktur organisasi yang baik. Sruktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat sehat dan efisien. Sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi dapat menjalankan peranannya dengan tertib, sedangkan efisien berarti dalam menjalankan peranan tersebut, masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerja.

Desain Organisasi yang Diterapkan pada Perencanaan Pendidikan Hugh C. Willmott dalam Gibson et.all.(alih bahasa Nunuk Adiarni,1997:106) mengatakan "manajer yang bermaksud mendesain struktur organisasi menghadapi keputusan yang sulit. Mereka harus memiliki di antara sekian banyak kerangka alternative pekerjaan dan departemen. Para manager bertugas untuk menyeimbangkan tekanan eksternal yang datang dari luar organisasi, dan tekanan internal yang datang dari dalam, misalnya, teknologi yang akan digunakan dalam organisasi tersebut. Penting nya desain organisasi mempunyai implikasi penting pada manfaat kompetitif sebuah perusahaan, kemampuan untuk bertransaksi dengan berbagai kemungkinan dan mengtur perbedaan, efisiensi, kemampuan untuk meningkatkan barang-barang baru dan pelayanan, control terhadap lingkungan, koordinasi dan motivasi para pekerja, serta strategi pengembangan dan implementasi. Desain organisasi memberikan manfaat, baik pada dirinya maupun

pada aspek lain. Berbagai sumber manfaat kompetitif, seperti skill di dalam penelitian dan perkembangan yang menghasilkan bentuk bentuk produk baru atau teknologi seni dalam suatu Negara, dengan cepat menghilang karena secara relative para competitor mudah meniru.

D. Proses Perencanaan Umum dan Agama

1. Proses Perencanaan Umum Menurut Bintoro Tjokroamidjojo mengemukakan tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana

Yang terdiri atas unsur-unsur:

- Tinjauan keadaan
- Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana atau (forescasting)
- Penetapan tujuan rencana
- Identifikasi kebijakan
- Persetujuan rencana

b. Penyusunan program rencana

Melakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah pembiayaan.

c. Pelaksanaan rencana

Kebijakan harus diikuti implikasi [elaksanaan nya bahkan secara terus-menerus memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rencana

Tujuan pengawasan adalah:

- Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang telah ditetapkan.
- Apabila terdapat penyimpangan, perlu diketahui penyebab penyimpangan tersebut.
- Dilakukannya tindaka kolektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan itu.

e. Evaluasi kegiatan pengawasan

Evaluasi ini dilakukan untuk memperbaiki perencanaan selanjutnya atau penyesuaian yang diperlukan dalam pelaksanaan perencanaan itu sendiri.

2. Perencanaan pendidikan islam

a. Tinjauan umum

Secara singkat program pendidikan islam perlu berorientasi pada hubungan 3 arah yaitu :

- Tuhan pencipta alam semesta.
- Sesama manusia
- Manusia dengan alam sekitar dan dirinya sendiri.

Orientasi hubungan dengan alam sekitar dan dirinya sendiri menjadi dasar pengembangan iptek, orientasu hubungan dengan tuhan menjadi dasar oengembangan sikap dan moralitas yang menjwai pengembangan iptek, dan orientasi hubungan sesama manusia menjad dasar peengembangan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas kesinambungan, keserasian, dan keselarasan dengan nilai-nilai moralitas yang menentramkan jiwa.

b. Tinjauan Teoritis Atau Praktis

Terma-terma pendidikan dalam islam:

- **‘abada**

  Kata kerja ‘abada yang berakar dari huruf-huruf ‘ain,ba’. Dan dal bermakna “kelemahan dan kehinaan, kekerasandan kekesaran ‘. Makna ‘abada berarti mamluk (yang dimiliki) dan mempunyai bentuk jamak ‘abid yang berarti budak-budak, dan ibad yang berarti hamba-hamba tuhan. Terma ini terkait dengan pendidikan. Keterkaitan itu bisa dilihat dari aspek tujuan, materi, metode, pendidik, dan anak didik.

  Dari aspek tujuan dapat dilihat pada surat yunus (10) ayat 104, surat hud (11) ayat 2.dari aspek materi terdapat dalam surat al-kafirun ayat 1-6, surat yasin ayat 60. Dari aspek metode surat maryam ayat 42 , al-baqarah ayat 133. Dari aspek pendidikan dan anak didik. Surat yunus ayat 104.

- **Nazhara**

  Kata nazhara mmpunyai arti yaitu memperhatikan suatu proses tafakkur melalui akal. Keterkaitan terma ini dengan pendidikan biasa dilihat dari aspek metode dan aspek materi. Dari aspek metode terma ini secara langsung menggunakn penglihatan atua observasi, dari aspek materi terma ini bersamaan dengan terma yang berkonotasi kebendaan atau materi.

- **‘Alima**

  Yaitu mengetahiu hakikat sesuatu. Pengetahuan ini ada yang bersifat teori atau (nazhari) atau praktis (‘amali).pengetahuan praktis adalah pengetahun yang harus disertai dengan pelaksanaannya, contoh pengetahuan tentang ibadah. Adapun teori adalah pengetahuan yang tidak harus disertai dengan tindakan

seperti pengetahuan tentang adanya alam semesta ini. Terma ini sangan berkaitan dengan pendidikan yang berkenaan dengan aspek materi , metode guru, dan anak didik.Ayat yang berhubungan dengan terma ini adalah surat al-baqarah ayat 31, 251.

- **Ra'a**

  Terma ini berasal dari kata ra, hamzah dan ya yang menunjukkan nazharin wa, ibsharin, bi'ainin (memandang, memikirkan, dan melihat dengan jelas).Ayat yang bearhubungan dengan aspek ini surat al-an'am ayat 75, surat yusuf ayat 24.

- **Rabba**

  Mempunyai arti pokok, yaitu memperbaiki dan memelihara sesuatu, melazimi sesuatu dan tegak diatasnya,dan menghimpun sesuatu pada sesuatu yang lain.Terma yang berhubungan dengan surat al; baqarah ayat 276.

- **Khallaka**

  Kata khalaka bermakna 'menciptakan ' mengandung arti dasar "meliihat bentuk fisik dan sikis". Hal itu dipahami dari struktur dasar kata tersebut (kh_l_q) ya ng bermakna etemologis" member ukuran",dan dipergunakan dalam urusan fisik berkejiwaan atau akhlak . ayat yang terkait dalam aspek materi pendidikan antara lain surat al- vaqarah(2):29, an-nisa'(4):1

- **Faqara**

  Terma ini berarti kekuatan yang mampu merenungkan pengetahuan menjadi pasti. Ayat ayat yang memuat terma ini yang terkait dengan aspek tujuan

adalah surat albaqarah(2)ayat219,ali imran (3)ayat 9 dan yunus(10)ayat24.

- **'bara**

  Mempunyai arti berpindah dari suatu keadan kepada keadaan yang lain . adapun ibarah bermakna perkataan yang keluar dari lidah seorang pembicara.

- **'aqila**

  Berasal dari kata'ain ,khaf, dan lam bermakna ' uzhmuhu'ala hubsahfi al sya dari katainial'aqla dari kata ini al-aql mempunyai arti kebalikan dari bodoh. atat yang berhubungan dngan surat al- qasas(28):ayat 60.

- **Matshala**

  Matshala mempunyai arti kemiripan terhadap sesuatu atau suatu ungkap perkatan menyerupakan sesuatu dengan sesuatu dengan keserupaan yang lain.

- **Nashaha**

  Terma ini terdiri atas nun, shad, dan ha yang berarti diantara dua sesuatu dan memperbaikinya . dari kata ini, an- nashu berate perkataan yang berisi perbaikan ter hadap teman

- **Ba'atsa**

  Mempunyai banyak diantara nya menghidupkan yang mati dan membangunkan yang tidur . sebagian ayat termaini , terkait dengan aspek materi, pendidiakn, sirat al-maidah (5):31 ' an –nahl(16) ayat36

- **Nashara**

  Mempunyai arti mmbuka sesuatu terdapat dalam surat ar-rum(30):20,asy su'ara(42):28

- **Nashala**

  Mempunyai arti turun dan jatuh nya sesuatu .air hujan yang jatuh kebumi disebut nuzulan.an-zul berararti jatuh daru ketinggian.banyak sekali ayat yang memuat terma ini diantara nya yaitu an-nahl(16) ayat 65.

- **Waqha**

  Yaitu memelihara atau melindunggi. Ayat yang memuat terma ini yaiyu surat at- tur(52)ayat27

- **Qa'a**

  Berasal dari huruf al-qhaf ,ar- rha , dan huruf mu'tal mempunyai arti kumpulan dan himpunan

- **Washa**

  Terma ini berati meyampaikan sesuatu dengan sesuatu. Ayat yang memuat termaini dan terkait dengan aspek tujuan ,materi, metode , anak didik , pendidik adalah al- baqarah(2);133lukman(31)ayat 14.

- **Basyhra**

  Berati melihat dan mengetahui.tedapat dalm surat as-asyariat (51)ayat21 dan al a'araf (7):179

- **Tala**

  Berarti to *follow*" mengikuti". Ayat yang berhubungan dengan terma ini adalah surat al-baqarah (2) ayat151.

- **Sami'a**

  Terma ini berari mendngar, ada yang terkait dengan aspek tujuan, materi metode,pendidik, dan anak didik adalahsurat yunus (10)ayat 31dan 67

- **Shana'a**

  Terma ini berarti membuat, membungkus, dan menyusun,. Diantara ayat yang berhubungan dengan terma pndidikan ini adalah surathud(11) ayat 37-38

- **Basyara**

  Mempunyai arti bergembira, mengembirakan dan mengeluti(misalnya buah).ayat yang berhubungan dngan terma pendidikan ini adalahsurat ali imran(3) ayat 25 dan surat an-nisa' ayat 138

3. Unsur – unsur pendidikan agama dalam al-Quran.

a. Tujuan pendidikan

Tujuan pokok pendidikan dalam al Quran adalah anak didik hanya menyembah kepada allah bukan menyembah selain allah.sebagai mana dalm surat al- isra'(17) ayat 2 Selain itu tujuan pendidikan adalah anak didik menjadi orng yang bertakwa.Agama Islam memerlukan penghayatan juga memerlukan pmikiran ayat yang menyerukan untuk menggunakan pemikiran adalah surat al –an' am(6)ayat 50.

Seorang yang benar benar menghayati ajaran agama islam akan menghasilkan merefleksasikan ajaran islam dan perilaku sehari hari.kehidupannya selalu berada didalambimbingan allah. Dia dituntut untuk mendapatkan bahagiaan dunia dan akhirat.

Untuk mendapatkan kesalamatan hidup didunia seorang harus melengkapidiri dengan sarana yang diperlukan dalam kehidupan.

- **Materi pendidikan.**
  - Tauhid/ beriman kepada allah.

Materi pendidikan pertama yang diajarkan kepada anak didik menurut al-qo=uran adalah mengesakan allah. Pengesaan allah memiliki dalam kehidupan.orang yang mengesakan allah hanya menyembah kepada allah. Dia dilarang menyembah yanglain selain atau menyekutukan –Nya.

- Ibadah

  Dalam syariat islam dikenal ibadah mahdhah dan ibadah secara luas.

- Akhlak

  Al-quran yang menceritakan tentang akhlak adalah surat an- nur ayat 51.

- Ilmu pengetahuan dan teknologi

  Alquran pun menggambarkan laut, darat srta transpormasidaratlaut, hujan, angin, awan, dan makhluk penghuni galaksi.

Metode pendidikan agama

Pada surat al- balad ayat 17 memberi isarat bahwa memberikan pelajaran dilakukan dengan memberikan nasehat. Dam masih banyak lagi cara –cara member pelajaran menurut al- quran.

Guru dan anak didik

Guru dan murid sama-sama orang yang memiliki pengetahuan agama hanya dalam situasi tertentu sang guru memiliki pengetahuan yang lebih dari murid.

b. Aplikasi perencanaan pendidikan pada pendidikan agama.

Perencanaan pendidikan agama pada tingkat konsep.

Upaya menumbuhkan potensi kemanusiaan utuk melahirkan manusia beriman dann berilmudan berfikir, dan mampu ber buat baik dalam berhubungan denengan alam dan social, dalam kerangka ibadah kepada allah sebagai satu-satunya yang harus disembuhkan.

- **Perencanaan pada tujuan pendidikan agama.**
  - Tujuan umum.

    Berdasarkan yang didapatkan tujuan umum pendidikan dalam al-quran adalah membentuk pribadi yang ‘ sempurna ‘ sebagai hamba allah SWT, yakni beriman hanya kepada allah SWT, mnyembah dan bertaqwa kepadaNya, berilmu dan berakhlak mulia dan selalu melahirkan amal sholeh.
  - Tujuan antara

    Tujuan – tujuan tersebut adalah:
    - Memepercayai dan mengenal allah SWT (aspek beriman)
    - Selalu menetapi jalan allah SWT (aspek bersyariat)
    - Dapat membaca dan berfikir untuk memperoleh pengetahuan (aspek pengetahuan)
    - Berperilaku yang terpuji (aspek berakhlak)
    - Mempunyai keterampilan untuk mempertahankan hidup dan mencapai kemajuan (aspek keterampilan)

- Peduli pada orang lain dan mau berbuat baik (aspek social)
- Mampu mengendalikan diri (aspek penyesuaian diri)

Perencanaan Pendidikan Agama pada Tingkat Materi

Materi pendidikan agama secara umum adalah tentang bahan – bahan atau keterampilan dan tingkah laku yang dilatihkan kepada anak melalui prrooses proses pendidikan untuk mencapai tujuan. Kumpulan matei dalam suatu struktur yang sistematis disebut kurikulum.

Ada 4 materi pokok pendidikan dalam al-quran:

- tauhid / iman kepaa allah.
- ibadah mahdhah dan gairu mahdhah.
- akhlak.
- ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semua bidang akan selalu meniti proses pemikiran dan perbuatan dalam rangka untuk menauhidkan Allah serta perwujudan dan pengabdian kepadanya. swmua ilmu dan keterampilan manusia bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk keselamatan dan kesejahteraan umat manusia.

Penerapan Perencanaan pada Tingkat Metode

Metode adalah cara dalam melakukan proses pendidikan (pengetahuan).Banyak metode yang dipakai oleh Al- Quran, diantaranya yaitu:

- Metode Nasihat (ceramah)

Nasihat artinya menyampaikan suatu informasi yang bermanfaat bagi lawan berbicara. istilah yang sering dipakai untuk kegiatan seperti itu kadang-kadang disebut bayan (penjelasan), dakwah (menyeru), bisa juga batsyiran wa nadziran memberi kabar gembira dan peringatan dengan tujuan agar orang yang mendengar selalu berada di jalan Allah.

- Metode eksperimen (percobaan).

  Adalah suatu metode dalam proses belajar mengajar dengan car menugaskan murid melakukan percobaan atau mengerjakan sesuatu dan menncermati proses serta hasilnya.Jadi, penggunaan metode eksperimen dalam islam memang harus dilaksakan dengan hati- hati .

- Metode karyawisata dan pengamatan.

  Adalah mengajar dengan membawa murid meninggalkan sekolah menuju suatu objek untuk mempelajari suatu bahan yang berhubungan dengan kurikulum. Hal yang sangat mendasar menurut petunjuk ayat al-quran adalah agar dengan memperhatikan objek-objek karyawisata itu, disamping anak mendapat pelajaran yang berguna ia juga dapat memahami kekuasaan tuhan .

- Metode dialog (tanya jawab, diskusi)

  Metode dialog banyak dicontohkan dalam al-quran, seperti dalam surat al-baqarah ayat 30, malaikat bertanya, "apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang akan membuat

kerusakan dimuka bumi ? pertanyaan ini merupakan respon malaikat atas pemberitahuan Allah tentang akan diciptakannya khalifah di muka bumi ini.

- Metode perumpamaan (metamora)

  Fungsi dari metode ini adalah agar manusia (anak) mempunyai keterbatasan untuk menangkap konsep yang abstrak (verbal), sehingga perlu dilakukan dengan pendekatan kemampuan konkret (metafora).

- Metode cerita (kisah)

  Dalam al-quran banyak ditemukan cerita masyarakat tertentu,bahkan peristiwa yang menakjubkan.bagaimana al-quran bercerita tentang Dzul Qarnain, kisah nabi yusuf as, Firaun, dll.Seperti firman allah dalam surat Al-A'raf (7) ayat 176 .

  Dengan demikian kembali kepada relevansi metode cerita dengan situasi pendidikan sekolah, dapat dikatakan bahwa dalam pendidikan islam,metode ini cukup mempunyai kekuatan untuk mengerjakan nilai-nilai akidah dan moral kepada anak. Karena cerita dapat menyentuh emosi seseorang .

- Metode komtemplasi (perenungan)

  Merenung berarti memikirkan sesuatu tanpa keharusan adanya kontak langsung dengan objeknya. Quran surat al-an'am ayat 46.

  Menyebutkan bahwa metode kontemplasi memang perlu digunakan oleh manusia dalam

proses pendidikan jiwa dan menemukan kebenaran sesuatu. Sebab dalam kajian epistemologi, ada yang disebut dengan pengetahuan (ilham), yaitu pengetahuan yang tidak bisa tertangkap oleh indra manusia yang lahir, tetapi hanya bisa ditangkap oleh indra batin (jiwa yang terdalam).

- **Penerapan perencaan pendidikan agama pada guru dan anak didik.**

Guru adalah orang dewasa yang bertugas mendidik dan mengajar anak didik untuk mencapaai tujuan pendidikan sedangkan "anak didik" adalah orang yang memerlukan pendidikan dan pengajaran dari guru untuk memperkembangkan dirinya menuju tercapainya tujuan pendidikan. Sosok guru dan murid yang dpat ditemukan dalam al qur'an adalah sebagai berikut:

- Malaikat jibril menjadi guru bagi nabi muhammad Saw maka nabi muhammad berada sebagai posisi sebagai murid
- Para rasul Allah menjadi guru bagi kaumnya sedangkan kaum dari masing-masing rasul berada pada posisi sebagai murid
- Nabi ibrahim as, pernah menjadi guru bagi ayahnya sendiri
- Nabi musa as, pernah menjadi guru bagi fir'aun
- Lukman menjadi guru bagi anaknya
- Nabi khaidir as, menjadi guru bagi nabi musa as
- Pada kasus tertentu Allah SWT, menjadi guru bagi nabi adam dan nabi ibrahim as

- Khusus untuk anak murid, selain belajar dari guru secara langsung, juga ditemukan cara belajar secara autodidak, misalnya yang dilakukan oleh nabi ibrahim dan qhabil anak nabi adam as.

Mencermati kasus-kasus yang ditemukan al qur'an tersebut, ada beberapa hal yang menarik untuk diperbincangkan lebih jauh sbb :

Guru dan karakteristiknya

Berkaitan dengan persoalan siapakah guru? Jawabnya adalah guru itu sebagai hamba Allah yang mempunyai kelebihan ari pada murid yang melakukan tugas penddikan atas dasar perintah atau amanah Allah. Perwujudan lahirnya bisa malaikat, nabi (rasul) orang dewasa lain, bisa juga seorang anak yang telah dewasa terhadap orangtuanya.

Karakteristik atau sisfat-sifat utama yang harus ada pada seorang guru yaitu:

- Mempunyai iman yang teguh
- Taat dan takwa kepada Allah.
- Mempunyai akhlak yang mulia.
- Mempunyai kecerdasan yang tinggi.
- Menyampaikan segala sesuatu dengan jujur.
- Mempunyai rasa tanggungjawab tinggi terhadap tugas
- Penuh perhatian, dan ikhlas karena Allah SWT.

E. Proses Perencanaan Umum dan Agama

Administrasi dipandang sama dengan konsep manajemen. Manajemen pendidikan terdiri dari dua kata yaitu manajemen dan pendidikan. Secara sederhana manajemen pendidikan

dapat diartikan sebagai manajemen yang diterapkan dalam bidang pendidikan dengan spesifikasi dan ciri-ciri khas yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itu pemahaman tentang manajemen pendidikan menuntut pula pemahaman tentang manajemen secara umum.

Secara morfologis kata "administrasi" berasal dari bahasa Latin yang terbentuk dari kata *Ad* dan *ministrate*. Kata *ad* mempunyai pengertian yang sama dengan kata *to* dalam bahasa Inggris berarti *ke* atau kepada *inistrare* mempunyai makna yang sama dengan istilah *to conduct*, *to lead* dan *to guide* atau mengarahkan, melayani, memimpin dan membimbing. Sedangan isltilah *to administer* itu sendiri dalam bahasa Inggris mengandung beberpap pengertian yakni mengarhkan, mengatur, dan memelihara.

Kegiatan administrasi itu dilaksanakan dalam setiap kelompok kerjasama sejumlah manusia dalam berbagai bidang kehidupan termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Oleh karena itu, administrasi pendidikan merupakan aplikasi ilmu administrasi dalam kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha-usaha pendidikan yang diselenggarakan dalam bentuk kerjasama sejumlah orang dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang tersedia baik moral maupun material dan spiritual agar tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efesien.Kegiatan administrasi juga merupakan usaha pengendalian rangkaian kegiatan kependidikan yang terarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh kelompok kerjasama yang menyelenggarakan usaha kependidikan. Dengan demikian administrasi pendidikan bukanlah kegiatan kependidikan, akan tetapi adalah kegiatan pengendalian rangkaian kegiatan kependidikan agar

berlangsung secara efektif dan efesien dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau seluruh proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan. Administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoornisasikan perilaku manusia dalam pendidikan, agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Administrasi pendidikan merupakan manajemen pengelolaan seluruh kegiatan pendidikan sebagai pemandu jalannya proses pendidikan.

F. Tanggung Jawab Administrasi Pendidikan

Administrasi pendidikan memiliki tanggung jawab besar terhadap pelaksanaan proses pendidikan. Diantara tanggung jawab administrasi pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab *Planing* atau Perencanaan.

Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi, dan dianggap syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga baik perorangan maupun kelompok. Rancangan yang disusun dalam konteks pendidikan meliputi:

a. Perumusan tujuan yang hendak dicapai
b. Penentuan bidang atau fungsi unit sebagai bagian-bagian yang akan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

c. Menetapkan jangka waktu yang diperlukan
d. Menetapkan metode atau cara mencapai tujuan
e. Menetapkan alat yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan efesiensi pencapaian tujuan
f. Merumuskan rencana evaluasi atau penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan
g. Menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan.

Dengan demikian rancangan kegiatan administrasi pendidikan yang harus dirumuskan mencakup 7 faktor yaitu Faktor tujuan, faktor bidang atau bentuk kegiatan, faktor waktu, faktor metode, faktor alat, faktor penilaian, dan faktor dana.

2. Tanggung Jawab *Organizing* **atau Pengorganisasian**

Pengorganisasian adalah aktivitas penyusunan, pembentukan hubungan kerja antara orang-orang atau organ-organ sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau penyusunan bagian-bagian yang terpisah sehingga terjadi suatu kesatuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam langkah pengorganisasian ini, ada dua hal pokok yang menjadi perhatian:

a. Penciptaan mekanisme atau tata kerja, seirama dengan pola struktur organisasi yang dibuat-ditetapkan.
b. Penentuan dan pendistribusian kerja yaitu, penyebaran dan pembagian tugas/ pekerjaan sekaligus pelaksanaan-pelaksanaan beserta kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota/ staf pengurus organisasi.

3. Tanggung *Jawab* Penggerakan atau *Actuation*

Aktuasi artinya menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran secara bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan.

4. Tanggung Jawab *Controlling* atau Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang dilaksanakan. Bagian supervisi, bahwa setiap pelaksanaan daripada program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervisi.

Selanjutnya ditambahkan tanggung jawab administrasi pendidikan adalah pengarahan, koordinasi, dan evaluasi. Pengarahan maksudnya member bimbingan dan petunjuk yang diberikan sebelum kegiatan pelaksanaan dilakukan, untuk memelihara, menjaga dan mengajukan organisasi melalui orang-orang yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional agar setiap kegiatan yang dilakukan nanti tidak terlepas dari usaha pencapaian tujuan pendidikan.

Koordinasi adalah mengsingkronkan dan meluruskan semua kegiatan unit dapertemen/ satuan organisasi menuju tercapainya tujuan/ hasil akhir yang sama, koordinasi menyangkut semua orang, kelompok unit organisasi dan semua kegiatan dalam setiap organisasi dimana orang bekerjasama. Tanpa koordinasi terjadi pemborosan uang, tenaga dan waktu yang sangat banyak. Evaluasi adalah untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program. Jadi, evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan, pendidikan adalah aktifitas-aktifitas untuk menentukan sampai dimana hasil dan tujuan-tujuan pendidikan itu telah tercapai.

G. Peran Administrasi Pendidikan

Administrasi pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan. Sedangkan administrasi sekolah kegiatan-kegiatannya terbatas pada pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah sehingga kita mengenal adanya administrasi Sekolah Dasar, Lanjutan, Perguruan Tinggi dan sebagainya, diantaranya kepemimpinan Kepala Sekolah, Supervisi dan sebagainya. Didalam administrasi terdapat beberapa unsur pokok, diantaranya adanya sekelompok manusia sedikitnya dua orang, adanya tujuan yang hendak di capai bersama, adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan, dan adanya perlengkapan dan peralatan.

Administrasi pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan, dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, materiil, maupun spirituil untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi, dengan lebih memperhatikan aspek administrasi pendidikan, maka diharapkan tujuan pendidikan atau target program pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan yang juga sering disebut dengan manajemen pendidikan yang sangat diperlukan untuk menjamin supaya seluruh kegiatan pendidikan dapat terlaksana dengan optimal. Administrasi pendidikan memiliki peran sebagai perencanaan *(Planning),* pengorganisasian *(Organizing),* pengoordinasian *(Coordinating)*, komunikasi, supervisi, kepegawaian *(Staffing),* pembiayaan *(Budgeting)*, penilaian *(Evaluating).*

Dalam administrasi pendidikan terkandung unsur-unsur, yaitu tujuan yang akan dicapai, adanya proses kegiatan bersama, adanya pemanfaatan sumber daya, adanya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan terhadap sumber daya yang ada. Dengan melihat kepada unsur-unsur pokok dalam administrasi seperti telah di kemukakan terdahulu, jelas bahwa bidang-bidang yang tercakup di dalam proses kegiatan administrasi pendidikan itu luas. Secara terperinci bidang administrasi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Administrasi tata laksana sekolah, meliputi:

a. Organisasi dan struktur pegawai tata usaha
b. Organisasi dan anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian, masalah perlengkapan dan perbekalan, keuangan dan pembukuan
c. Korespondensi atau surat-menyurat
d. Laporan-laporan bulanan, kuartalan, dan tahunan) masalah pemangkatan, pemindahan, penempatan, dan pemberhentian pegawai.
e. Pengisian buku pokok, klapper, raport, dan sebagainya.

2. Administrasi Murid, meliputi:

a. Organisasi dan perkumpulan murid
b. Masalah kesehatan dan kesejahteraan murid
c. Penilaian dan pengukuran kemajuan murid
d. Bimbingan dan penyuluhan bagi murid

3. Supervisi pengajaran, meliputi:

a. Usaha membangkitkan semangat guru dan pegawai

b. Usaha mengembangkan, mencari dan menggunakan metode pengajaran yang baru
c. Usaha mengembangakan kerja sama antara guru, murid,dan pegawai
d. Mengusahakan cara-cara menilai hasil pendidikan
e. Usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru-guru

4. Pelaksanaan dan Pembinaan Kurikulum, meliputi:

a. Mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan.
b. Menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum.
c. Kurikulum bukanlah sesuatu yang harus di ikuti begitu saja tanpa perubahan.

5. Pendidikan dan perencanaan bangunan sekolah, meliputi:

a. Cara memilih letak dan menentukan luas tanah yang di butuhkan
b. Mengusahakan, merencanakan dan menggunakan biaya pendirian sekolah
c. Menentukan jumlah ruang dan luasnya
d. Cara-cara penggunaan gedung dan fasilitas sekolah
e. Alat-alat perlengkapan
f. Kondisi masyarakat sekitar sekolah

Administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur, sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan bagi kepala sekolah dan guru. Peningkatan kemampuan tersebut akan berakibat positif, yaitu makin meningkatnya efisiensi, mutu dan perluasan pada kinerja di dunia pendidikan tersebut. Untuk memperlancar

kegiatan di atas agar lebih efektif dan efisien perlu informasi yang memadai. Sistem informasi di dunia pendidikan ini menyangkut dua hal pokok yaitu kegiatan pencatatan data *(recording system)* dan pelaporan *(reporting system).*

Administrasi suatu lembaga pendidikan merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga tercapainya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan tersebut. Yang sangat diperlukan oleh para pelaku pendidikan untuk melakukan tugas dan profesinya. Kepala Sekolah dan guru disekolah sangat memerlukan data-data tentang siswa, kurikulum, sarana dan sebagainya untuk pengelolaan sekolah sehari-hari. Pengawas pendidikan di semua tingkat memerlukan data-data tersebut sebagai bahan sarana supervisi. Untuk tingkat yang lebih tinggi misalnya Dinas Pendidikan mulai tingkat kecamatan sampai propinsi memerlukan data untuk pelaporan yang lebih tinggi, untuk melakukan pembinaan, serta untuk menyusun rencana atau program pendidikan pada masa mendatang. Di tingkat pusat data pendidikan diperlukan untuk perencanaan yang lebih makro, melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian, dan keperluan administrasi lainnya.

Data pendidikan yang terdapat disekolah sangat banyak macam dan jenisnya. Ada yang bersifat relatif tetap dan ada yang selalu berubah. Untuk mendapatkan gambaran perubahan data dari waktu ke waktu, perlu dilakukan pencatatan yang teratur dan berkelanjutan dengan menggunakan sistem yang baku dalam satu sistem. Agar pencatatan data lebih akurat dan benar sesuai yang diharapkan tenaga administrasi yang terampil dan mengetahui apa yang menjadi tugasnya. Di lembaga pendidikan tingkat menengah hampir sebagian besar belum ada tenaga administrasi sesuai yang diharapkan. Kepala

Sekolah sebagai administrator di lingkungan sekolah yang dipimpinnya, dalam melaksanakan tugas administrasi dibantu oleh guru dengan cara membagi tugas administrasi mereka. Agar dalam melaksanakan tugas administrasi dan pelaporan, cepat dan benar diperlukan pedoman administrasi di tingkat sekolah. Jadi administrasi pendidikan sangat mempunyai peran yang sangat vital dalam pengembangan dan kemajuan dalam dunia pendidikan sehingga arah untuk merealisasikan suatu prestasi sangatlah mudah tercapai.

BAB V

HUBUNGAN PERENCANAAN PENDIDIKAN DENGAN ASPEK DEMOGRAFI, SOSIAL, POLITIK, DAN EKONOMI

A. Faktor-faktor Umum

Sikula menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan organisasi yaitu ramalan bisnis,ekspansi dan pertumbuhan organisasi. Cunningham menyebutkan konteks perencanaan lokal yaitu :

1. Sosial terdiri dari demografi,ekonomi dan politik
2. Ideologi yaitu nilai kewarganegaraan dan minat pribadi
3. Pemerintah dan undang-undang statuta administrasi, kasus, dan prosedur pemeriksaannya
4. Struktur yaitu kontak antar organisasi pemerintah.

Para konseptor perencana pendidikan juga perlu memperhatikan demografi yaitu kependudukan atau kepadatan penduduk didaerahnya,penyebarannya dan besarnya jumlah warga yang masuk.Agar hasil perencanaan dapat bejalan lancar tidak semua faktor dapat dikaitkan pada setiap kali melakukan perencanaan,karena perhatian pada faktor lingkungan oleh setiap perencanaan tidak lah sama.

B. Hubungan dengan Aspek Demografi Kependudukan

Demografi berasal dari bahasa yunani yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk dan grafien berarti menulis. Jadi demografi adalah tulisan atau karangan mengenai rakyat atau penduduk. Alasan yang melandasi pemikiran bahwa kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Pertama penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan, kedua keadaan dan kondisi kependudukan yang ada dan sangatmempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, ketiga dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang.

Demografi merupakan studi tentang struktur dan komposisi kependudukan. Pendidikan sangat banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh kondidi penduduk, sehingga dalam melakukan suatu perencanaan pendidikan aspek kependudukan tidak dapat diabaikan, demikian juga dalam hal pelayanan pendidikan yang pada dasarnya diarahkan untuk kepentingan penduduk (dalam suatu bangsa/daerah). Beberapa aspek demografi yang penting adalah:

1. Laju pertumbuhan penduduk
2. Tingkat kelahiran
3. Tingkat kematian
4. Migrasi
5. Struktur penduduk menurut sosial ekonomi
6. Penyebaran penduduk secara geografis
7. Komposisi penduduk menurut usia
8. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin

9. Komposisi penduduk desa kota

Faktor-faktor di atas jelas akan mempengaruhi pada perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerataaan pendidikan
2. Keadilan pendidikan
3. Prasarana pendidikan
4. Anggaran pendidikan
5. Kualitas pendidikan
6. Komposisi pendidikan umum dan kejuruan

C. Hubungan dengan Aspek Sosial Kemasyarakatan

Menurut zakiyah daradjat, masyarakat adalah sekumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara kebudayaan dan agama. Hubungan yang baik antara lembaga pendidikan dengan masyarakat didasarkan atas *common sense* dengan komunikasinya yang lancar, yang membawa peluang besar kepada para perencana untuk melaksanakan peran partisipatori.

Setiap masyarakat dalam kehidupannya pasti mengalami perubahan-perubahan. Berdasarkan sifatnya, perubahan yang terjadi bukan hanya menuju ke arah kemajuan, namun dapat juga menuju ke arah kemunduran. Perubahan sosial yang terjadi memang telah ada sejak zaman dahulu. Ada kalanya perubahan-perubahan yang terjadi berlangsung demikian cepatnya, sehingga membingungkan manusia yang menghadapinya.

Perubahan sosial merupaka gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara

unsur-unsur sosial yang ada didalam masyarakat, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai dengan fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam literatur mengenai kehidupan masyarakat dan kebudayaan beberapa istilah penting selalu muncul sebagai pencerminan dinamika kehidupan manusia dari dahulu sampai sekarang. Dinamika tersebut mencerminkan adanya proses perubahan baik yang bersifat lambat, maupun yang bersifat cepat. Ada perobahan yang bersifat evolusioner dan ada yang bersifat revolusioner. Perobahan yang bersifat evolusioner memakan waktu ribuan atau ratusan tahun, suatu proses perubahan yang berkelanjutan dari bentuk yang lebih rendah, lebih sederhana ke bentuk-bentuk yang lebih tinggi, lebih kompleks. Sedangkan perobahan yang bersifat revolusioner adalah perobahan yang berlangsung dalam waktu yang lebih pendek, yang bersifat tiba-tiba, radikal dan menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan.

Gillin dan Gillin menyatakan bahwa perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, dinamika dan komposisi penduduk, ideologi, ataupun karena adanya penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat.

Samuel Koenig menjelaskan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab intern atau sebab-sebab ekstern.Berikutnya Selo Soemardjan menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompokkelompok dalam masyarakat.

Jadi, dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur atau struktur sosial dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain. Perubahan sosial budaya itu biasanya terjadi karena adanya dorongan dari beberapa faktor baik yang berasal dari dalam masyarakat (internal) maupun yang berasal dari luar masyarakat (eksternal). Faktor-faktor internal, merupakan faktor-faktor perubahan yang berasal dari dalam masyarakat, misalnya (1) perubahan aspek demografi (bertambah dan berkurangnya penduduk), (2) konflik antar-kelompok dalam masyarakat, (3) terjadinya gerakan sosial dan/atau pemberontakan (revolusi), dan (4) penemuan-penemuan baru, yang meliputi (a) discovery, atau penemuan ide/alat/hal baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya (b) invention, penyempurnaan penemuan-penemuan pada discovery oleh individu atau serangkaian individu, dan (c) inovation, yaitu diterapkannya ide-ide baru atau alat-alat baru menggantikan atau melengkapi ide-ide atau alat-alat yang telah ada. Faktor-faktor eksternal, atau faktor-faktor yang beasal dari luar masyarakat, dapat berupa: (1) pengaruh kebudayaan masyarakat lain, yang meliputi proses-proses difusi (penyebaran unsur kebudayaan), akulturasi (kontak kebudayaan), dan

asimilasi (perkawinan budaya), (2) perang dengan negara atau masyarakat lain, dan (3) perubahan lingkungan alam, misalnya disebabkan oleh bencana.

Menurut ***Murdock*** berbagai phenomena yang dapat menjadi faktor penyebab timbulnya perobahan sosial budaya adalah:Pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk, perobahan lingkungan geografis, perpindahan ke lingkungan baru, kontak dengan orang yang berlainan kebudayaan, persoalan alam dan sosial, kelahiran atau kematian seorang pemimmpin, penemuan / Inovasi.

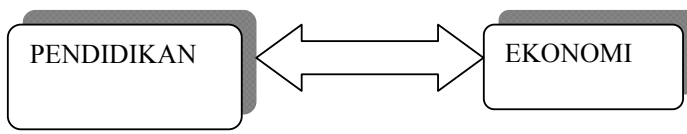
Ada pula beberapa faktor yang menghambat terjadinya perubahan, misalnya kurang intensifnya hubungan komunikasi dengan masyarakat lain; perkembangan IPTEK yang lambat; sifat masyarakat yang sangat tradisional; ada kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat dalam masyarakat; prasangka negatif terhadap hal-hal yang baru; rasa takut jika terjadi kegoyahan pada masyarakat bila terjadi perubahan; hambatan ideologis; dan pengaruh adat atau kebiasaan.

D. Hubungan dengan Aspek Ekonomi

Sejak negara-negara jajahan memperoleh kemerdekaan, masalah yang dihadapi dalam upaya memperbaiki kehidupan rakyat sangat kompleks, hampir seluruh bidang kehidupan perlu ditata kembali, hal ini tak lain karena pada masa penjajahan kehidupan masyarakat diarahkan demi kepentingan penjajah. Kondisi kehidupan negara/bangsa yang baru merdeka secara ekonomi sering dikonseptualisasikan sebagai negara terbelakang (backward country) atau underdeveloped country (negeri dengan pembangunan rendah). Kemudian dalam perkembangannya istilah tersebut diperhalus dengan menggunakan istilah negara berkembang atau negara yang sedang membangun (developing country). Meski demikian

esensi masalah yang dihadapi sebenarnya sama yakni situasi masalah yang komplek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Diantara masalah besar yang dihadapi oleh negara baru merdeka adalah masalah kualitas sumberdaya manusia yang rendah, jumlah manusia terdidik sangat sedikit akibat kebijakan penjajah yang diskriminatif dan yang memperoleh pendidikan kebanyakan hanya menempuh jenjang rendah. Kondisi ini jelas berakibat pada sulitnya untuk membangun, karena pembangunan, termasuk bidang ekonomi memerlukan manusia-manusia yang berkualitas, dan kualitas manusia ini hanya bisa dibentuk dengan pendidikan.

Para pakar ekonomi klasik seperti Malthus, Ricardo dan Mill mengemukakan pandangan yang optimistik bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan yang bersifat resiprokal (reciprocal relationship) atau saling mempengaruhi satu sama lain (Sudarwan Danim, 2003 : 61). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pembangunan ekonomi mempunyai hubungan yang interaktif, pendidikan bisa dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, sebaliknya pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pembangunan pendidikan. Dari penjelasan di atas, dapatlah dipahami bahwa pendidikan dan ekonomi mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi, yang apabila digambarkan akan nampak sebagai berikut



Gambar Hubungan Pendidikan dan Ekonomi

Hubungan tersebut menunjukkan suatu keterkaitan atau kesaling terkaitan antara pendidikan dengan ekonomi, sehingga yang satu memerlukan yang lain. Pendidikan memerlukan ekonomi dan ekonomi juga memerlukan pendidikan. Agar ekonomi masyarakat meningkat diperlukan kualitas sumberdaya manusia yang mampu mendorong peningkatan kehidupan ekonomi. Kualitas sumberdaya manusia atau human capital dapat meningkat bila pendidikan berkembang, dan perkembangan pendidikan ini tidak terlepas dari investasi yang dikeluarkan, baik investasi individu maupun investasi publik yang dianggarkan oleh pemerintah,

Kehidupan ekonomi masyarakat merupakan cerminan dari para pelaku ekonominya baik dalam produksi, konsumsi, maupun distribusi. Tingkat kondisi ekonomi ini jelas akan berbeda-beda sesuai dengan bagaimana pelaku ekonomi melakukan aktivitas ekonominya, sebaliknya tingkat dan kualitas pendidikan pada suatu masyarakat akan ditentukan oleh berapa besar pengorbanan yang diberikan untuk menyelenggarakankegiatan pendidikan tersebut, baik dalam bentuk tenaga maupun dana, baik secara individual maupun masyarakat/negara, dan besarnya alokasa dana yang diberikan untuk pendidikan akan mencerminkan kemampuan ekonomi individu dan ekonomi masyarakat/negara.

Dengan demikian antara ekonomi dengan pendidikan terdapat suatu keterkaitan dimana peningkatan dalam salah satunya akan mendorong peningkatan yang lainnya. Dalam hasil penelitian dan tulisan tentang ekonomi pendidikan masalah hubungan antara pendidikan dengan ekonomi menjadi perhatian penting, Menurut Lascelles Anderson dan Duglas M. Windham (1982 : xi) dalam titeratur awal tentang ekonomi pendidikan dan Human capital cenderung menjadikan

pendidikan sebagai instrumen yang dapat dipergunakan untuk mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi (*tended to make education into an instrument capable of being manipulated to achieve higher level of economic developement),* ini berarti bahwa pendidikan merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan dalam statu kegiatan pembangunan, artinya akan sangat sulit bila pendidikan dan ekonmi dibangun sendiri-sendiri dalam urutan waktu, Namun keduanya mesti dibangun secara bersamaan, sudah tentu dengan memperhatikan bidang-bidang kehidupan lainnya.

1. Pendidikan Dan Ekonomi

Pendidikan dan ekonomi merupakan suatu hal yang berbeda, pendidikan merupakan usaha memberikan bimbingan dan latihan guna meningkatkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki manusia, sedangkan ekonomi merupakan bidang kehidupan yang berkaitan dengan upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, namun demikian keduanya punya keterkaitan dan hubungan timbal balik. Pendidikan memerlukan kondisi ekonomi yang menopangnya dan ekonomi memerlukan pendidikan guna meningkatkan dan membangunnya.

Oleh karena itu keterkaitan antara pendidikan dan ekonomi merupakan sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi, mengingat keduanya saling membutuhkan. Pendidikan bisa dilihat sebagai variabel bebas (yang mempengaruhi) juga sebagai variabel terikat (yang dipengaruhi, demikian juga halnya dengan ekonomi, seperti dikemukakan oleh Gary S. Field (Lascelles Anderson dan Duglas M. Windham .1982: 49) bahwa " educational growth causes economic growth and economic growth permits educational growth". meskipun demikian, dalam tataran praktis faktor mana yang

paling berpengaruh sulit dipisahkan/diurai dengan jelas, namun dalam tataran teori pembedaan/penguraian tersebut diperlukan untuk kepentingan analisis. Dalam hubungan ini penulis akan mencoba untuk mengkaji masing-masing sudut pandang, dengan maksud untuk melihat masalah keterkaitan antara pendidikan dan ekonomi secara komprehensif.

2. Pengaruh Pendidikan Terhadap Ekonomi

Diakui oleh para ahli bahwa pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kehidupan ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa negara-negara yang secara ekonomi maju, masyarakatnya mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi/lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang ekonominya belum maju.

Dengan mengingat hal tersebut, para ahli berpendapat bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat akan mampu mendorong kehidupan ekonomi lebih maju. Pendidikan menjadikan manusia terdidik dan trampil sehingga partisipasinya dalam kehidupan ekonomi atau pembangunan ekonomi akan makin produktif, dan produktivitas yang tinggi akan menjadikan pembangunan ekonomi meningkat.

Menurut Todaro (1983 : 433) "Hampir semua para ahli ekonomi barangkali akan sependapat bahwa bagi suatu bangsa, sumberdaya manusia yang pada akhirnya menentukan karakter dan langkah pembangunan ekonomi dan sosialnya, bukan modal dan bukan pula sumber-sumber materialnya". Dari pendapat tersebut nampak bahwa SDM adalah faktor yang menentukan/mempengaruhi pembangunan/kehidupan ekonomi, dan peningkatan kualitas SDM, yang hanya bisa dilakukan melalui pendidikan, akan dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dari suatu bangsa.

Don Adam dan Robert M. BJork (1982 : 29) menyatakan bahwa beberapa ahli menggunakan pendidikan sebagai standar keberhasilan pembangunan, yang mereka maksudkan, pendidikan yang mempunyai korelasi tinggi dengan penigkatan GNP per kapita dan sebagai standar kecenderungan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi sejajar dengan kemajuan pendidikan. Sementara itu Harbison dan Myer (Don Adam : 1982 : 30) berpendapat bahwa pendidikan berarti sejajar dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara keduanya tidak ditentukan mana yang jadi penyebab, dan barangkali kemajuan ekonomi membawa pendidikan ke orang yang lebih formal.

Kemajuan suatu kehidupan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, meskipun secara esensial semua itu tergantung pada bagaimana manusianya dalam menjalankan kehidupan ekonominya. Kualitas manusia dengan demikian menjadi faktor penentu maju mundurnya kehidupan ekonomi masyarakat. Namun demikian bagaimana mengukur kontribusi atau pengaruh pendidikan pada kehidupan ekonomi, merupakan hal yang sulit. Dalam hubungan ini para ahli telah berusaha mencari cara untuk melihat pengaruh pendidikan pada ekonomi.

Dalam upaya pencarian tersebut paling tidak ada tiga pendekatan (Oteng Sutisna 1980 : 49) untuk melihat sumbangan kongkret dari pendidikan kepada pertumbuhan ekonomi yaitu:

a. Pendekatan residual; yaitu pendekatan dengan cara menghitung sumbangan-sumbangan modal, input, tenaga kerja dan sumber-sumber fisik kepada pertumbuhan produksi dan apapun yang tertinggal (residu) dianggap berasal dari faktor manusia (Pendidikan)

b. Pendekatan Korelasi; yaitu pendekatan yang menggunakan perbandingan antar negara dengan mengaitkan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan tingkat kehidupan ekonomi

c. Pendekatan perolehan pendidikan yang melihat kontribusi pendidikan melalui penghasilan orang yang terdidik.

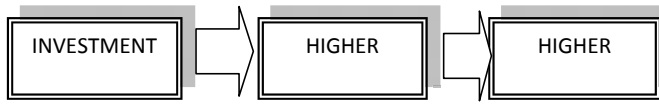
Ketiga pendekatan tersebut pada dasarnya melihat pendidikan sebagai variabel atau faktor yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat, kecuali pendekatan korelasional, dimana keduanya beposisi setara..

Disamping itu pengaruh pendidikan terhadap ekonomi juga dapat dilihat dari sudut pendidikan sebagai sebuah industri. Elchanan Cohn (1979 : 2) menyatakan *Education is a gigantic Industry in the united states.* Pendidikan mempekerjakan banyak orang dari mulai guru, siswa, dan pekerja lainnya yang mendapat penghasilan dari sektor pendidikan. Dengan demikian sektor pendidikan banyak menyerap tenaga kerja, dan ini berarti dapat membantu meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.

Baik secara individu maupun sosial tingkat pendidikan akan mempengaruhi kehidupan ekonomi. Untuk tingkatan individu, pendidikan akan dapat meningkatkan pendapatan seseorang, dalam hal ini terdapat beberapa pendekatan yang mencoba menghubungkan antara pendidikan dengan kehidupan ekonomi individu yang tercermin dari pendapatan yang diperoleh. Hal ini berarti bahwa perubahan dan perbedaan dalam tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan masyarakat (pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing orang).

a. Teori Human Capital. Premis dasar dari pendekatan human capital adalah "… *that variation in labor income*

are due to difference in labor quality (Elchanan Cohn. 1979 : 28), dan perbedaan kualitas pekerja itu salah satu penyebabnya adalah pendidikan, oleh karena itu Elchanan Cohn (1979 : 29) menggambarkan hubungan pendidikan dengan penghasilan/pendapatan sebagai berikut:



Gambar hubungan investasi pendidikan dengan pendapatan

Dari gambar di atas dapat difahami bahwa investasi yang dikeluarkan untuk pendidikan akan dapat meningkatkan kualitas pekerja dengan meningkatnya produktivitas, dan dengan produktivitas yang meningkat, maka pendapatan / penghasilan pekerja tersebut akan meningkat pula. Hal ini juga berarti bahwa semakin besar investasi pendidikan semakin besar pula pendapatan yang akan diperoleh, dan apabila seseorang mencapai pendidikan tinggi itu berarti investasiyang dikeluarkan untuk pendidikan semakin besar.

b. Screening (Credentials), dalam pendekatan ini investasi pendidikan mempengaruhi pendapatan tidak melalui produktivitas melainkan melalui diperolehnya credential/ ijazah yang dapat menjadi dasar dalam screening, atau dalam penentuan seleksi pegawai yang akan diterima bekerja. Bila digambarkan akan nampak sebagai berikut :



Ganbar hubungan investasi pendidikan dengan pendapatan

Dengan memperhatikan penjelasan di atas, nampak bahwa pendidikan akan menghasilkan pekerja yang lebih trampil, makin produktif dan punya credential/berijazah tinggi, akibatnya mereka akan memperoleh penghasilan/ pendapatan yang yang tinggi/lebih tinggi.

E. Hubungan dengan Aspek Politik

Hubungan antara pendidikan dan politik bukan sekedar hubungan saling memengaruhi, tetapi juga hubungan fungsional. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan menjalankan sejumlah fungsi politik yang signifikan. Mungkin yang terpenting dari fungsi-fungsi tersebut bahwa sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya menjadi agen-agen sosialisasi politik. Lembaga-lembaga pendidikan menjadi tempat dimana individu-individu, terutama anak-anak dan generasi muda, mempelajari sikap-sikap dan perasaan tentang sistem politik, dan sejenis peran politik yang diharapkan dari mereka. Berbagai institusi pendidikan yang ada dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan dalam upaya membentuk sikap dan keyakinan politik yang dikehendaki. Berbagai aspek pembelajaran, terutama kurikulum dan bahan-bahan bacaan, sering kali diarahkan pada kepentingan politik tertentu. menambahkan bahwa salah satu komponen terpenting pendidikan, kurikulum, misalnya, dapat menjadi media sosialisasi politik. Menurutnya, kurikulum disuatu lembaga pendidikan memiliki tiga sumber utama. Pertama, pendapat kelompok profesional pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh institusi-institusi pelatihan guru dan sering kali merefleksikan atau mengadaptasi ide dari individu-indovidu yang didewa-dewakan, seperti John Dewey, John Lock, dan Wiliam Stern. banyak negara totaliter dan negara berkembang, pemimpin politik sangat menyadari fungsi pendidikan dalam mencapai

tujuan-tujuan politik. Mereka melakkan berbagai cara untuk mengontrol sistem pendidikan dan menitipkan pesan-pesan politik melalui metode an bahan ajar (curriculum content) pendidikan. Dinegara-negara komunis, misalnya, metode brain washing digunakan secara luas untuk membentuk pola pikir kaum muda, agar sejalan dengan doktrin komunisme

Pendidikan dan politik merupakan dua hal yang seiring sejalan dalam mencerdaskan bangsa. Kedua-duanya tidak berjalan sendiri-sendiri akan tetapi saling berhubungan atau berkaitan. Pendidikan menyiapkan sumber daya manusia untuk mengurus politik dan negara. Negara mengalokasikan biaya untuk mendukung kecancaran proses pendidikan. Dalam perspektif Islam keterlibatan Negara untuk membangun dan mendukung proses pembelajaran diberbagai lembaga pendidikan mutlak dibutuhkan. Transformasi nilai-nilai politik melalui institusi pendidikan melalui intervensi dalam perbuatan kebijakan pendidikan di Indonesia sangat kuat, bahkan institusi pendidikan merupakan wilayah politik negara dan pemerintahan. Pendidikan adalah suatu tindakan sosial yang pelaksanaanya dimungkinkan melalui suatu jaringan hubungan- hubungan kemanusiaan. Jaringan-jaringan inilah bersama dengan hubungan-hubungan dan peranan peranan individu di dalamnyalah yang menentukan watak pendidikan di suatu masyarakat. Politik adalah bagian dari paket kehidupan lembaga- lembaga pendidikan Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur- unsur politik, begitu juga sebaliknya setiap aktivitas politik ada kaitanya dengan aspek- aspek kependidikan

Keduanya sering dilihat oleh sebagian orang tidak ada kaitan dan hubungan, padahal politik dan pendidikan saling menopang dan saling mengisi satu sama lain. Pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku dan moralitas masyarakat di suatu Negara. Begitu juga sebaliknya, perilaku politik di suatu negara memberikan karakteristik pendidikan di negara tersebut. Hubungan tersebut merupakan realitas yang telah terjadi semenjak munculnya peradaban manusia dan sedang menjadi kajian penting para ilmuwan moder.Hubungan erat antara pendidikan dengan politik dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan pendidikan. Dampak positif yang dapat dihasilkan dari hubungan keduanya adalah pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam politik dapat memberikan subsidi kepada pendidikan. Dengan adanya subsidi tersebut pendidikan bisa berkembang sebagaimana mestinya.

hubungan antara politik pendidikan dapat memberikan dampak negatif atau positif bergantung pada pemegang peranan penting dalam politik tersebut. Jika pemegang tanggung jawab pendidikan dalam politik tidak mempunyai kompeten dalam bidang pendidikan, maka pasti ini sangat membahayakan pendidikan. Akan tetapi jika orang yang memegang amanah untuk mengembangkan pendidikan dalam sistem pemerintahan suatu negara adalah orang yang amanah serta mempunyai kapabilitas di bidang pendidikan maka ini sangat memungkinkan untuk memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan, khususnya di Indonesia.

Terlepas dari itu semua, Jika kita melihat realitas politik di Indonesia saat ini, maka hendaknya pendidikan dijadikan satu hal yang netral, khususnya jika kita melihat kondisi politik di Indonesia saat ini. Ini dimaksudkan untuk

menghindari terjadinya penyalahgunaan lembaga pendidikan sebagai penyalur dari kepentingan politik tertentu. Selain itu, jika pendidikan tidak dinetralisir dari dunia politik, maka kepentingan politik akan dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan. Dan ini akan memecahkan konsentrasi lembaga terhadap pendidikan, yang pada akhirnya akan merusak nilai-nilai mulia pendidikan.

BAB VI

MODEL EVALUASI DAN UKURAN-UKURAN DALAM PENILAIAN PERENCANAAN PENDIDIKAN

A. Pengertian Evaluasi Pendidikan

Menurut pengertian bahasa,kata evaluasi berasal dari bahasa inggrisv, evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran (john m. Echols dan hasan shadily, 1983).Menurut stufflebeam, dkk. (1971), evaluasi merupakan the process of delineating, obtaining,and providing useful information for judging decision alternatives, artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

Rooijackers ad mendefinisikan evaluasi sebagai "setiap usaha atau proses dalam menentukan nilai". Secara khusus, evaluasi atau penilaian juga diartikan sebagai proses pemberian nilai berdasarkan data kuantitatif hasil pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan. Anne Anastasi (1978) mengartikan evaluasi sebagai "a systematic process of determining the extend to which instructional objective are achieved by pupils". Evaluasi berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian yang pada umumnya diartikan tidak berbeda walaupun pada hakikatnya berbeda satu dengan yang lain.

Pengukuran measuremen adalah proses membandingkan sesuatu melalui suatu kriteria baku (meter, kilogram, takaran dan sebagainya). Evaluasi pendidikan memberikan manfaat bagi siswa peserta pendidikan, pengajar, dan manajemen. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan dari sisi pendidik, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik untuk menetapkan upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Penilaian dalam bidang pendidikan) atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.

1. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan, sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Dalam proses penilaian, dilakukan perbandingan antara informasi-informasi yang telah berhasil dihimpun dengan kriteria tertentu, untuk kemudian diambil keputusan atau dirumuskan kebijakan tertentu. Kriteria atau tolak ukur yang dipegang tidak lain adalah tujuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum kegiatan pendidikan itu dilaksanakan.
2. Berbicara tentang pengertian evaluasi pendidikan di tanah air kita, Lembaga Administrasi Negara mengemukakan batasan mengenai evaluasi pendidikan sebagai berikut :
   - Proses kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan, dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan
   - Usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik (feed beck) bagi penyempurnaan pendidikan.

Evaluasi sendiri memiliki beberapa prinsip dasar yaitu:

1. Evaluasi bertujuan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembelajaran bagi masyarakat.
2. Evaluasi adalah seni, tidak ada evaluasi yang sempurna, meski dilkukan dengan metode yang berbeda.
3. Pelaku evaluasi atau evaluator tidak memberikan jawaban atas suatu pertanyaan tertentu. Evaluator tidak berwennag untuk memberikan rekomendasi terhadap keberlangsungan sebuah program. Evaluator hanya membantu memberikan alternatif.
4. Penelitian evaluasi adalah tanggung jawab tim bukan perorangan.
5. Evaluator tidak terikat pada satu sekolah demikian pula sebaliknya.
6. evaluasi adalah proses, jika diperlukan revisi maka lakukanlah revisi.
7. Evaluasi memerlukan data yang akurat dan cukup, hingga perlu pengalaman untuk pendalaman metode penggalian informasi.
8. Evaluasi akan mantap apabila dilkukan dengan instrumen dan teknik yang aplicable.
9. Evaluator hendaknya mampu membedakan yang dimaksud dengan evaluasi formatif, evaluasi sumatif dan evaluasi program.
10. Evaluasi memberikan gambaran deskriptif yang jelas mengenai hubungan sebab akibat, bukan terpaku pada angka soalan tes.

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa sesungguhnya evaluasi adalah proses mengukur dan menilai terhadap suatu objek dengan menampilkan hubungan sebab akibat diantara faktor yang mempengaruhi objek tersebut.Perencanaan

Evaluasi Pendidikan Dalam melaksanakan evaluasi pendidikan hendaknya dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Evaluasi pendidikan secara garis besar melibatkan 3 unsur yaitu:

1. Input yaitu bahan mentah yang dimasukkan kedalam transformasi. Dalam dunia sekolah maka yang yang dimaksud dengan bahan mentah adalah siswa buru yang akan memasuki sekolah. Sebelum memasuki suatu tiungkat (institusi), calon siswa itu dinilai dahulu kemampuannya. Dengan evaluasi itu ingin diketahui apakah kelak ia akan mampu mengikuti pelajaran dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan padanya.
2. Transformasi yaitu mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dalam dunia sekolah, sekolah itulah yang dimaksud dengan transformasi. Sekolah itu sendiri terdiri dari beberapa mesin yang menyebabkan berhasil atau gagalnya transformasi. Bahan jadi yang diharapkan, yang dalam hal ini siswa lulusan sekolah ditentukan oleh beberapa faktor sebagai akibat bekerjanya unsur-unsur yang ada. Unsur-Unsur transformasi sekolah tersebut antara lain:
   - Guru dan personal lainnya.
   - Bahan pembelajaran.
   - Metode mengajar dan sistem evaluasi.
   - Sarana penunjang.
   - System administrasi.
3. Output yaitu bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi. Yang yang dimaksud adalah sisiwa lulusan sekolah yang bersangkutan.Untuk dapat menetukan apakah seorang

siswa berhak lulus atau tidak, perlu diadakan kegiatan evaluasi.

Apabila prosesdur yang dilakukan tidak bercermin pada 3 unsur tersebut maka dikhawatirkan hasil yang digambarkan oleh hasil evaluasi tidak mampu menggambarkan gambaran yang sesungguhnya terjadi dalam proses pembelajaran.

B. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi pendidikan mencakup dua sasaran pokok, yaitu evaluasi makro (program) dan evaluasi mikro (kelas). Secara umum, evaluasi terbagi tiga tahapan sesuai proses belajar mengajar, yakni dimulai dari evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi output. Evaluasi input mencakup fungsi kesiapan penempatan dan seleksi. Evaluasi proses mencakup formatif, diagnostik, dan monitoring, sedangkan evaluasi output mencakup sumatif.

Fungsi kesiapan penempatan dan seleksi adalah mengetahui ketarampilan prasyarat yang di perlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar. Fungsiseleksi yaitu penilaian yang bertujuan keperluan seleksi, seperti ujian saringan masuk perguruan tinggi tertentu. Funsi formatif, yaitu penilaian yang di laksanakan pada akhir program belajar.Fungsi diagnostik dan monitoring adalah mengidentifikasi kelemahan-kelemahan siswa dan faktor penyebabnya serta menetapkan cara untuk mengatasi kesulitan belajar. Fungsi sumatif adalah penilaian yang di laksanakan pada akhir unit program.

C. Model Evaluasi Program Pendidikan

Berikut ini diuraikan berbagai jenis evaluasi program yang sampai saat ini di gunakan.

1. CIIP (*Context Input Process Product*) merupakan salah satu evaulasi program yang dapat dapat dikatakan cukup

memadai. CIPP merupaka akronim dari *context evaluation, input evaluation, process evaluation,* dan *produk evaluation.*

2. Evaluasi konteks, meliputi analisis masalah yang berhubungan dengan lingkungan program yang dilaksanakan, yang secara khusus berpengaruh pada konteks masalah yang menjadi komponen dalam program.
3. Model kesenjangan (*discrepancy*). Evaluasi ini di kenal sebagai kesenjangan program. Kesenjangan program adalah keadaan antara yang di harapkan dalam rencana dan yang dihasilkan dalam pelaksanaan program.

   Langkah-langkah dalam Evaluasi Kesenjangan

   Langkah-langkah atau tahap-tahap yang di lalui dalam mengevaluasi kesenjangan adalah sebgai berikut:

   - Tahap penyusunan desain

     Dalam tahap ini di lakukan kegiatan:

     - Merumuskan tujuan program
     - Menyiapkan murid,staf,kelengkapan lain
     - Merumuskan standar dalam bentuk rumusan yang menunjuk pada suatu yangdapat diukur
   - Tahap penetapan kelengkapan program yaitu melihat apakah kelengkapan yang tersedia sudah sesuai dengan yang diperlukan atau belum.
   - Tahapan proses (*process*). Dalam tahapan ini diadakan evaluasi untuk melihat tujuan-tujuan yang sudah dicapai.
   - Tahapan pengukuran tujuan *(programecomparison*) yaitu tahap membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi masukan

Evaluasi ini meliputi pertimbangan tentang sumber dan strategi yang akan digunakan dalam upaya mencapai suatu program informasi-informasi yang terkumpul selama tahap evaluasi dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk menentukan sumber. Penilai masukan dapat mencari sumber tertentu apabila sumber-sumber yang telah ditetapkan terlalu mahal untuk dibeli atau tidak tersedia. Demikian juga, tenaga-tenaga yang dapat melaksanakan program dapat diperhitungkan sebagai sumber masukan.

Evaluasi masukan membutuhkan evaluator yang memiliki pengetahuan luas dan berbagai keterampilan. Pengetahuan tersebut bukan hanya tentang evaluasi saja, melainkan juga efektivitas program dan pengetahuan subtansi program.

5. Evaluasi Proses

Evaluasi ini meliputi evaluasi yang telah di tentukan (dirancang) dan diterapkan dalam praktik (proses). Seorang penilai preses mungkin disebut sebagai pemunitor sistem pengumpulan data dari pelaksanaan program sehari-hari. Minsalnya saja evaluator harus mencatat secara detael apa saja yang terjadi dalam pelaksaan program. Pomonitor harus menpunyai catatan harian dan perkembangan setiap langkah dalam pelaksanaan program. Tanpa hal tersebut, pengambil keputasan tidak dapat mennentukan tidak lanjut program apabila waktu berakhir telahtiba. Tugas lain adalah melihat catatan kejadian-kejadian yangmuncul selama berlangsung program tersebut dari waktu . Catatan itu berguna dalam menentukan kelemahan dan kekuatan atau menentukan paktor pendukung serta faktor pehambat program jika dikaitkan dengan keluaran yang di temukan.

Stufflebean mengemukakan pertanyaan-pertanyan sehubungan dengan evaluasi proses ini, yaitu:

- Apakah kegiatan program sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan?
- Apakah pelaksana sudah melakukan tugasnya sesuai dengan tugasnya?
- Komponen apa saja yang belum sesuai dengan racangan yang telah dibuat?
- Target komponen apa saja yang sulit dicapai dalam pelaksanaan program? Bagaimana solusinya?
- Perlukah para staf pelaksana diberi orientasi kembali mengenai mekanisme kegiatan program?
- Apakah fasilitas yang telah di sediakan oleh pengelola telah sesuai dengan kegunaan fungsinya? Kalu tidak, mengapa?
- Apakah fasiltas yang bahan penunjang lain telah di gunakan secara tepat?
- Hambatan-hambatan penting apakah yang di jumpai selama pelaksanaan program berlangsung dan perlu di atasi?

Untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Stufflebean mengajukan saran kepada penanggung jawab program agar setiap kali di adakan diskusi yang di ikuti oleh para staf pelaksana, para staf tersebut selalu sadar akan mekanisme program. Disamping itu hambatan-hambatan yang timbul selama dalam proses segera di indifikasi, dan sambil berjalan dapat di atasi dan di perbaiki.

6. Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil adalah evaluai yang di lakukan oleh penilai di dalam mengukur keberhasilan pencapain tujuan yang telah di kembangkan dan di administrasikan. Data yang di hasilkan akan sangat berguna bagi pengambil keputusan dalam menentukan apakah program di teruskan, di modifikasi, atau di hentikan?. Setiap bentuk evaluasi yang di jelaskan menekankan tiga tugas pokok, yaitu:

a. Membeberkan semua jenis informasi yang di perlukan oleh pengambil keputusan
b. Memperoleh informasi
c. Menyitesiskan informasi-informasi sedemikian rupa, sehingga secara maksimal dapat di manfaatkan oleh para pengambil keputusan.

Evaluasi hasil merupakan tahap terakhir di dalam jenis CIPP yang di kembangkan oleh Stuflebeam. Fungsinya adalah membantu penanggung jawab program dalam mengambil keputusan untuk meneruskan, memodifikasi, atau menghentikan program. Dalam evaluasi hasil dilihat perbandingan antara tujuan yang di tetapkan dalam rancangan dan hasil program di capai. Hasil yang di nilai dapat berupa skor tes, data, observasi, diagram, data, sosiometri, dan sebagainya yang masing-masing dapat di telusuri kaitannya dengan tujuan-tujuan yang lebih teperinci. Stuflebeam menyarankan beberapa pertanyaan berkenaan dengan evaluasi hasil sebagai berikut:

a. Tujuan-tujuan manakah yang sudah di capai
b. Apakah yang dapat dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara spesifikasi, prosedur dan hasil nyata dari kegiatan program

c. Kebutuhan individu manakah yang telah terpenuhi sebagai akibat dari kegiatan program?
d. Hasil jangka panjang apa yang tampak sebagai akibat dan kegiatan program?

Apabila tujuan program telah tercapai, ukurannya bergantung pada kriteria yang telah di tetapkan. Ada kriteria (tolak ukur) yang menggunakan 100% sebagai standar, adapula yang hanya 80%. Hal itu tergantung pada kepentingan setiap aspek yng di ukur misalnya kesulitan pencapaian, kesederhanaan aspek bagi program, dan sebagainya.

Evektivitas perlakuan yang di terapkan pada suatu program dapat di lihat dengan cara membandingkan rerata (mean) skor akhir kedua program untuk kelompok eksperimen dengan yang bukan. Untuk itu, mereka di sarankan untuk bertanya kepada ahlinya, walaupun hasil eksperimen menunjukkan adanya perbedaan antara kedua kelompok (yang dikenai eksperimen dan yang bukan), pengambil keputusan tidak dapat memutuskan untuk meneruskan, memodifikasi, atau menghentikan perlakuan tersebut. Faktor-faktor lain yang harus di ikut sertakan sebagai bahan pertimbangan misalnya, biaya yang harus di pikul oleh individu atau masyarakat, kemanfaatan (benefit) program yang baru dapat di lihat atau di nikmati setelah jangka waktu lama, dan pengambilan keputusan dalam jangka waktu yang relatif lama pula.

D. Desain Evaluasi

Sebelum melakukan desain evaluasi, terlebih dahulu di lakukan fokus evaluasi, yaitu mengkususkan apa dan bagaimana evaluasi akan di lakukan.apabila evaluasi sudah terfokus ini berarti proses dan desain dimulai. Ada tiga elemen dalam proses pemfokusan, yaitu: menpertemukan pengetahuan dan

harapan,mengumpulkan informasi, dan merumuskan rencana evaluasi.

Penyusunan desain evaluasi program merupakan langkah pertama dan menyangkut aspek perancanaan. Dalam tahap perancanaan ini di uraikan garis garis besar tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi tersebut . oleh karena itu,pelaksana evaluasi program harus menmahami seluk-beluk program yang di nilai.

Komponen-komponen evaluasi program adalah sebagai berikut:

1. Tujuan yang di tetapkan oleh pengambil keputusan dan diberi-taukan kepada pelaksana program
2. Kegiatan semua aktifitas yang untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, kegiatan harus relevan dengan tujuan
3. Sarana fasilitas penunjang kegiataan
4. Pelaksana kegiatan
5. Hasil keluaran sebagai akibat dari kegiatan

Efiktivitas program ditetunkan oleh sejauh mana hasil ini telah mendekati tujuan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut diperluka seorang evaluato dalam penyususunan desain evaluasi program.sebelum menyusun desain terlebih dahulu, evaluator harus mengetaui tugasnya. Secara garis besar ada tiga hal yang harus ditangani oleh seorang evaluator, yaitu sebagai berikut:

1. Keberhasilan pencapaian tujuan:

Hubungan antara tujuan dan hasil merupakan hal utama yang harus ditangani oleh seorang evaluator.ia harus memusat kan perhatian terhadap keberhasilan ini. Akan tetapi, evaluator tidak boleh terpaku terlalu erat dengantujuan. Hal ini karena beberapa program telah mencantum kan dengan jelas tujuan

yang ingin dicapai dengan jelas kegiatan nya dan ada pula yang tidak merumuskannya sama sekali. Pada kondisi ini, evaluator harus mencari informasi mengenai program tersebut.

2. Tujuan program, dirumuskan oleh pengembang program. Tujuan umum satu program akan dijadikan titik awal kegiatan evaluator dalam menyusun desain evaluasi
3. Proses yang terjadi dalam program, meliputi kegiatan, sarana penunjang dan personel pelaksana program. kegiatan menunjukan aktivitas yang diperhitungkan dari prosedur, teknik, dan proses lain yang berkaitan dengan sumber pencapain tujuan. Sarana biasanya terhujud pada peralatan, ruangan, biaya dan hal-hal lain yang diperhitungkan, anatara lain; apakah sarana yang digunakan sudah tepat? Apakah ada biaya diperhitungkan?

E. Langkah Penyusun Desain

Hal-Hal yang perlu dilaksanakan dalam penyusunan desain ,antara lain:

1. Latar belakang;
2. Problematika (yang akan dicari jawabannya);
3. Tujuan evaluasi;
4. Populasi dan sampel;
5. Instrumen dan sumber data;
6. Teknik analisis data

Langkah penyusunan instrumen

Langkah-Langkah yang harus dilalui dalam menyusun instrumen, adalah sebagaiberikut.

1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan istrumen yang akan disusun. Bagi para pemula, merumuskan tujuan seperti ini dianggap tidak lazim.

2. Menbuat kisi-kisi yang mencanangkan perincian variabel dan jenis instrumen yang akan digunakan untuk mengukur bagian variabel yang bersakutan.
3. Menbuat buktir-buktir istrumen. Diperlukan kesabaran dan ketelitian.

F. Kriteria Evaluator

Kriteria keberhasilan terutama bagi evaluator program adalah sebagai berikut.

1. Memahami Mated

   Yaitu memahami seluk-beluk program yang dievaluasi, antara lain:

   - Tujuan program yang telah ditentukan sebelum dimulai kegiatan
   - Komponen-komponen program
   - Variabel yang akan diujicobakan atau dilaksanakan
   - Jangka waktu dan dan penjadwalan kegiatan
   - Mekanisme pelaksanaan program
   - Pelaksanaan program
   - Sistem monitoring kegiatan program

2. Menguasai Teknik

   Yaitu menguasai cara-cara atau teknik yang digunakan dalam evaluasi program, karena kegiatan evaluasi program mencakup sejumlah evaluasi, evaluator program dituntut agar menguasai metodologi evaluasi, yaitu sebagai berikut:

   - Cara membuat perencanaan evaluasi
   - Teknik menentukan populasi dan sampel
   - Teknik menyusun instrumen
   - Prosedur dan teknik pengumpulan data

- Penguasaan teknik pengolahan data
- Cara menyusun laporan evaluasi.

3. Objektif dan Cermat

   Tim evaluator adalah sekelompok orang yang mengemban tugas mengevaluasi program serta ditopang oleh data yang dikumpulkan secara cermat dan objektif.

4. Jujur dan Dapat Dipercaya

   Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang evaluator dalam melasanakan tugas dan tanggung jawabnya secara tepat, yaitu sebagai berikut.

   - Evaluator hendaknya otonom
   - Ada hubungan baik dengan responden dalam arti dapat memahami watak, kebiasaan, dan cara hidup klien yang akan dijadikan sumber data evaluasi
   - Tanggap akan masalah politik dan sosial karena tujuan evaluasi adalah pengemban program
   - Evaluator berkualitas tinggi, yang mempunyai self concept yang tinggi, tidak mudah terombang-ambing
   - Menguasai teknik untuk membuat desain dan metodologi penelitian yang tepat untuk program yang dievaluasi
   - Bersikap terbuka terhadap kritik
   - Menyadari kekurangan dan keterbatasannya serta bersikap jujur
   - Bersikap pasrah kepada umum mengenai penemuan positif dan negatif
   - Bersedia menyebarluaskan hasil evaluasi

- Tidak mudah membuat kontrak. Evaluasi yang tidak memenuhi persyaratan yang telah disebutkan sebaiknya ditolak.

G. Benefit Monitoring and Evaluation (BME)

BME adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap suatu program atau proyek untuk mengetahui sejauh mana program atau proyek tersebut memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Salah satu pihak yang mempromosikannya adalah ADB (ASIAN DEVELOPMENT BANK). BME dimaksudkan untuk menghimpun berbagai informasi berkaitan dengan *impact* sebuah proyek dan atau nilai guna (benefit).

Ada tiga area kesulitan yang menurut Eric Diggest sering terjadi dalam supervisi dan pengendalian pada perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut.

1. Ukuran, pengalaman inventory, check list, hasil riset yang tak sepadan dapat melemahkan reliabilitas dan validitas
2. Trainee bidang konseling bebas untuk mengembangkan kemampuan konseling, tetapi tidak mendapat gelar akademik.
3. Para supervisor tidak dapat mengartikulasikan sasaran supervisi yang diinginkan oleh administratur pendidikan tinggi karena kurang menguasai teori supervisi.

Dalam bidang pendidikan, kegiatan BME telah banyak dilakukan di Indonesia, misalnya proyek pendidikan dasar atau Basic Education Project (BEP), baik di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah, dan di lingkungan departemen agama untuk tingkat madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah.

H. Ukuran-ukuran Nonteknis dalam Penilaian

Ada beberapa ukuran yang dapat dipergunakan untuk menilai perencanaan, baik untuk perencanaan pada umumnya maupun untuk perencanaan pendidikan. Pendapat pertama, dikemukakan ole Kawulusan (Vembriarto, 1988: 58) bahwa kriteria untuk menilai perencanaan, kebijaksanaan, langka-langkah atau tindakan adalah sebagai berikut.

1. Politically defencable, artinya bahwa perencanaan, kebijaksanaan, atau tindakan itu dipandang secara politik harus dapat dibela dan dipertahankan.
2. Socially atau culturally acceptable, artinya perrencanaan, kebijaksanaan, atau tindakan itu secara sosial dan kultural dapat diterima oleh masyarakat
3. Technically workable, artinya bahwa perencanaan, kebijaksanaan, atau tindakan itu secara teknik harus bisa dilaksanakan dan memiliki kesesuaian serta kesanggupan dalam proses penyelenggaraan sehinnga tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan yang berarti
4. Administratitravelly; managerally, organizationally practicable, artinya bahwa perencanaan, , kebijaksanaan, atau tindakan itu secara administratif, manajemen atau secara organisasi dapat diselenggarakan
5. Economically feasible, artinya perencanaan, kebijaksanaan, atau tindakan itu secara ekonomi haru bisa diukur kemanfaatannya.
6. Financially feasible, artinya perencanaan, kebijaksanaan, atau tindakan itu tidak menimbulkan hambatan pembiayaan.

7. Legally permissible, , artinya perencanaan, kebijaksanaan, atau tindakan harus mematuhi persyaratan-persyaratan hukum yang berlaku.

Pendapat kedua, dikemukakan oleh Sukadjat Prawiropranoto (Vembriarto, 1988: 58)) bahwa kriteria untuk menilai baik tidaknya perencanaan adalah sebagai berikut.

1. Feasibility test, artinya suatu rencana itu feasible atau tidak. Perencanaan yang tidak feasible tidak tergolong perencanaan yang baik
2. Consistency test, artinya perencanaan itu harus konsisten, yaitu adanya keselarasan perencanaan dengan bidang dan kehidupan sosial lainnya
3. Optimum allocation of resources, yaitu alokasi sumber-sumber secara minimum yang dicerminkan dalam perbandingan pembiayaan yang ideal sesuai dengan tujuan.

I. Langkah-Langkah dalam Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pendidikan

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (mengapa perlu evaluasi, apa saja yang hendak dievaluasi, tujuan evaluasi, teknikapa yang hendak dipakai, siapa yang hendak dievaluasi, kapan, dimana, penyusunan instrument, indikator, data apa saja yang hendak digali, dsb).
2. Pengumpulan data (tes, observasi, kuesioner, dan sebagainya sesuai dengan tujuan).
3. Verifiksi data (uji instrument, uji validitas, uji reliabilitas, dsb).
4. Pengolahan data (memaknai data yang terkumpul, kualitatif atau kuantitatif, apakah hendak di olah dengan

statistikatau non statistik, apakah dengan parametrik atau non parametrik, apakah dengan manual atau dengan software (misal : SAS, SPSS).

5. Penafsiran data, (ditafsirkan melalui berbagai teknik uji, diakhiri dengan uji hipotesis ditolak atau diterima, jika ditolak mengapa? Jika diterima mengapa? Berapa taraf signifikannya?) interpretasikan data tersebut secara berkesinambungan dengan tujuan evaluasi sehingga akan tampak hubungan sebab akibat. Apabila hubungan sebab akibat tersebut muncul maka akan lahir alternatif yang ditimbulkan oleh evaluasi itu.

Sedangkan teknik evaluasi pendidikan Secara garis besar, teknik evaluasi yang digunakan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu :

1. Teknik non tes Ada beberapa teknik non tes, yaitu : a. Skala bertingkat (rating scale), skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Seperti Oppenheim mengatakan ”rating gives a numerical value to some kind of judgement”,maka suatu skala disajikan dalam bentuk angka. Kita dapat menilai hampir segala sesuatu dengan skala.Bertujuan agar pencatatannya dapat objektif, maka penilaian terhadap penampilan atau penggambaran kepribadiaan seseorang disajikan dalam bentuk skala. b. Kuesioner (questionare), juga sering dikenal sebagai angket. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi orang yang akan diukur, (responden). Dengan kuesioner orang dapat diketahui tentang keadaan, data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, atau pendapatnya dan lain-lain. Kuesioner dapat ditinjau dari dua segi antara lain : a) Dari segi siapa yang menjawab : Ø Kuesioner langsung, jika

kuesioner tersebut dikirimkan dan diisi langsung oleh orang yang akan dimintai jawaban tentang dirinya. Ø Kuesioner tidak langsung, yang dikirimkan dan diisi oleh bukan orang yang bimintai keterangannya. Kuesioner tidak langsung biasanya digunakan untuk mencari informasi tentang bahan, anak, saudara, tetangga dan sebagainya. b) Dari segi cara menjawab dibedakan atas : Ø Kuesioner tertutup, kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban langkah sehingga pengisi hanya tinggal memberi tanda pada jawaban yang dipilih. Ø Kuesioner terbuka, adalah kuesioner yang disusun sedemikian rupa sehingga para pengisi bebas mengemukakan pendapatnya. Kuesioner terbuka disusun apabila jawaban pengisi belum terperinci dengan jelas sehingga jawabannya akan beranekaragam. Keterangan tentang alamat pengisi, tidak mungkin diberikan dengan cara memilih pilihan jawaban yang disediakan. Kuesioner terbuka juga digunakan untuk meminta pendapat seseorang. c. Daftar cocok (chek list), adalah deretan pernyataan (yang biasanya singkat-singkat) dimana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok ( ) ditempat yang sudah disediakan. d. Wawancara (interview), suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Dikatakan ssepihak karena dalam wawancara responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan hanya diajukan oleh subjek evaluasi. Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara : a) Wawancara bebas Responden mempunyai kebebasan mengutarakan pendapatnya. b) Wawancara terpimpin Dalam hal ini responden pada waktu menjawab pertanyaan tinggal memilih jawaban yang sudah dipersiapkan oleh penanya.[7] e. Pengamatan

(observation) suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap siswa dengan memperhatikan tingkah lakuya. Secara umum observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Menurut cara dan tujuannya observasi dapat dibedakan menjadi 3 macam: a) Obserfasi partisipatif dan non partisipatif Observasi partisipatif adalah observasi dimana orang yang mengobservasi (observer) ikut ambil bagian alam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diamatinya. Sedangkan observasi nonpartisipatif, observasi tidak mengambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objeknya. Atau evaluator berada "diluar garis" seolah-olah sebagai penonton belaka. Contoh observasi partisipatif : Misalnya guru mengamati setiap anak. Kalau observasi nonpartisipatif, guru hanya sebagai pengamat, dan tidak ikut bermain. b) Observasi sistematis dan observasi nonsitematis Observasi sistematis adalah observasi yang sebelum dilakukan, observer sudah mengatur sruktur yang berisi kategori atau kriteria, masalah yang akan diamati Sedangkan observasi nonsistematis yaitu apabila dalam pengamatan tidak terdapat stuktur ketegori yang akan diamati. Contoh observasi sistematis misalnya guru yang sedang mngamati anak-anak menanam bunga. Disini sebelum guru melaksanakan observasi sudah membuat kategori-kategori yang akan diamati, misalnya tentang: kerajinan, kesiapan, kedisiplinan, ketangkasan, kerjasama dan kebersihan. Kemudian ketegori-kategori itu dicocokkan dengan tingkah laku murid dalam menanam bunga.

Kalau observasi nonsistematis maka guru tidak membuat kategori-kategori diatas, tetapi langsung mengamati anak yang sedang menanam bunga. c) Observasi experimental Observasi eksperimental adalah observasi yang dilakukan secara nonpartisipatif tetapi sistematis.Tujuannya untuk mengetahui atau melihat perubahan, gejala-gejala sebagai akibat dari situasi yang sengaja diadakan.[8] f. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian kebiasaan dan sikap dari objek yang dimulai.

2. Teknik tes Definisi yang dikutip dari Webster's Collegiate "Test=any saries of questions or exercise or other means of measuring the skill, knowledge, capacities of aptitudes or an individual or group." Yang kurang lebih artinya : tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan, atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes ada tiga macam : a. Tes diagnostic, adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. b. Tes formatif, dari kata "form" yang merupakan dasar dari istilah "formatif" maka evaluasi formatif bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti sesuatu program tertentu. Dalam kedudukannya seperti ini tes formatif dapat juga dipandang sebagai tes diagnostic pada akhir pelajaran. Evaluasi formatif atau tes formatif diberikan pada akhir setiap program. Tes ini merupakan post-test

atau tes akhir proses. c. Tes sumatif, dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program atau sebuah program yang lebih besar. Dalam pengalaman di sekolah tes formatif dapat disamakan dengan ulangan harian, sedangkan tes sumatif ini dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada akhir catur wulan atau akhir semester

BAB VII

ALAT-ALAT DAN DATA-DATA DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PENDIDIKAN

A. Alat-alat Perencanaan Pendidikan

1. Akuntabilitas (Alat Utama Perencanaan Pendidikan)

Hampir sebagian orang mengatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu peningkatan rasa tanggung jawab, suatu yang lebih tinggi mutunya dari suatu tanggung jawab sehingga memuaskan atasan. Apabila tanggung jawab merupakan usaha agar apa yang dibebankan kepada kita bisa diselesaikan sebagaimana mestinya dalam waktu yang tepat pula, akuntabilitas harus lebih dari kewajiban seperti itu.

Karena itu, akuntabilitas berkaitan dengan perasaan puas semua pihak yang menaruh perhatian pada pendidikan. Mulai dari pihak siswa/mahasiswa yang diajar, pihak masyarakat, pihak atasan sampai dengan pihak yang memberi biaya pendidikan harus merasakan puas terhadap hasil pekerjaan petugas pendidikan bila pendidikan ingin mendapat predikat memiliki akuntabilitas.

Adapun penjelasan akuntabilitas menurt para ahli, yaitu:

a. Mc Ashan sebagai dikuti Made Pidarta, mengungkapkan akuntabilitas ialah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performannya menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawab.

b. Elliot mengatakan bahwa akuntabilitas adalah
   - Cocok atau sesuai dengan peranan yang diharapkan oleh orang lain
   - Menjelaskan dan mempertimbangkan kepada orang lain tentang keputusan dan tindakan yang diambilnya.

Dari berbagai pengertian akuntabilitas diatas, dapat dipahami bahwa elemen-elemen yang terkandung didalamnya, yaitu rasa puas dari pihak-pihak yang menaruh perhatian pada pendidikan, model kontrol/kontrak, model dialog, dan kriteria/ukuran.

Jadi, dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu keadaan performan para petugas pendidikan yang mampu bekerja dan memberikan hasil kerja yang tepat dengan kriteria yang sudah ditentukan bersama sehingga memberikan rasa puas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.Agar sesuai dengan akuntabilitas yang dianut, para petugas pendidikan perlu digembleng dan ditangani secara serius.

Untuk itu ada lima bagian atau manifestasi akuntabilitas yang harus diperhatikan sebagaimana pemikiran Scorvia D.Anderson yang dikutip Made Pidarta, yaitu:

a. Mengontrak performan
b. Memiliki kunci pembentuk arah
c. Ada unsur pemeriksaan
d. Ada jaminan pendidikan
e. Pemberian insentif

Tulisan Made Pidarta lebih lanjut dijelaskan bahwa akuntabilitas dalam pendidikan mencakup:

a. Program dan manajemen personalia yang mengarah pada tujuan
b. Penekanan manajemen yang efektif dan efesien
c. Pengembangan program, pengembangan personalia, peningkatan hubungan dengan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan manajemen.

Adapun pihak yang melakukan akuntabilitas adalah:

a. Guru
b. Administrator
c. Kelompok minoritas
d. Orang tua siswa
e. Ahli psikometri
f. Orang-orang luar lainnya

Adapun akuntabilitas ditujukan menurut ranking sebagai berikut:

a. Kemajuan para siswa
b. Pilihan program para siswa
c. Pemeriksaan oleh masyarakat/kontrol
d. Aktivitas ekstrakurikuler
e. Penyakit dan kemungkinan sakit siswa
f. Disiplin yang standar dan pakaian siswa
g. Materi pelajaran
h. Metode mengajar

2. Prosedur Menentukan Akuntabilitas

Morphet sebagaimana dikutip Made Pidarta, menyatakan langkah-langkah untuk menentukan akuntabilitas, yaitu:

a. Kembangkan kriteria performan untuk setiap program

b. Siapkan pemeriksa yang bebas untuk mengukur performan
c. Siapkan laporan kepada masyarakat tentang hasil pengukuran itu

Sementara itu Mc Ashan menyebutkan proses terjadinya akuntabilitas, yaitu:

a. Tujuan ditentuka secara jelas dan nyatakan siapa yang bertanggung jawab
b. Tujuan itu dijabarkan spesifik mungkin sehingga dapat diukur
c. Garis otoritas ditentukan
d. Kondisi tempat tanggung jawab ditentukan secara spesifik
e. Penilaian dilakukan untuk menentukan akuntabilitas seseorang.

Adapun, langkah-langkah yang ditenpuh untuk menentukan akuntabilitas seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Tentukan tujuan program yang dikerjakan
b. Program dioperasionalkan sehingga menimbulkan tujuan-tujuan yang spesifik
c. Kondisi tempat bekerja ditentukan
d. Otoritas atau kewenangan setiap petugas pendidikan ditentukan
e. Kriteria performan pelaksana yang dikontrak itu dibuat sejelas mungkin
f. Tentukan pengukur yang bersifat bebas
g. Pengukuran dilakukan sesuai dengan syarat pengukuran umumyang berlaku, yaitu secara insidental, berkala dan terakhir

h. Hasil pengukuran dilaporkan kepada orang-orang yang berkaitan akan pendidikan/pengontrak, seperti warga masyarakat, pemerintah dan para manajer/adminstrator pendidikan

Pelaksanaan atau pemanfaatan akuntabilitas dalam pendidikan dan perencanaan pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Kebutuhan dan tujuan program sesuai dengan lapangan kerja diidentifikasi dan program dioperasionalkan dengan tujuan-tujuan yang spesifik
b. Kriteria performan para petugas pendidikan dan para pelaksana implementasi perencanaan ditentukan
c. Pemeriksaan secara tepat tentang proses pendidikan dan implementasi perencanaan serta hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan rencana semula perlu diadakan
d. Mutu dan kuantitas pendidikan dalam lembaga termasuk perencanaan pendidikannya harus dijaga agar tidak sampai merosot, malah sedapat mungkin ditingkatkan
e. Insentif bukan hanya untuk membayar tenaga dan pikiran para pelaksana pendidikan dan para perencana, melainkan juga menghargai jasa-jasa mereka sebagai profesional

Lebih terperinci, Made Pidarta menjelaskan hal-hal yang relatif eksak dalam perencanaan pendidikan dengan dimanfaatkannya akuntabilitas ialah:

a. Tujuan atau performan yang ingin dicapai
b. Program atau tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan
c. Cara atau performan pelaksana dalam mengerjakan tugas

d. Alat dan metode yang sudah jelas, dana yang dipakai, dan lama bekerja yang semua telah tertuang dalam bentuk alternatif penyelesaian yang sudah eksak
e. Lingkungan tertentu tempat program dilaksanakan juga sudah ditentukan secara jelas lengkap dengan situasi dan kondisinya
f. Begitu pula insentif terhadap pelaksana juga sudah sudah ditentukan secara pasti

3. PERT, CPM dan Lain-lain sebagai Alat Perencanaan Pendidikan

Ada beberapa alat kontrol yang biasa dipakai dalam menilai perencanaan pendidikan dari awal sampai akhir. Alat-alat itu dalam tulisan Made Pidarta dikelompokkan menjadi empat bagian.

a. Alat-alat visual, seperti PERT (*Program Evaluation Review Technique*), CPM (*Critical Path Method*), peta *Gantt*, dan beberapa macam grafik
b. Komputer sangat berguna, terutama untuk mengontrol bujet
c. Laporan tertulis
d. Pertemuan staf yang dilakukan secara berkala

Pembuatan PERT sebagai salah satu bentuk jaringan kerja adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi tugas/aktivitas/kegiatan yang dicakup oleh perencanaan itu
b. Menentukan waktu penyelesaian untuk setiap tugas/kegiatan
c. Mengurutkan kegiatan-kegiatan itu menurut urutannya yang benar

CPM sebagai bentuk lain dari jaringan kerja memakai prinsip yang hampir sama dengan PERT. Perbedaannya ialah:

a. PERT berorientasi pada peristiwa, sedangkan CPM berorientasi pada kegiatan/aktivitas
b. PERT menggunakan kelonggaran waktu (tiga macam waktu), sedangkan CPM tidak menggunakan kelonggaran waktu seperti itu
c. PERT tidak membahas biaya sebaliknya waktu yang ditentukan CPM selalu dikaitkan dengan biayanya
d. Mengadakan perhitungan dengan rumus tertentu untuk mendapatkan apakah proyek/perencanaan itu fisibel atau tidak

4. Data Dasar

Data dasar atau *base line* data untuk perencanaan pendidikan mempunyai fungsi penting sebab tanpa data perencanaan atau *planners,* perencanaan pendidikan yang diperlukan tidak mungkin dapat dikembangkan. Karakteristik data yang diperlukan untuk penmgembangan perencanaan pendidikan yang multidisipliner. Data dasar yang diperlukan dapat dikelompokkan seperti berikut ini.

a. Kependudukan mencakup struktur penduduk, distribusi penduduk menurut daeah, pertumbuhan penduduk , populasi usia sekolah yang ada dalam sistem persekolahan dan berada diluar sistem dan struktur angkatan kerja berdasarkan kategori kerja dan pendidikan
b. Data ekonomi mencakup anggaran pendapatan dan belanja negara, GNP, *Revenue Sources,* tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi per tahun, serta jumlah dan kecendrungan investasi terhadap pendidikan

c. Kebijakan nasional yang merupakan keputusan politik mencakup falsafah dan tujuan nasional, keputusan badan legislatif negara yang harus menjadi pegangan upaya pembangunan untuk seluruh sektor dan falsafah pendidikan yang dianut
d. Data kependidikan mencakup *enrollment* untuk setiap jenjang dan jenis, personel pendidikan yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, lulusan, *drop out,* perpindahan, kenaikan dari kelas atau tingkat yang satu ke tingkat yang lain, kurikulum fasilitas pendidikan, dana pendidikan, manajemen, dan *output* pendidikan
e. Data ketenagakerjaan mencakup jumlah dan jenis *man power* yang diperlukan dalam setiap sektor pembangunan, persyaratan pekerjaan, kelompok jenis kerja yang langka dan lain-lain
f. Nilai dan sosial budaya mencakup agama dengan pemeluknya, sistem nilai yang berlaku dan dipegang oleh masyarakat, berbagai jenis dan bentuk kebudayaan yang ada atau mungkin yang dapat digali dan dikembangkan.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Pendekatan Rencana Pengumpulan Data

Dalam perencanaan pengumpulan data, tidak hanyan sekedar bagaimana mengumpulkan data yang diinginkan dalam suatu daftar, tetapi prosedur cara perolehan data, pengorganisasian dan cara memperbaharui data. Pengumpulan data ini harus dilaksanakan bahwa data tersedia pada waktu yang tepat dan pada saat pembuat keputusan.

Ada lima tahapan dalam sistem pengorganisasian data, yaitu:

a. Data dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem

b. Data diisikan atau ditempatkan di tempat penyimpanan data
c. Data diolah (dikemas) menurut aturan yang sudah ada
d. Data ditampilkan dalam bentuk yang dapat digunakan
e. Data dipindahkan dari satu titik ke dalam sistem titik yang lain sesuai dengan keperluannya.

2. Deskripsi Informasi Dan Data

Ada perbedaan antara informasi dan data. Informasi berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang didapat atau ditemukan dari observasi, membaca, dan berkomunikasi. Data adalah fakta sesuatu yang diketahui dalam bentuk-bentuk dasar untuk disimpulkan didokumentasikan, diedit, dan diperlakukan oleh setiap subjek dan siap untuk mendukung perencanaan dalam suatu cara yang objektif.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penggunaan angket atau kuesioner

Metode angket dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam jumlah banyak dengan waktu yang singkat. Keberhasilan metode ini sangat tergantung pada keahlian peneliti dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami, sehingga responden dapat mengetahui dan merasakan konteks permasalahan yang diteliti.

b. Interview atau wawancara

Metode interview dapat digunakan untuk mengumpulkan data dimana diperlukan adanya penjelasan langsung tentang konteks atau area penelitian kepada responden. Unsur subjektivitas dari data yang diperoleh merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Keberhasilan metode ini sangat tergantung pada keahlian dari pengumpulan

data dalam berkomunikasi dan dalam menyusun daftar pertanyaan sehingga dicapai fokus kata yang diperoleh.

Metode untuk meminimalisasikan kesalahan data di antaranya:

- Memonitor secara keseluruhan dan langsung
- Mempertimbangkan banyak kemungkinan, baik data primer maupun sekunder
- Memperhitungkan segala perubahan data yang terbaru

c. Studi kepustakaan

Kemampuan menganalisa dan mentafsirkan sebuah data tidak akan terlepas dari seberapa luaspengetahuan atau referensi yang dikuasai penulis. Untuk mempertajam analisis yang dilakukan maka sangat penting dilakukan studi kepustakaan atau bibliografi. Bibliografi dilakukan dengan menggali dan mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui penelaahan berbagai konsep atau teori yang dikemukakan para ahli, sehingga akan dapat mendukung pelaksanaan penelitian.

d. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi ditujukan sebagai sebuah upaya untuk melengkapi data yang terkumpul dengan dokumen-dokumen yang dapat memperkuat keakuratan data.

4. Tabulasi Data

Proses tabulasi data harus lebih akurat dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan adanya survei tahunan untuk riset dan penelitian yang ada guna mendapatkan data yang terbaru. Tabulasi data sangat diperlukan didalam perencanaan pendidikan untuk berbagai analisis data.

Adapun fungsi tabulasi data adalah sebagai berikut:

a. Membantu didalam menyederhanakan masalah dalam berkomunikasi antara sesama kelompok perencana
b. Memudahkan dalam menganalisis antara kelompok perencana
c. Sebagai perbandingan perkembangan pendidikan dari masa lalu, sekarang dan prediksi masa yang akan datang
d. Membantu mempermudah sistematika riset dan evaluasi didalam pendidikan

Tabulasi data dapat dibagi menjadi empat bagian besar:

a. Tabulasi data berdasarkan kondisi kependudukan

Ada beberapa karakteristik data kependudukan yang perlu diolah, yaitu:

- Struktur ekonomi dan sosial masyarakat, baik rencana perdagangan, daerah industri dan sebagainya
- Perkembangan sensus kependudukan
- Struktur fisik (tata ruang) dan sosial
- Pemetaan dan kondisi demografi merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam pengolahan data

b. Tabulasi data berdasarkan kondisi lokasi tempat

Data ini berhubungan dengan pola penggunaan bahan untuk kebutuhan manusia yang meliputi keperluan tempat tinggal, gedung-gedung, taman-taman dan lain-lain. Dengan adanya pengaturan pola penggunaan lahan di wilayah perkotaan maka akan dimudahkan dalam perumusan perencanaan pendidikan.

c. Tabulasi data berdasarkan migrasi

Komponen yang mempengaruhi perpindahan diantaranya kualitas, frekuensi, intensitas perpindahan, luas, metode perpindahan dan lama perpindahan.

Perpindahan merupakan hal yang penting antara lokasi aktivitas. Aktivitas bisa digambarkan oleh lokasi asal dan tujuan, seperti dari wilayah tempat tinggal ke wilayah dasar, dari wilayah regional ke wilayah perkotaan, dari wilayah tempat tinggal ke wilayah industri, dan sebagainya. Tipe data yang dibutuhkan dalam menganalisis wilayah perpindahan ini, yaitu waktu perjalanan dan kapasitasnya. Beberapa model perpindahan digunakan dalam perencanaan transportasi, di antarabya Model Gravity:

$$M_i = P_i \frac{A_{j.}\ F_{ij}\ .K_{ij}}{\sum A_{k.}\ F_{ik}\ K_{ik}}$$

Keterangan:

Perpindahan dari wilayah ke wilayah lain atau dari daerah asal ke daerah tujuan.

K= Digambarkan untuk semua wilayah yang di pelajari

M= Sejumlah perjalanan

P= Produksi pada wilayah

A= Daya tarik antarwilayah

K= Faktor penyesuaian terhadap tingkat sosial ekonomi

F= Pergeseran dari wilayah ke wilayah lain

d. Tabulasi data berdasarkan kondisi sistem ekonomi

Faktor ekonomi amat vital terhadap pendidikan, yakni harga dan tanah. Harga dan tanah sangat mempengaruhi posisi pemilihan seperti kedudukan sekolah. Nilai tanah di pengaruhi oleh ekonomi dasar dan tingkat kepuasan pelanggan. Ada dua alat yang digunakan untuk mengukur indikator tanah, yaitu luas tanah dan bangunan. Biasanya

tanah tanah untuk bisnis mempunyai nilai jual yang tinggi karena sebanding linier terhadap nilai bangunan. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap jarak ke pusat kota/ wilayah bisnias.

5. Pengukuran tidak langsung

Metode ini didasari pada aktivitas ekonomi secara tidak langsung. Indikatornya adalah kemauan untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Metode ini dengan mengasumsikan pada klasifikasi ekspor, impor dan lokal pekerja.Salah satu rumus untuk menghitung potensi pekerja, seperti pendidikan yang digunakan:

X merupakan potensi pekerja dengan asumsi keseragaman permintaan dan perhitungan indeks produktivitas. Artinya potensi pekerja berbanding terhadap nilai total pekerja lokal sekolah dengan pekerja nasional dalam pendidikan dan berbanding terbalik terhadap total pekerja nasional.

6. Pengukuran langsung

Salah satu metode pengukuran langsung menggunakan metode input-output. Metode ini didasari pada aktivitas ekonomi secara langsung dengan hubungan industri. Tujuannya adalah mengontrol tingkat pendidikan dengan menjaga konsistensi sehingga mengeleminasi pekerja antara lulusan dan kegagalan. *Input* metode ini adalah siswa yang masuk, guru, bangunan, material, keuangan, pekerja dan pembuat standar-standar sebagai undang-undang. *Output*-nya adalah lulusannya, tingkat *drop out*, pemeliharaan dan tingkat pelayanannya.

BAB VIII

PERENCANAAN PENDIDIKAN PADA MASA DEPAN

A. Faktor Reformasi

Era reformasi telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam berbagai kehidupan,termasuk kehidupan pendidikan. Salah satu perubahan mendasar adalah manajemen negara,yaitu dari manajemen berbasis pusat menjad manajemen berbasis daerah.secara resmi perubahan manajemen ini telah diwujudkan dalam bentuk undang-undang Republik Indonesia no.22 tahun 1999, yang kemudian direvisi dan disempurnakan menjadi undang-undang no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.pedoman pelaksanaanya pun telah dibuat melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia no 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom.

Logis dari undang-Kosenkuensi undang dan peraturan pemerintah tersebut adalah manajemen pendidikan harus disesuaikan jiwa dengan dan semangat otonom .Seperti yang dinyatakan oleh Azyumardi Azra (2002:xii) bahwa dengan era otonomi daerah: ‘’lembaga-lembaga pendidikan,seperti sekolah,madrasah pesantren, univeristas,(perguruan tinggi) dan lainnya yang terintegrasi dalam pendidikan nasional haruslah haruslah melakukan reorientasi, rekonstruksi kritis, restrukturisasi, dan reposisi serta berusaha untuk menerapkan paradigma baru pendidikan nasional”selain itu implementasi

kebijakan tersebut diharapkan berdampak positif terhadap kemajuan pendidikan di tingkat daerah dan tingkat satuan pendidkan.

Fiske (1996) menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman berbagai negara berkembang yang menerapkan otonomi di bidang pendidikan,otonomi berpotensi memunculkan masalah,seperti perbenturan kepentingan antara pemerintah pusan dan daerah,menurunkan mutu pendidikan,inefisiensi dalam pengelolaan pemerataan pendidikan,terbatasnya gerak dan ruang artisipasi masyarakat dalaam pendidikan,serta berkurangnya akuntabilitas pendidikan oleh pemerintahole serta meningkatnya akuntablitas pendidikan oleh masyarakat. Perencanaan yang baik merupakan dari kesuksesan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang telah diotonomikan di daerah.

Menurut Abdul madjid dalam tulisannya "pendidikan taikdplainning"(kedaulatan rakyat 2006),bahwa rendahnya mutu pendidikan kita disebabkan oleh belum komprehensifnya pendekatan perencanaan yang digunakan.perencanaan pendidikan hanya dijadikan faktor pelengkap atau dokumen 'tanpa makna'sehingga sering terjadi tujuan yang ditetapkan tidak tercapai secara optinal. Dalam tulisan Muhadjir Effendi, diuraikan bahwa pendidikan dalam pandangan klasik dikatakan sebagai institusi atau pranata yang dapat dijalankan 3 fungsi sekaligus,yaitu:

1. Menyiapkan generasi anak manusia agar kelak dapat memainkan peran perantertentu dalam masyarakat pada masa datang
2. Mentransfer pengetahuan,sikap dan kecakapan tertentu sesuai dengan peran yang diharapkan

3. Mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup masyarakat dan peradaban.

Verbiarto yang dinukilkan Muhadjir ,berpendapat bahwa pendidikan setidaknya harus menjalankan empat macam fungsi

1. Transmisi kultural, berupa pengetahuan, sikap, nila, dan norma.
2. Memilih dan mengajarkan peranan social
3. Menjamin integrasi sosial.
4. Mengadakan inovasi-inovasi sosial (syafi ma'rif,1991)

Cristoper J.Lucas(1979) mengemukakan,Pendidikan seharusnya menyimpan kekuatan luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup dan dapat memberikan informasi yang paling berharga mengenai pasangan hidup masa depan di dunia,serta mebantu peserta didik dalam mempersiapkan kebutuhan esensial untuk menghargai perubahan, pernyataan senada juga dikemukakan oleh Harorl G.shane.berpendapat bahwa:

1. Pendidikan dalah cara memperkenlkan peserta didik pada keputusan soal yang timbul.
2. Pendidikan adalah cara menanggulangi masalah sosial tertentu.
3. Pendidikan adalah cara menerima dan mengimplemasikan alternatif-alternatif baru.
4. Pendidikan adalah cara membimbing perkembangan manusia dan terdorong untuk memberikan konstribusi pada kebudayaan pada masa mendatang.

Untuk menuju perubahan,pendidikan diupayakan tidak semata-mata bersifat konsumtif,dalam pengertian pemuasan secara langsung atas kebutuhan dan keinginan yang bersifat sementara saja,tetapi sebagai berikut:

1. Upaya membantu kualitas iman yang aplikatif
2. Proses pembebasan dan proses pencerdasan
3. Proses menjunjung hak-hak anak.
4. Proses pemberdayaan potensi manusia
5. Upaya menjadika manusiademokratis dan membangun watak persatuan.
6. Upaya menghasilkan mansia yang cinta perdamaia dan peduli lingkungan.

Atas uraian tersebur, pendidikan perlu diorientasikan menjadi sebagai berikut:

1. Pendidkan berwawasan kemanusiaan. Pendidikan mempunyai peran strategis bagi kehidupan manusia ,baik dalam konteks sosiologi,maupun psikologis,dengan konsep fitrah,islam memandang pendidikan sebagai berikut.
2. Pendidikan harus diorientasikan pada upaya optimalisasi potensi dasar manusia secara keseluruhan.
3. Implikasi tentang pandangan kemanusiaan tersebut mengharuskan tujuan pendidikan masa depan yang diarahkan pada pencapaian pertumbuhan kepribadian manusia secara seimbang.
4. Terletak pada muatan materi metodologi pendidikan.
5. pendidikan yang mendorong pada peningkalah proses emanusiakan manusia dalam mebudaya kemanusiaan. manusia diciptakatan sumber daya manusia (SDA).

Salah satu fungsi pendidikan adan dalam keadaan fitrah, tepatnya potensi yang dimiliki setiap manusia bahwa siap menerima kondisi apa yang ada disekelilingnya dan mampu megnhadapi.

B. Faktor Sosial Budaya

Fenomena yang terjadi di di indonesia dewasa ini adalah perubahan stterus-menerus pada setiap lini kehidupan yang banyak menimbulkan pergeseran kultur maupun struktur di tengah masyarakat.Proses modernisasi dalam berbagai dimensi akan menimbulkan ekses sampingan bagi masyarakat,terutama lahirnya kecenderungan masyarakat pada hal-hal yang konsumtif,bersifat materialistik,. Hal tersebut terjadi karena masing-masing individu dituntut untuk memenuhi kebutuhan real sesuai dengan tuntutan pembangunan. Berikut ini merupakan ekses sampingan yang dialami oleh masyarakat yang sedang membangun.

1. Berkembangnya mass culture karena pengaruh kemajuan media massa, sehingga kultur tidak lagi bersifat lokal, tetapi bersifat nasional atau bahkan global
2. Menurunya sikap fatalistik dan meningkatnya sifat-sifat yang lebih mengakui kebebasan bertindak menuju perubahan masa depan.
3. Masyarakat industri juga akan ditandai oleh semakin meningkatnya sikap hidup materialistik.
4. Masyarakat industri juga ditandai oleh maraknya urbanisasi yang pesat.

Dalam pandangan Islam, pendidikan meupakan rekayasa insaniah yang berjalan secara sistematis yag di kembangkan dalam keutuhan manusia, sesuai dengan potensi fitrahnya. Dalam Q.S Lukman 1-34 intinya, pendidikan hendak memberi potensi fitrah keagamaan, menumbuhkan, mengelola, dan membentuk wwasan fitrah,akhlak serta tingkah laku sesuai dengan ajaran islam, menggerakkan dan menyadarkan manusia untuk senantiasa beramal saleh dalam rangka beribadah kepada Allah.

Dalam perumusan hakikat pendidikan, A.Malik Fadjar (1999) menawarkan "pendidikan idealistik" yakni pendidikan yang integralistik, humanistik, pragmatik, dan berakar budaya yang kuat. Pendidikan yang idealistik ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan integralistik;yakni mengandung komponen-komponen kehidupan yang meliputi tuhan, manusia,dan alam pada umunya sebagai suatu yang integral bagi terwujudnya kehidupan yang baik,serta pendidikan yang menganggap manusia sebagai sebuah pribadi jasmani-rohani, intelektual, perasaan, dan individu-sosial.
2. Pendidikan yang humanistik memndang manusia sebagai manusia, yakni makhluk ciptaan tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu.
3. Pendidikan yang pragmatik adalah pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yng selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan,memperta hankan,dan mengembangkan hidupnya.
4. Pendidikan yang berakar kuat,yakni pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akarsejarah,baik sejarah kemanusiaan pada umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa kelompok etnis tertentu.

Jika dirumuskan, proses pembentukan manusia seutuhnya, akan diwujudkan melalui pendidikan yang berorientasikan pada pengembangan sains, teknologi, dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan atau fitrah untuk membebaskan manusia dari belenggu serta mendapatkan pemahaman hakiki tentang fenomena atau misteri dibalik kehidupan nyata, guna memperoleh kebahagiaan yang abadi disisi Allah, berkomitmen dengan ilmu pengetahuan , serta senantiasa beramal saleh.

C. Faktor Globalisasi, Humanisasi, dan Demokratisasi

Proses informatisasi yang cepat karena kemajuan teknologi semakin membuat horizon kehidupan di planet dunia semakin meluas dan sekaligus dunia ini semakin mengerut. Hal ini berarti berbagai masalah kehidupan manusia menjadi masalah global. Pendidikan lingkungan dan kependudukan merupakan salah satu penunjang kearah kesadaran global ini. tingkat kecerdasan suatu bangsa yang yang rendah sukar untuk dapat meningkatkan tanggung jawabnya terhadap perbaikan kehidupannya sendiri, apalagi kehidupan global. Oleh karena itulah, dituntut adanya pendidikan yang berkualitas dan bukan hanya penguasaan pengetahuan dasar.

Kecenderungan lain yang mewarnai kehidupan umat manusia dewasa ini ialah ke arah dunia yang lebih mementingkan nilai-nilai kemanusiaan, baik dalam usahanya untuk pengaturan kehidupan politik maupun sosial ekonomi. Dibidang kesejahteraan misalnya, "The World Summit for Children" di PBB yang dihadiri oleh lebih 70 kepala negara pada akhir September 1990 menunjukkan tingginya kepedulian pemerintah sedunia untuk memperbaiki nasib anak-anak sebagai generasi penerus pada abad ke-21.

Gerakan humanisasi meminta reformasi yang mendasar dalam pendidikan, baik dalam metodologi belajar-mengajar

sampai kepada manjemen dan perencanaan pendidikan. Humanisasi kehidupan manusia berkaitan erat dengan gelombang demokratisasi kehidupan manusia pada akhir dekade 80-an. Perencanaan dan manajemen pendidikan dewasa di Indonesia mempunyai ciri yang masih sangat sentralistik dan birokratik, sesuai dengan kecendrungan umum dalam perencanaan dalam pembangunan nasional yang masih sangat sentralistik.

D. Faktor Kombinasi Pendekatan

Faktor ini merupakan faktor terakhir sebagai pelengkap dari berbagai faktor terhadap perencanaan pendidikan masa depan. Vembriarto (1988) mengemukakan tuntutan yang perlu di perhatikan bagi penyempurnaan perencanaan pendidikan pada masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

1. Menyentesiskan pendekatan (*social demand,manpower* dan *rate of return*) menjadi pendekatan yang utuh dan selaras
2. Usaha besar-besaran perlu di lakukan oleh semua sistem pendidikan untuk menyempurnakan arus informasi yang di perlukan bagi perencanaan pendidikan yang efektif
3. Adanya sejumlah besar kader yang berwenang dalam perencanaan pendidikan perlu di sebarkan di kalangan siapa saja yang berpartisipasi dalam perencanaan itu
4. Pengaturan-pengaturan organisasi dan administrasi, pola-pola sikap dan tingkah laku perlu diubah agar memungkinkan pelaksanaan perencanaan secara efektif

Selain itu, perencanaan pendidikan pada masa depan harus memuat lima buah persoalan pokok berikut.

1. *Perumusan tujuan* .Perumusan tujuan pendidikan dan penentuan prioritasnya sangat diperlukan untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan sistem pendidikan dan

menyusun perencanaan pendidikan. Perumusan tujuan pendidikan diperlukan sebagai kriteria untuk menguji kegiatan pelaksanaannya.

2. Evaluasi *terhadap pelaksaan sistem*. Perumusan tujuan pendidikan itu penting untuk : (a) Memberi arah kegiatan pendidikan, (b) Memberi dasar untuk mengecek kegiatan itu, (c) Memberi dasar untuk membandingkan alternatif dari berbagai cara untuk mencapai tujuan proses belajar yang khusus, sehingga berguna untuk menentukan cara yang paling efektif
3. Penggunaan *pendekatan sistem dalam penyusunan desain pendidikan*. Mengaplikasikan berpikir sistem dalam memecahkan suatu masalah
4. Gaya dan tindakan-tindakan manajemen yang baru, seperti *operation research, program butgetting* ,*cost analysis,* dan lain-lain
5. Penelitian dan pengembangan sistem pendidikan secara intensif

E. Pola Perencanaan Pendidikan Islam Seiring Paradigma Baru Pendidikan Islam

Pendidikan islam memiliki arah dan tujuan yang berbeda secara substansial. Secara esensial, pendidikan bertujuan untuk mendewasakan dan memberdayakan manusia secara utuh, terdapat titik perbedaan yang mendasar antara pendidikan secara umum dan pendidikan islam. Penulis rangkum dari tulisan Hujair A.H Sanaky bahwa pendidikan tidak bisa lepas dari akar dan kebudayaan suatu bangsa dan tentu saja norma yang dianutnya. Kita memerlukan suatu perubahan paradigma *(paradigma shift)* dari pendidikan untuk menghadapi proses globalisasi dan menata kembali kehidupan masyarakat

Indonesia. Arah perubahan paradigma pendidikan dari paradigma lama ke paradigma baru, terdapat di dalam berbagai aspek mendasar dari upaya perubahan tersebut.

Pertama, paradigma lama memperlihatkan upaya pendidikan lebih cendrung pada sentralistik, kebijakan lebih bersifat *top down,* orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat parsial, karena pendidikan didesain untuk sektor pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, serta teknologi perakitan.

Kedua, paradigma baru, orientasi pendidikan pada desentralistik, kebijakan pendidikan bersifat *bottom up,* orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat *holistik;* artinya pendidikan ditekankan pada pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, kemajemukan berpikir, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum. Kerangka acuan pemikiran dalam penataan dan pengembangan sistem pendidikan islam menuju masyarakat madani Indonesia, harus mampu mengakomodasikan berbagai pandangan secara selektif sehingga terdapat keterpaduan dalam konsep berikut.

1. Pendidikan harus membangun prinsip kesetaraan antara sektor pendidikan dengan sektor-sektor lain.
2. Pendidikan merupakan wahana pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan penciptaan dan pemeliharaan sumber yang berpengaruh, seperti keluarga, sekolah, media masa, dan dunia usaha.
3. Prinsip pemberdayaan masyarakat dengan segenap institusi sosial yang ada di dalamnya, terutama institusi yang dilekatkan dengan fungsi mendidik generasi penerus bangsa.

4. Prinsip kemandirian dalam pendidikan dan prinsip pemerataan menurut warga negara secara individual maupun kolektif untuk memiliki kemampuan bersaing dan sekaligus kemampuan bekerja sama.
5. Dalam kondisi masyarakt pluralistik diperlukan prinsip toleransi dan konsesus.
6. Prinsip perencanaan pendidikan. Pendidikan selalu dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dan melakukan upaya yang tepat secara normatif sesuai dengan cita-cita masyarakat madani Indonesia.
7. Prinsip rekonstruksionis, bahwa kondisi masyarakat selalu menghendaki perubahan mendasar.
8. Prinsip pendidikan berorientasi pada peserta didik. Dalam memberikan pelayanan pendidikan, sifa-sifat peserta didik yang umum ataupun yang spesifik harus menjadi pertimbangan.
9. Prinsip pendidikan multikultural. Sistem pendidikan harus memahami bahwa masyarakat yang dilayaninya bersifat plural, sehingga pluralisme harus menjadi acuan dalam mengembangkan pendidikan.
10. Pendidkan dengan prinsip global, artinya pendidikan harus berperan dan harus menyiapkan peserta didik dalam konstelasi masyarakat global.

Upaya membangun pendidikan Islam berwawasan global bukan persoalan mudah, karena pada waktu bersamaan, pendidkan islam harus memiliki kewajiban untuk melestarikan, menanamkan nilai-nilai ajaran islam dan pada piahk lain, berusaha untuk menanamkan karakter budaya nasional Indonesia dan budaya global. Upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana dan

strategis. Misalnya saja, bangsa jepang tetap merupakan satu contoh bangsa yang mengglobal dengan tanpa kehilangan karakternya sebagai suatu bangsa yang maju dengan tetap kenal dengan nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai religius.

Dengan paradigma baru, pendidikan islam harus mampu mengembangkan kemampuan dan tingkah laku manusia yang dapat menjawab tantangan internal maupun tantangan global menuju masyarakat madani. Pendidikan harus dikembangkan berdasarkan tuntutan acuan perubahan tersebut dan berdasarkan karakteristik masyarakat madani yang demokratis.

Dengan acuan ini, akan terjadi penggeseran paradigma pendidikan, sehingga kebijakan dan strategi pengembangan pendidikan perlu diletakkan untuk menangkap dan memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan tersebut. Pendidikan islam harus mulai membenah diri dengan menyusun strategi untuk dapat menyonsong dan dapat menjawab tantangan perubahan. Apabila tidak, pendidikan islam akan tertinggal dalam persaingan global. Dalam menyusun strategi untuk menjawab tantangan perubahan tersebut, paling tidak harus memperhatikan beberapa ciri berikut.

1. Pendidikan islam diupayakan lebih diorientasikan atau "lebih menekankan upaya proses pembelajaran [*learing*] daripada mengajar [*teaching*]
2. Pendidikan islam dapat "diorganisasi dalam suatu struktur yang lebih bersifat fleksibel".
3. Pendidikan islam dapat "memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri".

4. Pendidikan islam, "merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan" (Zamroni, 2000: 9.)

Paradigma baru pendidikan Islam disini adalah pemikiran yang harus terus-menerus dikembangkan melalui pendidikan untuk merebut kembali kepemimpinan iptek, sebagaiman zaman keemasan dahulu. Pencarian paradigma baru dalam pendidikan Islam dimulai dari konsep manusia menurut Islam, pandangan Islam terhadap iptek, dan dirumuskan konsep atau sistem pendidikan Islam secara utuh". Pendidikan Islam harus dikembangkan berdasarkan paradigma yang berorientasi sebagai berikut.

1. Filsafat *teocentris* dan *antroposentris* sekaligus. Pendidikan yang menghilangkan atau tidak ada dokotomi antara ilmu dean agama, serta ilmu tidak bebas nilai, tetapi bebas dinilai. Selain itu, mengajarkan agama dengan bahasa ilmu pengetahuan dan tidak hanya mengajarkan sisi tradisional, tetapi juga sisi rasional.
2. Pendidikan Islam mampu membangun keilmuan dan kemajuan kehidupan yang integratif antara nilai spiritual, moral, dan material bagi kehidupan manusia.
3. Pendidikan Islam mampu membangun kompetisi manusia dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik berupa manusia demokratis, kompetetif, inovatif berdasarkan nilai-nilai Islam.
4. Pendidikan Islam harus disusun atas dasar kondisi lingkungan masyarakat, baik kondisi masa kini maupun kondisi pada masa akan datang.

5. Pembaruan pendidikan Islam diupayakan untuk memberdayakan potensi umat yang disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat madani.
6. Penyelenggaraan pendidikan Islam harus diubah berdasarkan pendidikan demokratis dan pendidikan yang bersifat sentralistik, baik dalam manajemen maupun dalam penyusunan kurikulum, harus disesuaikan dengan tuntutan pendidikan demokratis dan desentralistik.
7. Pendidikan islam lebih menekankan dan diorientasiakan pada proses pembelajaran, diorganisasikan dalam struktur yang lebih bersifat fleksibel, menghargai dan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang, dan diupayakan sebagai proses berkesinambungan serta senantiasa berinteraksi dengan lingkungan.
8. Pendidikan Islam harus diarahkan pada dua dimensi. *Pertama*, dimensi dialektika (*horizontal)*, yaitu pendidikan hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya dan manusia harus mampu mengatasi tantangan dunia sekitarnya melalui pengembangan iptek.
9. Pendidikan Islam lebih diorientasikan pada upaya "pendidikan sebagai proses pembebasan, proses pencerdasan, proses menjunjung tinggi hak-hak anak, menghasilkan tindakan pendamaian, proses pemberdayaan potensi manusia, menjadikan anak berwawasan integratif, wahana membangun watak persatuan, menghasilkan manusia demokratis, menghasilkan manusia peduli terhadap lingkungan.

Pendidikan Islam harus berorientasi pada pembangunan dan pembaruan, pengembangan kreativitas, intelektualitas,

keterampilan, kecakapan penalaran yang dilandasi dengan "keluhuran moral" dan "kepribadian" sehinggan pendidikan Islam akan mampu mempertahankan relevansinya di tengah-tengah laju pembangunan dan pembaruan paradigma sekarang ini. Selain itu, pendidikan Islam akan melahirkan manusia yang belajar terus [*long life education*], mandiri, disiplin, terbuka, inovatif, mampu memecahkan dan menyelesaikan berbagai problem kehidupan, serta berdaya guna bagi kehidupan dirinya dan masyarakat.

BAB IX

PERATURAN DAN KEBIJAKKAN PERENCANAAN

A. Peraturan dan Kebijakan dalam Perencanaan

Perencanaan pendidikan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang terindependensi dengan kebijakan-kebijakan public lainnya. Fungsi dari setiap keputusan public jugadiintegrasikan dengan keputusan lainnya yang sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka. Secara politik,setiap keputusan pada tingkat tertentu akan melewati mekanisme konstitusi. Dalam hal ini fungsi legislative DPR/MPR sangat menentukan terhadap keputusan mengenai pendidikan secara keseluruhan baik pada tingkat makro maupun mikro, karena kebijakan pada tingkat yang lebih rendah harus berdasarkan kebijakan di tingkat yang lebih atas.

Proses perencanaan pendidikan di Indonesia di arahkan pada relevansi, efisiensi, dan efektifitas pendidikan, sehingga sasaran pendidikan akan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah digariskan. Hanya saja dalam tataran implenmentasi apa yang telah digariskan seringkali berbeda dengan kenyataan di lapangan, sehingga optimalisasi kinerja manajemen pendidikan belum berjalan sesuai dengan harapan.

Tujuan demokrasi yang dikehendaki masyarakat Indonesia saat ini sangat berpengaruh terhadap penerapan desentralisasi pendidikan sebagai wujud dari keinginan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Paradigma lama yang bersifat sentralisasi telah bergeser dengan lahirnya Undang-undang No.

22 tahun 1999, No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang memberikan kewenangan yang lebih luas pada provinsi, kabupaten dan kota untuk mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi yang dimilikinya.

B. Kebijakan

Kebijakan *(Policy)* seringkali disamakan dengan istilah seperti politik, program, keputusan, undang – undang, aturan, ketentuan – ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis. Sebenarnya dengan adanya definisi yang sama di kalangan pembuat kebijakan, ahli kebijakan, dan masyarakat yang mengetahui hal tersebut tidak akan menjadi sebuah masalah yang kaku. Namun, untuk lebih memperjelas bagi semua orang yang akan berkaitan dengan kebijakan, maka alangkah baiknya definisi policy haruslah dipahamkan.

Menurut *United Nations (1975), kebijakan* adalah suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktifitas – aktifitas tertentu atau suatu rencana. *Kebijakan* menurut *James E. Anderson (1978)* adalah perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sedangkan menurut *Prof. Heinz Eula dan Kenneth Prewith, kebijakan* adalah *a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitivines on the part of both those who make it and those who abide by it.*

C. Kebijakan Negara

Kemudian, mengenai kebijakan negara; di mana hal itu adalah sebuah konsep yang berlaku dalam sebuah Negara *(Nation),* maka berikut ini adalah dua definisi tentang kebijakan

negara. Menurut *W.I. Jenkins (1978), kebijakan negara* adalah *a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve.* (seperangkat keputusan – keputusan yang saling berhubungan antar satu sama lainnya yang dibuat oleh para pelaku politik (politisi) atau kelompok politisi menyangkut pemilihan tujuan dan orientasi pencapaian tujuan tersebut dalam situasi khusus di mana keputusan itu berada, secara prinsipil, berada dalam kekuasaan para politisi ini). Sedangkan *kebijakan negara* menurut *Chief J.O. Udouji (1981)* adalah *a sanctioned of action addressed to a particular problem or group of related problems that effect society at large.* (sebuah rangkaian keputusan dalam hal pelaksanaan yang ditujukan untuk sebagian masalah atau sekolompok masalah-masalah (yang saling berkaitan) di mana seluruh masalah itu mempengaruhi masyarakat banyak).

D. Kebijakan Pendidikan

Carte V. Good (1959) menyatakan, *Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assessment of situational factors, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives.*

Menurut pernyataan di atas, kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap *system* nilai dan faktor – faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga perencanaan umum panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang dinginkan bisa dicapai. Hal menarik lainnya dapat disimak dalam sebuah konstitusi Jepang, yakni undang – undang pendidikan yang ditetapkan

pada tahun 1947. Pokok – pokok undang – undang tersebut adalah:

1. Prinsip Legalisme
2. Prinsip Administrasi yang Demokratis
3. Prinsip Netralitas
4. Prinsip Penyesuaian dan Penetapan Kondisi Pendidikan
5. Prinsip Desentralisasi. (Research and Statistic Planning Division, Ministry of Education, Science, Sports and Culture of Japan, 2000).

Prinsip yang pertama menetapkan bahwa mekanisme pengelolaan diatur dengan undang – undang dan peraturan – peraturan. Sebelum Perang Dunai II masalah pendidikan diputuskan oleh Peraturan Kekaisaran dan pendapat parlemen sedangkan warga negara diabaikan. Namun, setelah reformasi pendidikan pasca perang urusan pendidikan diatur oleh undang – undang dan peraturan di parlemen. Prinsip kedua mengindikasikan bahwa system administrasi pendidikan harus dibangun berdasarkan consensus nasional dan mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam membuat formulasi kebijakan pendidikan dan prosesnya. Prinsip ketiga menjamin bahwa kewenangan pendidikan harus independen dan tidak dipengaruhi dan diinterfensi oleh kekuatan politik. Prinsip keempat mengindikasikan bahwa pemegang kewenangan pusat dan lokal mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua dengan menyediakan fasilitas – fasilitas pendidikan yang cukup untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip kelima menyatakan bahwa pendidikan harus dikelola berdasarkan otonomi pemerintah lokal karena pendidikan merupakan fungsi dari pemerintah lokal.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan yang legal – netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat.*

E. Kriteria Kebijakan Pendidikan

Kebijakan *pendidikan* memiliki karakteristik yang khusus, yakni :

1. Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan pendidikan, namun lebih khusus, bahwa kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

2. Memenuhi aspek legal – formal

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk semua wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah sehingga dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut dan dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

3. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

4. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur – unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

5. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itupun tentunya tidak lepas dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindak lanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadap kebijakan pendidikan tersebut secara mudah dan efektif.

6. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah system juga, oleh karena itu harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur. Sistematika itupun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan substansibilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hokum secara internal. Kemudian secara eksternalpun kebijakan pendidikan harus sepadu dengan kebijakan lainnya, seperti kebijakan politik, kebijakan moneter, bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau di sampingnya dan dibawahnya.

F. Anatomi Kebijakan Pendidikan Indonesia

Pada dasarnya bahwa kebijakan pendidikan pemerintah Indonesia 2004 – 2009 yang memiliki orientasi basis ekonomi sesuai dengan Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2005 – 2009 mengacu pada amanat UUD 1945, amandemen ke – 4 pasal 31 tentang Pendidikan; Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas); Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; PP Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP Nomor 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga; dan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan, baik di tingkat makro (nasional), tingkat messo (daerah), dan tingkat mikro (satuan pendidikan).

Keberadaan MPR RI sebagai sebuah lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan paling tinggi di Indonesia tentunya sangat mempengaruhi eksistensi dan prosesi pendidikan yang diharapkan memiliki standar mutu yang layak di dalam lingkungan masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Kemudian keberadaan DPR, DPD dan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden yang dibantu oleh wakil presiden, jajaran kementerian, dan jajaran badan / lembaga

kelengkapan eksekutif Negara adalah para pembuat kebijakan yang bisa mempengaruhi dunia pendidikan Indonesia.

Namun khususnya pada tingkat makro, para pengambil keputusan khusus masalah pendidikan di tingkat DPR RI adalah Komisi X, Presiden RI, dan Menteri Pendidikan Nasional RI selaku pemimpin Departemen Pendidikan Nasional. Sehingga segala bentuk kebijakan pendidikan nasional yang dihasilkan oleh ketiga elemen ini akan mempengaruhi kebijakan pendidikan di seluruh daerah dan seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Adapun dengan peran pengambil kebijakan yang bisa mempengaruhi masalah pendidikan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda). Khususnya dalam masalah pendidikan, posisi Komisi E di DPRD dan Dinas Pendidikan di Pemda sangat berperan untuk menfasilitasi adanya pemberlakuan kebijakan pendidikan di daerahnya masing – masing yang didasari oleh peraturan perundang – undangan dari hasil permusyawaratan policy maker nasional.

Akhirnya, keberadaan satuan pendidikanpun tidak kalah pentingnya untuk membuat kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi fenomena pendidikan yang berlangsung di satuan pendidikannya masing – masing.

G. Kebijakan Departemen Agaama Terhadap Pendidikan

Kebijakan yang dilakukan oleh Departemen Agama dalam pembinaan Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda) dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pemerataan pendidikan, diarahkan untuk menunjang penuntasan wajib belajar 9 tahun (Wajar 9 tahun).

2. Peningkatan Mutu Pendidikan diseluruh jenjang pendidikan, baik ditingkat MI maupun MTs dan sertapeningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam disekolah Umum.
3. Efektifitas dan efisiensi artinya penyelenggaraan pendidikan benar-benar dapat Mencapai tujuan pendidikan yang maksimal dengan memanfaatkan biaya yang minimal.

Adapun dalam bentuk pengembangan dan pemberdayaannya adalah dengan terus melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pendidik. Dalam kacamata Departemen Agama setidaknya ada empat kompetensi pokok yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidik. Pertama, kompetensi keilmuan, Kedua, kompetensi keterampilan mengkomunikasikan ilmunya kepada peserta didik. Ketiga, kompetensi manjerial dan keempat adalah kompetensi moral akademik dimana ia mesti menjadi contoh panutan bagi anak didik dan masyarakat. Jika pengembangan dan pemberdayaan dilakukan sesuai dengan perencanaan sistem pendidikan dan menggunakan pendekatan system maka, akan mendapatkan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Menyeimbangkan ketidaktentuan
2. Meningkatkan penghematan operasi-operasi
3. Memusatkan diri dari tujuan
4. Menyediakan fasilitas bagi control.

Selain dari masalah pendidik juga dilakukan pemberdayaan sarana dan fasilitas,pengkajian kurikulum yang selama ini dianggap masalah yang tak pernah kunjung selesai. Selain itu, pembinaan bersifat struktural dan kultural. Tampaknya secara kultural Depag masih mengalami kendala yang sangat serius dimana umat Islam dan masyarakat luas belum memberikan

sepenuhnya kepercayaan kepada sekolah di lingkungan Depag dengan asumsi bahwa pendidikan di lingkungan agama kurang berbobot. Tantangan ini memang cukup menarik, tapi dengan semangat yang tidak kunjung menyerah Depag terus melakukan upaya-upaya dan terobosan terus-menerus.

H. Penerapan Perencanaan dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pelaksaan di lapangan dalam rangka menyambut desentralisasi di bidang pendidikan salah satunya, adalah penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Selama ini sekolah selama ini sekolah yang dikontrol secara ketat oleh pusat menjadi lebih leluasa bergerak dalam mengelolah sumber dayanya, sehingga mutu dapat ditingkatkan. Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar tersebut disamping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tututan masyarakat, juga sebagai sarana peningkatan efisiensi pendidikan.

Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.

1. Peningkatan efiensi diperoleh melalui keleluasan mengelolah sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi.
2. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif.
3. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat (stakeholders), terutama yang mampu dan peduli terhadap masalah pendidikan.

Manajemen merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Dalam kerangka inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya MBS yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan dan pembelajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber daya manusia serta sarana lainnya dalam rangka membantu proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah.

Implikasi desentralisasi manajemen pendidikan adalah pemberian kewenangan yang lebih besar diberikan kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Perubahan kelembagaan untuk memenuhi dan meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam perencanaan dan pelaksanaan serta memberdayakan sumber daya manusia yang menekankan pada profesionalisme. Pelaksanaan MBS memerlukan upaya penyelarasan, sehingga pelaksanaan berbagai komponen sekolah tidak tumpang tindih, saling lempar tugas dan tanggung jawab. Dengan begitu tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif efisien, dan relavan dengan keperluaannya.

Lahirnya kebijakan yang berhungan dengan implementasi MBS juga didasari oleh hasil laporan Bank Dunia(1998), bahwa terdapat beberapa kendala institusional dalam pembangunan pendidikan, khususnya pada tingkat pendidikan dasar di Indonesia, yaitu:

1. Institusi pemerintah yang mengelolah pendidikan dasar sangat rumit dan kurang terkoordinasi, yaitu antara Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negri, dan Departemen Agama.

2. Pengelolaan SMP di luar sekolah keagamaan seperti Madrasah Tsanawiyah berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, sehingga terjadi tanggung jawab ganda, di mata pihak sekolah, kebijakan pada jenjang SMP masih sangat sentralistik, sementara instansi vertical di daerah hanya sekedar melaksanakan petunjuk pusat.
3. Angaran pendidikan nasional dikelola secara kaku dan terkotak-kotak, baik jenis anggarannya maupun instansi yang menanganinya yaitu Departemen Keuangan, Departemen Pendidikan Nasioanal, dan Departemen Dalam Negri.
4. Manajemen pada tingkat sekolah belum efektif, karena para pemimpin/manajemen sekolah hanya berperan sebagai pelaksana tugas operasional belaka dan tidak berwenang membuat kebijakan yang diperlukannya.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk *mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran* agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pernyataan itu diamanatkan UUSP Nomor 20 tahun 2003. Perhatian yang t ercurah pada amanat itu demikian besar. Dalam kondisi pada semua bidang orang-orang bersaing, tentu penyelenggara sekolah berharap agar sekolah yang dikelolanya dapat mencapai derajat kebaikan sesuai dengan karakter yang dinyatakan undang-undang. Harapannya tercermin pula pada visi dan misi serta tujuan sekolah. Pada programnya ditetapkan kriteria yang menandai tercapainya tujuan. Sekolah yang bertanggung jawab menentukan alat evaluasi dan melaksanakan pengukuran. Hasil evaluasi mereka olah untuk menunjukkan

hasil kinerja penyelenggara sekolah. Jika mencapai target yang diharapkan, maka mereka dinyatakan efektif. Efektif artinya mencapai target mutu sebagaimana yang ditetapkan dalam program.

Penyelenggara mengharapkan agar sekolah yang dibinanya lebih unggul daripada sekolah lain. Keunggulan itu ditunjukkan dengan prestasi siswa yang meraih nilai sempurna pada mata pelajaran tertentu dalam ujian, misalnya, meraih nilai 10, siswa meraih hasil ujian akhir yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, nilai rata-rata hasil ujian sekolah lebih baik daripada sekolah sewilayah, siswa memenangkan perlombaan bidang akademik atau nonakademik, siswa menguasai ilmu dan mengamalkan agama lebih baik daripada di sekolah lain, siswa meningkatkan daya baca dan kemampuan mengekspresikan pikiran dalam bentuk tulisan lebih baik daripada pengusaan siswa sekolah lain. Harapan seperti itu sekolah tetapkan sebagai penanda atau indikator keberhasilannya.

Menurut A. Wiley Imprint (2002) jika kita tidak menggunakan standar, maka cara yang dapat digunakan untuk menentukan mutu adalah dengan cara mengevaluasi kinerja belajar siswa melalui dua altertinatif. Pertama, membandingkan mutu kinerja belajar terhadap tujuan. Kedua, membandingkan mutu kinerja belajar siswa dengan siswa yang lain.

Wiley menjelaskan lebih lanjut bahwa dengan tidak menggunakan standar, maka membandingkan siswa merupakan langkah realisitik dan jelas lalu melihatnya dalam sebaran kurva normal atau distribusi normal. Menurut Wiley hal ini tentu di samping sulit melakukannya, juga belum tentu akurat dan tidak adil. Jika seseorang siswa dinyatakan cakap maka kecakapannya harus dibandingkan dengan kecakapan siswa yang lain. Ini tentu sekali lagi tidak mudah.

Dengan menggunakan standar para guru dapat mudah menyatakan bahwa jika 85% siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) maka pembelajaran secara klasikal dinyatakan tuntas. Jadi, standar memudahkan guru dan pimpinan sekolah menyatakan berhasil atau belum berhasil dalam mencapai derajat mutu.

Apakah Standar?

Standar adalah kriteria minimal, batasan ini terdapat dalam UUSPN Nomor 20 tahun 2003. Pernyataan singkat itu belum memberikan gambaran yang jelas.

Gambaran yang lebih luas dikemukakan Wiley dalam bukunya The Leader's Guide to Standar yang menyatakan bahwa:

1. **Standar adalah aturan main**, perhatikan anak-anak yang ceria bermain congklak. Tiba-tiba seorang anak berteriak "kamu bohong!". Permainan berhenti karena ada yang tidak jujur, permainan tidak memenuhi standar. Degnan demikian standar itu bukan sesuatu yang baru, melainkan telah melekat dalam kehidupan termasuk dalam permainan anak-anak.
2. **Standar itu** sedang-**sedang saja (mediocity),** menerapkan stnandar berarti bukan menetapkan kriteria yang paling unggul.
3. Standar **itu konsistensi**, jika anda gunakan standar berarti anda menetapkan harapan. Menerapkan standar berarti ajeg dalam harapan yang ditetapkan dan berusaha mewujudkannya.
4. **Standar itu nilai tambah**, jaka anda menerapkan standar maka harus fokus pada prioritas. Kolaborasi pendidik dan

tenaga kependidikan harus fokus pada memenuhi kriteria yang ditetapkan.

5. **Standar itu kejujuran kepada publik**, dengan menerapkan standar sekolah apabila kita menyatakan bahwa dalam mata pelajaran matematika "siswa memenuhi standar" maka itu berarti kita telah memenuhi kewajiban dan dengan jujur menyampaikan kepada publik. Menerapkan standar berarti melaksanakan tugas dengan mendeskripsikan harapan dengan tepat dan memenuhi harapan sebagai penunaian kewajiban.
6. **Standar itu efektivitas**, memenuhi standar artinya menehi kriteria mutu yang telah ditetapkan dalam tujuan.

Hal penting lain yang diperlukan dalam menerapkan standar adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana yang jujur dan objektif
2. Patokannya ditetapkan secara kooperatif melalui kesepakatan.
3. Efektivitasnya diukur dengan instrumen evaluasi sehinga dapat diketahui hasilnya melebihi, memenuhi, atau belum memenuhi standar.
4. Penerapan standar ditentukan oleh kualitas pengujian untuk menghasilkan data yang akurat.

Definisi di atas menyadarkan bahwa penerapan standar memerlukan orang yang jujur dan objektif, penerapan kriteria yang terukur, bagian dari upaya peningkatan dan pemenuhan kriteria mutu, akuntabilitas pemenuhan kewajiban yang dibuktikan dengan data dari hasil pengujian, maka dapat kita menyatakan bahwa penerapan standar itu merupakan penerapan model manajemen saintifik.

Pada sisi lain urian memandu kita untuk menentukan unsur yang sangat penting yaitu meningkatkan penguasaan dalam menentukan indikator dan kriteria keberhasilan. Sekolah perlu memilih dan menetukan indikator dan kriteria keberhasil pengelolaan sekolah, pengelolaan kelas, keberhasilan kepala sekolah, guru, dan siswa.

Standar adalah Kriteria Sistem Pendidikan

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.Berdasarkan definisi yang ditegaskan dalam USPN bahwa standar itu berkaitan dengan penetapan kriteria minimal tentang sistem pendidikan. Oleh karena itu dalam penerapan standar perlu didukung dengan pemahaman tentang makna sistem pendidikan.Sistem adalah sekelompok komponen yang terintegrasi, yang saling berhubungan, dan menunjukkan hubungan fungsional satu sama lain dalam kesatuan yang kompleks. Sistem meliputi komponen input, proses, dan output. Seluruh komponen dalam sistem bertransformasi dari input, proses, hingga menjadi output dalam bentuk siklus (Leigh Stelzer, 2010,

Pendekatan sistem merupakan model yang tepat untuk menganalisis kompleksitas keterkaitan komponen organisasi yang saling berkaitan. Setiap komponen yang diletakandalam sistem dapat dengan mudah diperhitungkan dengan cara membandingkan selisih nilai *input* dan *output* sehingga dapat mencerminkan efektivitas kinerja.

BAB X

VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

A. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Pada hakekatnya merumuskan dan menetapkan visi organisasi adalah menggali gambaran, keinginan dan cita-cita bersama mengenai masa depan organisasi berupa kondisi, peranan dan cita-cita yang ingin diwujudkan atau peranan yang ingin dilaksanakan yang merupakan komitmen seluruh anggota organisasi tanpa adanya rasa terpaksa atau karena ditekan oleh pimpinan. Visi adalah model masa depan organisasi, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama, diyakini dan didukung oleh seluruh anggota organisasi.

Visi pada hakekatnya adalah model masa depan organisasi yang menjadi komitmen dan milik bersama seluruh anggota organisasi. Rumusan visi merupakan kristalisasi dari rumusan tugas satuan organisasi. Visi juga diartikan sebagai cara pandang jauh ke depan atau gambaran (*dream*) yang menantang (ideal) tentang keadaan masa depan ke mana dan bagaimana organisasi diarahkan agar dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta berisi cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Visi merupakan keinginan dan pernyataan moral yang menjadi dasar atau rujukan dalam menentukan arah dan kebijakan pimpinan dalam membawa gerak langkah organisasi

menuju masa depan yang lebih baik, sehingga eksistensi/ keberadaan organisasi dapat diakui oleh masyarakat. Dalam konteks organisasi (instansi) pemerintah visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan kepemerintahan, sehingga instansi pemerintah dapat bergerak menuju masa depan yang lebih baik.

Menurut Akdon Visi merupakan gambaran tentang masa depan (future) yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Lanjutnya Visi adalah pernyataan yang merupakan sarana untuk: Mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok, Memperlihatkan *framework* hubungan antara organisasi dengan *stakeholders* (sumber daya manusia organisasi, konsumen/*citizen*, pihak lain yang terkait), Menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Pernyataan visi, baik yang tertulis atau diucapkan perlu ditafsirkan dengan baik, tidak mengandung multi makna sehingga dapat menjadi acuan yang mempersatukan semua pihak dalam sebuah organisasi.

Syaiful Sagala menjelaskan bahwa visi merupakan suatu proses yang menggambarkan serangkaian kegiatan perencanaan dan penetapan sasaran dalam aktivitas organisasi seperti satuan pendidikan masing-masing. Visi bagi lembaga pendidikan dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan, untuk itu visi yang dimaksud adalah model masa depan organisasi yang menjadi komitmen dan milik bersama seluruh anggota organisasi. Jika kita persempit kembali, visi dalam lembaga pendidikan Islam Visi pendidikan Islam sesungguhnya melekat pada visi ajaran islam itu sendiri yang terkait dengan visi kerasulan

yaitu membangun sebuah kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah, sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surat Al 'Ankabut ayat 16 sebagai berikut:

Artinya: dan (ingatlah) Ibrahim, ketika ia berkata kepada kaumnya: "Sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepada-Nya. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang dihimpun dari berbagai fenomena sosial, tuntutan masyarakat, dan harapan pengambil kebijakan. Visi Makro Pendidikan Nasional adalah menunjang trasformasi menuju Indonesia baru sebagai *masyarakat madani* yang ditandai oleh suatu system kehidupan baru sesuai dengan jiwa Proklamasi RI.

Pendidikan sebagai lembaga yang menangani sumber daya manusia dipandang sebagai investasi yang tepat untuk membentuk masyarakat madani. Masyarakat Indonesia memiliki sikap dan wawasan keimanan dan akhlak yang tinggi. kemerdekaan demokrasi, toleransi kemanusiaan yang tinggi dan memiliki wawasan global.

Visi Makro Pendidikan Nasional adalah terwujudnya *individu* manusia Indonesia baru yang memiliki sikap dan wawasan kebangsaan yang beriman dan berakhlak tinggi hak asasi manusia, bersikap sportif dan kompetitif, dan saling pengetian dan berwawasan global.

2. Misi

Misi adalah aspirasi yang akan dijadikan elemen fundamental dalam pandangan organisasi dengan alasan yang jelas dan konsisten dengan nilai-nilai organisasi yang telah disepakati secara bersama. Misi merupakan rangkaian

kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi lembaga pendidikan sebagai organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh komponen lembaga pendidikan kepada *stakeholder*, baik berupa *in-put* ataupun *out-put*. Pernyataan misi merupakan sebuah kompas yang membantu untuk menemukan arah dan menunjukkan jalan yang tepat dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Tujuan dari pernyataan misi adalah mengkomunikasikan kepada *stakeholder*, di dalam maupun luar lembaga pendidikan sebagai organisasi, tentang alasan pendirian lembaga pendidikan dan ke arah mana lembaga pendidikan akan menuju. Oleh karena itu, rangkaian kalimat dalam misi sebaiknya dinyatakan dalam satu bahasa dan komitmen yang dapat dimengerti dan dirasakan relevansinya oleh semua pihak yang terkait.

Berdasarkan definisi yang telah dituangkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi lebih lanjut dapat dikatakan sebagai langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan efektif dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Selanjutnya visi dan misi merupakan suatu proses yang menggambarkan serangkaian kegiatan perencanaan dan penetapan sasaran yang mengandung cita-cita, nilai, semangat dan inovasi dalam menyelenggarakan program pendidikan di daerah.

Setelah visi dan misi dalam sebuah organisasi dalam hal ini adalah lembaga pendidikan, maka lembaga tersebut perlu kembali merumuskan tujuan lembaga pendidikan secara terperinci dengan mengacu pada visi dan misi yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan sebuah organisasi dalam pendidikan adalah target spesifik yang ingin dicapai dari suatu

tindakan dengan mendorong partisipasi aktif setiap personel dalam menetapkan sasaran yang tinggi dan realistis.

Misi adalah rumusan umum mengenai tindakan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi adalah keseluruhan kegiatan produk, suatu jasa yang diselesaikan, atau suatu perubahan didalam kondisi sesuatu atau seseorag harus terpenuhi.Misi juga memuat identifikasi strategi yang memungkinkan dan alat yang disediakan untuk mencapai setiap kebutuhan penampilan atau kelompok kebutuhan penampilan masing-masing untuk seleksi akhir dalam langkah pendekatan system lainnya.

Ada 2 unsur yang perlu dipahami dalm suatu misi yaitu sasaran misi dan profil misi. Berikit uraiannya:

a. Sasaran Misi

Sasaran Misi adalah suatu pernyataan tepat tentang terminology pencapaian pemenuhan persyaratan hasil suatu misi. Tujuan penyusunan suatu sasaran misi adalah untuk menterjemahkan tujuan seperti itu ke dalam yang terukur.

Muatan misi untuk suatu perencanaan bidang pendidikan meliputi 3 pilar pendidikan, yaitu:

- Perluasan akses.
- Peningkata mutu dan relefansi.
- Akuntabilitas.

Suatu misi sasarannya harus menyatakan denga tepat kondisi-kondisi akhir, yaitu:

- Kegiatan yang dilaksanakan menggambarkan penyelesaian.
- Orang yang melaksanakan.

- Syarat hasil yang dicapai.
- Ukuran yang akan digunakan untuk menentukan hasil yang telah dapat dicapai.

Hasil yang terakhir pemenuhan suatu misi adalah ciptaan suatu produk atau prestasi hasil yang terukur secara spesifik. Kebutuhan hasil pencapaian untuk misi menyediakan spesifikasi yang tepat, sukses atau kegagalaan misi mungkin dapat terukur yang meliputi sebagai berikut:

- Spesifikasi yang menyatakan ukuran-ukuran yang sukses terminal misi sasaran mungkin akan kelihatan seperti benar-benar terjadi.
- Spesifikasi yang menyatakan konteks atau "peraturan gelanggang" dimana produk untuk diproduksi, seprti lingkungan, biaya-biaya, personil, dan lain-lain yang diberi.

Tanpa memasang kebutuhan pencapaian, suatu sasaran misi jarang tersedia ukuran untuk evaluasi. Hal itu tidak akan memberi perencana bidang pendidikan informasi yang diperlukan untuk memperoleh suatu relevansi dan rencana praktis untuk menuju keberhasilan sasaran dan kebutuhan pencapaian yang dihubungkannya. Sasaran misi dan kebutuhan pencapaian bersama-sama menyediakan referensi dan spesifikasi untuk analisis system.

b. Profil Misi

Kedua unsur analisi misi adalah profil misi. Dalam kata lain, profil misi dalah suatu fungsi statemen yang dilakukan sesuai mereka. Ada 4 langkah untuk mengetahui profil misi, yaitu:

- Memperoleh sasaran misi dan kebutuhan pencapaian yang diceritakan diatas tadi, maka kita sudah menyelesaikan misi.
- Terlebih dahulu kita harus tahu fungsi utama dalam misi profil. Kemudian pertanyaannya adalah,"apa langkah logis berikutnya yangdapat diambil?" Fungsi berikutnya mengenal dan mendaftar. Dalam proses ini bahwa seseorang telah bergerak dari permulaan fungsi profil misi sampai fungsi akhir diperlukan untuk mencapai sasaran misi dan kebutuhan pencapaiannya.
- Ketika sumua fungsi yang utama dalam misi profil telah dikenali, mereka diperiksa kembali melawan terhadap kebutuhan, sasaran misi, dan kebutuhan pencapaian dalam rangka meyakinkan konsistensi internal diantara fungsi dan kebenaran eksternal berdasarkan kepada kebutuhan.
- Ketika konsistensi internal telah ditentukan, setelah itu menyusun fungsi di dalan suatu empat persegi panjang rapi atau bujur sangkar dan menghubungkan yang grafis "menghalangi" dengan suatu gerigi garpu padat sedemikian, sehingga poin-poin panah mengikuti alir fungsi dari permulaan sampai akhir.

Fungsi utama dalam suatu analisis misi dalam wujud suatu profil misi adalah:

- Menyatakan sasaran misi.
- Menyatakan kebutuhan pencapaian dalam terminology terukur yang berasal dari sasaran misi.
- Memperoleh rencana manajemen dan menunjukkan fungsi utama yang diperlukan untuk memenuhi profil misi

- Meninjau kembali semua langkah-langkah yang sebelumnya diperlukan untuk memelihara konsistensi antara kebutuhan yanga asli.

Fungsi utama mengenali profil misi adalah sebagai berikut:

- Menetapkan program perubahan direncanakan.
- Melakukan proyek perubahan direncanakan.
- Mengevaluasi proyek perubahan direncanakan.

3. Menentukan Tujuan

Tujuan (baku) adalah rumusa mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. Sasaran/tujuan situasional adalah rusan spesifik mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentudengan memperhitungkan tantangan nyata yang dihadapi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sasaran adalah sumber daya pendidikan yang tersedia, komitmen yang ada, kebutuhan operas internal, trend dan kejadian eksternal, berbagai kebutuhan, dan antar hubungan semua factor tersebut.

Tujuan (goal) adalah tujuan atau hasil yang ingin dicapai dari pembuatan desain. Tujuan mendorong tindakan yang menentukan seluruh pelaksanaan dalam perencanaan. Tujuan merupakan sejumlah pilihan diantara berbagai kemungkinan. beberapa tipikal tujuan adalah sebagai berikut:

a. Tujuan itu merupakan optimalisasi dalam bentuk, misalnya biaya yang paling rendah untuk keunggulan pendidikan
b. Tujuan itu memuaskan, misalnya pemerataan pendidikan
c. Tujuan itu bentuknya incremental (semakin baik), misalnya tambahan pasokan kelas

d. Tujuan itu bentuknya bisa positifatau negatif, misalnya memberikan ruang lebih untuk belajar.

Beberapa saran tujuan umum dalam perencanaan pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan hendaknya membantu memecahkan masalah sosial,fisik, dan kesehatan.
b. Pendidikan hendaknya menumbuhkembangkan individualitas dengan memberikan kapasitas tertentu bagi individu untuk membuat keputusan sendiri.
c. Pendidikan hendaknya menyediakan arena yang luas mengenai pemahaman dan menghargai orang dai berbagai lapisan.
d. Pendidikan hendaknya melibatkan individu dalam semua aspek kehidupan.
e. Pendidikan hendaknya mempersiapkan induvidu untuk dunia kerja.

B. Desain Konseptual

Desain konseptual dibuat berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan perencanaan. Disamping visi, misi konsep desain perncanaan hendaknya dikaitkan dengan "*what, why, how*" dan filosofi, tujuan serta proses yang ada dalam skema pendidika. Desain didefenisikan sebagai salah satu aspek dari proses pengembangan yang terdiri dari 6 fase untuk mengembangkan berbagai bentuk atau pola aktivitas baru yang dianalisis sebagai proses yang terdiri dari 6 karakteristik yang saling berhubungan, adalah sebagai berikut:

1. Riset sebagai analisis pada persoaalan yang terjadi.
2. Desain sebagai sintesis terhadap apa yang ada.
3. Produksi sebagai formasi atau bentuk yang diharapkan.

4. Distribusi atau penyebaran akan bentuk atau informasi yang dihasilkan.
5. Utilisasi atau nilai guna sebagai bentuk kinerja.
6. Eliminasi atau pengurangan hal yang tidak dibutuhkan.

Untuk mempermudah konsep desain, perlu dipahami beberapa hal berikut:

1. Konsep Desain Perencanaan

   Ada 3unsur penting desain adalah bahan, bentuk, dan antarhubungan yang dinamis secara keseluruhan.

2. Pengaruh-pengaruh Perancangan Rencana-rencana

   Masalah desain merupakan masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti pengaruh budaya dan politik serta lingkungan alami dan lingkungan buatan. Perencanaan yang laen desain perencanaan adalah penggunaan waktu, perencanaan dan pengembangan komprehensif wilayah kota, interaksi sosial, pertumbuhan ekonomi, dan cara-cara perencanaan pendidikan yang mempengaruhinya.

3. Proses Desain

   proses desain sifatnya pragmatif. aktivitas desain dimulai dengan pengenalan lingkungan desain dan penelitian pendahuluan selama mendapatkan data yang tepat mengenai solusi dan susunan dokumentasi grafik. Proses desain perencanaan dilakukan melalui defenisi awal, pengumpulan data, uji coba awal, modifikasi solusi tentative, dan perencanaan akhir.Perencana harus mendesain dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi saat menginterprestasikan kebutuhan kliennya saat ini. Perencanaan itu hendaknya memasukkan factor kontingensi yang memungkinkan perencanaan yang mengatasi perubahan dimasa depan.

Proses desain konseptual dilakukan melalui 4 aktivitas penting, yaitu devenisi, analisis, sistesis, dan midifikasi. Berikut uraiannya:

- **Defenisi**

  yaitu defenisi masalah telah dibentuk berdasarkan fenomena yang telah terjadi serta mengacu pada tujuan yang telah diharapkan.

- **Analisis**

  yaitu analisis variabel yang relevan denagan masalah atau substansi kajian.

- **Sintesis**

  yaitu sintesis variable yang relevan tersebut kedalam desain tentatif(sementara).

- **Modifikasi**

  yaitu modifikasi desain konsep sampai terbentuk sebuah konseptual sehingga layak untuk dijalankan.

C. Formulasi Strategi Pelaksanaan

Formulasi strategi pelaksanaan rencana sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pendidikan. Beberapa pengertian perencanaan strategi dan pentingnya perencanaan strategis dan pertimbangan formulasi.

1. Pengertian Perencanaan Strategis

Perencanaan didefenisikan sebagai proses penentuan dalam dalam waktu yang akan datang. Perencanaan strategis adalah sebuah rencana, tetapi tidak seperti *tactical planning*(perencanaan yang taktis), perencanaan operasional atau perencanaan jangka pendek.

Perencanaan Strategis meliputi, kerngka yang luas, penyebaran sebagian besar sumber daya organisasi, memperluas

kegiatan-kegiatan dan adanya suatu dampak terhadap organiasi. Pada dasarnya, Perencanaan Strategis adalah suatu perencanaan jangka panjang yang jangkauannya luas dan kritis terhadap keberhasilan organisasi.

2. Pentingnya perencanaan Strategis

Bagi menejer professional, perencanaan strategis sangat penting karena akan memberikan pertumbuhan dan keuntungan suatu perusahaan, dan para karyawa juga akan merasa tinggi harga diri mereka, jaminan kerja, kesejahteraan masyarakat dan keselamatan kerja karna adanya dana para penanam modal.

Perencanaan strategis juga mempunyai bahaya apabila para perencana tidak sadar menciptakan birokrasi yang hilang sentuhannya denan bebrbagai pasar yang harus dilayani.Para menejer dapat berlaku rasional, mengambil keputusan dengan resiko yang minimum walaupun usahaya terbatas inovasinya dalam rangka mencapai pasar, sehingga akan dapat keuntungan yang lumayan.

a. Pertimbangn Formulasi

Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan untuk membuata suatu formulasi strategi, diantaranya fisik wilayah, sosial ekonomi atau perpaduan keduanya secara konfrehensif. Berikut uraiannya:

b. Pertimbangan fisik

Pertimbangan fisik berkaitan dengan 3 unsur dimensi. Perencanaan fisik adalah seni membentuk dan mengendalikan susunan dan struktur fisik wilayah agar selaras dengan kebutuhan sosial dan ekonomi yang sejalan dengan pencapaian pendidikan masyarakatnya.

Perencanaan fisik dapat dikelompokkan menjadi 3 fase, yaitu:

- *Fase Pertama,* dari perencanaan fisik adalah persiapan awal yag melibatkan gambar bidang kajian dan pengumpulan berbagai data yang diperlikan dalam menganalisis.
- *Fase Kedua,* dari perencanaan fisik adalah keperluan penggunaan tanah yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Aspek kuakitatif melibatkan estimasi ruang.
- *Fase* Ketiga, dari perencanaan fisik adalah fase desain fisik. suatu perencanaan bagan dibuat sesuai dengan pola aktivitas, konsep kenyamanan dan pertimbangan biaya.

c. Pertimbangan sosial

Pertimbangan sosial berkaitan dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik dimana sisitem pendidikan itu berjalan seperti perencanaan lainnya pendekatan sosial harus mempertimbangkan misi berdasarkan fakta.

Beberapa fase perencanaan:

- Perumusan sasaran (*goal formulation*)
- Pengumpulan data (*data collection*)
- Sintesis (*syntesis*)
- Fase kreatif (*creative phase*)
- Persuasu (*persuasive*)
- Pencapaian pelaksanaan (*effectuation)*
- Umpan balik dan kaji ulang (*feed back and review*)

d. Pertimbangan komprehensif

Pertimbangan ekonomi dikaitkan dengan biaya yang akan dikeluarkan oleh seliruh *stake holder* yang terlibat dalam pendidikan baik murid, guru, staff, maupun masyarakat dari sebuah perencanaan.Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas yaitu semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga.

D. Alokasi Sumber Daya

1. Manusia

Alokasi atau penempatan orang-orang yang harus mengerjakan pekerjaan harus mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki masing-masing. Pada tingkat lembaga, pengalokasian sumber daya adalah salah satu pengorganisasian. Pengorganisasia adalah proses manajerial yang dibawa bersama dan tersusun dengan sistematis subunit individu kedalam perintah yang menyeluruh.

2. Peralatan

Suatu hal yang berguna dalam menyusun suatu rencana adalah adanya 2 pertimbangan dasar, yaitu factor-faktor yang yang dapat dilihat,dihitung dan diraba, dan factor-faktor yang tidak dapat dilihat,dihitung dan diraba. Semua factor sangat berpengaruh terhadap rencana yang disusun.Tujuan utama dari perencanaan adalah untuk menentukan kegiatan-kegiatan dengan peralatan yang dibutuhkan yang dikaitkan dengan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan sekarang dan nanti. Peralatan sangat mendukung suatu kegiatan dalam

mencapai tujuan, maka pemilihan peralatan secara tepat sangat dibutuhkan. Peralaan ini digunakan sesuai item-item pekerjaan pada setiap kegiatan.

3. Uang atau biaya

Dalam perencanaan secara umum, baik perencanaan pendidikan biaya selalu mengikuti kegiatan sehingga pada setiapprogram cenderung diikuti rencana anggaran biaya (RAB).Alokasi biaya atau anggaran menjadi menjadi prnting dalam setiap kegiatan sebab, berkaitan dengan peralatan, fasilitas serta jasa yang dibutuhkan.

4. Waktu atau jadwal

Dalam penentuan kebijakan pendidikan, masalah pembangunan fisik, missalnya waktu sebagai variabel penghukum bagi elemen, seperti material atau bahan bangunan kapan harus sudah harus sampai dilokasi, berapa lama waktu tukang bekerja.

Rencana adalah sarana pengalokasian (waktu, ruang, staf, dan sumber daya)untuk memberikan pengajaran. Jadwal adalah alokasi waktu yang berkaitan dengan hasil belajar siswa dipengaruhi beberapa factor, yaitu:

a. Kecerdasan (*aptitude*)
b. Menggunakan waktu secara optimal
c. Ketekunan (*perseverance)*
d. Kesempatan (*opportunity*)
e. Jumlah waktu untu belajar

BAB XI

PENGEMBANGAN STRATEGI PERENCANAAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

A. Perencanaan Pendidikan Islam

Sampai saat ini aspek perencanaan pendidikan di lingkungan pendidikan Islam, baik secara makro maupun mikro, masih dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting. Perencanaan pendidikan, yang seharusnya menjadi bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pendidikan Islam seringkali diabaikan dan belum menjadi tradisi dalam pengembangan pendidikan Islam. Artikel ini menawarkan strategi perencanaan pendidikan Islam, beserta berbagai kemungkinan dan alternatif yang mungkin dapat dilakukan dalam mengembangkan pendidikan Islam di masa yang akan datang. Artikel ini juga mencoba menwarkan beberapa alternatif model perencanaan pendidikan Islam, terutama dikaitkan dengan dinamika masyarakat yang menjadi stakeholders pendidikan.

Dalam bidang apa pun, perencanaan merupakan unsur penting dan strategis sebagai pemandu arah pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Perencanaan sebagai suatu rangkaian proses kegiatan, dilakukan untuk menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi dan apa yang akan dilakukan. Pada dasarnya perencanaan bermakna sangat kompleks. Perencanaan dapat didefinisikan dalam berbagai macam ragam,

tergantung perspektif yang digunakan serta latar belakang yang memengaruhi seseorang untuk mendefinisikannya. Dalam arti seluas-luasnya, perencanaan biasanya dimaknai sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam bidang pendidikan Islam, perencanaan merupakan salah satu faktor kunci efektivitas terlaksananya aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan bagi setiap jenjang dan jenis pendidikan pada tingkat nasional maupun lokal. Pentingnya perencanaan yang handal dalam lingkup pendidikan Islam, karena pendidikan Islam diyakini oleh umat Islam sebagai jalan hidup manusia yang paling baik. Sebagai jalan yang paling baik, pendidikan Islam perlu direncanakan secara sistematis, sehingga Pendidikan Islam benar-benar dapat menyejahterakan setiap Muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Hakikat Pendidikan Islam sebagai best human way of life, atau sebagai kehidupan manusia (human life) itu sendiri dapat dimaknai dalam beberapa pengertian: Pertama, manusia pada hakikatnya adalah makluk yang senantiasa belajar sepanjang hidupnya. Hal ini karena manusia bukanlah makhluk yang sudah jadi dan sempurna, melainkan makluk yang menjadi dan berproses, maka untuk menuju kepada kesempurnaan relatif (insân kâmil) manusia dituntut untuk belajar. Inilah makna dari belajar sepanjang hayat (long life education). Kedua, Pendidikan Islam sebagai best human way of life juga dapat dikaitkan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Karena kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial senantiasa berorientasi pada keinginan untuk meraih kesejahteraan ekonomi, sosial, selaras dengan lingkungan geografi, demografi (kependudukan), dan mobilitas sosial, dan untuk mencapai tujuan itu semua

diperlukan pendidikan; maka pendidikan berarti juga bagian kehidupan manusia (human life) itu sendiri.

Pemaknaan kedua tersebut selaras dengan pandangan John R. Kelly, yang menyatakan bahwa pendidikan bukan untuk mempersiapkan tenaga kerja, melainkan lebih ditekankan pada upaya mempersiapkan berbagai macam pemenuhan kebutuhan hidup. Hampir senada dengan pandangan John R. Kelly tersebut, Allan G. Johnson juga berpandangan bahwa pendidikan tidak hanya dilakukan untuk menyiapkan seseorang untuk mencapai pekerjaan yang prestisius; melainkan juga sebagai suatu simbol dari kebudayaan, status serta untuk memperbanyak tenaga kerja.

Pandangan lain dikemukakan oleh J. Kats sebagaimana dikutip oleh Gardner dan Jerome bahwa melalui pendidikan akan terjadi perubahan-perubahan: (1) adanya penurunan-penurunan sikap otoriterisme (*authoritarianism declines*); (2) pertumbuhan (*autonomy grows*); (3) peningkatan penghargaan diri (*self-esteem increases*); (4) perluasan hubungan (*the capacity for relatedness becomes enlarged*); (5) pengalaman politik yang lebih matang *(greater political sphistication is shown*); (6) pertumbuhan kapasitas asketis (*asthetic capacity grows*); and (7) kemampuan siswa dalam menguasai isu-isu teoretis yang lebih luas (*students have a broader grasp of theoretical issues*).

Namun dalam praktek pelaksanaan pendidikan Islam, unsur perencanaan pendidikan baru atau masih lebih banyak dijadikan faktor pelengkap, sehingga sering kali tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai secara maksimal. Penyebabnya adalah karena para perencana pendidikan kurang memahami proses dan mekanisme perencanaan dalam konteks yang lebih komprehensif. Selain itu, posisi bidang perencanaan belum merupakan key factor keberadaan suatu lembaga pendidikan,

baik pada tingkat makro maupun mikro. Karena itu, sumbangan perencanaan pendidikan terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan belum dirasakan secara optimal.

B. Konsep Perencanaan Pendidikan (Educational Planning)

Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, stategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan sesuatu kegiatan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa prencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu di antara beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicpai oleh suatu organisasi. Kemusian memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut.

Sementara itu, menurut Ritha F. Dalimunthe, perencanaan adalah pemilihan dan penetapan kegiatan, selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan; rencana haruslah diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan perbaikan agar tetap berguna. "Perencanaan kembali" kadang-kadang dapat menjadi faktor kunci agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin. Conyers & Hills mendefinisikan "perencanaan" sebagai "suatu proses yang bersinambungan", yang mencakup "keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai aiternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang." Dari pengertian-pengertian tersebut, maka perencanaan pendidikan dimaksudkan untuk mempersiapkan semua komponen pendidikan, agar dapat terlaksana proses belajar mengajar yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan

dalam mencapai sasaran keluaran pendidikan seperti yang diharapkan.

Pengorganisasian pendidikan ditujukan untuk menghimpun semua potensi komponen pendidikan dalam suatu organisasi yang sinergis untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Penggiatan pendidikan adalah pelaksanaan dari penyelenggaraan pendidikan yang telah direncanakan dan diawaki oleh organisasi penyelenggara pendidikan dengan memparhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam perencanaan dalam rangka mencapai hasil keluaran pendidikan yang optimal. Pengendalian pendidikan dimaksudkan untuk menjaga agar penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai yang direncanakan dan semua komponen pendidikan digerakkan secara sinergis dalam proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan yang dijabarkan dalam sasaran-sasaran menghasilkan keluaran secara optimal seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan pendidikan.

Definisi tersebut mengedepankan 4 unsur dasar perencanaan, yakni: (1) Pemilihan. "Merencanakan berarti memilih," kata Yulius Nyerere (mantan Presiden Tanzania) ketika menyampaikan pidato Repelita II Tanzania pada tahun 1969. Artinya, perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan, karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hal itu menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat.

Oleh karena itu, banyak buku mengenai perencanaan membahas pendekatan-pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan urutan

tindakan di dalam proses pengambilan keputusan.; (2) Sumber daya. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Penggunaan istilah "sumber daya" di sini menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya di sini mencakup sumber daya manusia; sumber daya alam (tanah, air, hasil tambang, dan sebagainya); sumber daya modal dan keuangan.

Perencanaan mencakup pro-ses pengambilan keputusan tentang bagaimana sumber daya yang tersedia itu digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh dalam proses memilih di antara berbagai pilihan tin-dakan yang ada; (3) tujuan. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat dirumuskan secara tepat. Sering kali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas, karena kadang kala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain.; dan (4) waktu. Perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan berkaitan dengan masa depan.

Salah satu aspek yang juga penting dalam perencanaan adalah pembuatan keputusan (making decision), proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Dalam masalah perencanaan pendidikan, setidaknya berisi dua komponen utama, yaitu: proses perencanaan (*the planning process*), dan isi perencanaan (*the planning content*).

Ada tiga tugas pokok dalam perencanaan yang dapat digunakan, yaitu: Pertama, tugas persiapan/eksplanatif. Kegiatan ini mengidentifikasikan dengan menghimpun data dan informasi dimaksud adalah tugas eksplanasif sebgai kegiatan awal perencanaan. Tugas ini disebut juga kegiatan evaluasi diri yang dilakukan untuk mengenali bidang atau masalah yang akan dijelajahi oleh perencanaan yang akan dirumuskan.

Orientasi atau evaluasi diri dilakukan antara lain terhadap ruang lingkup, kekuatan dan kelemahan organisasi, peluang yang dapat dimanfaatkan, hambatan yang dihadapi, sumber daya yang dimiliki. Tugas implementatif ini jika diimplementasikan dalam perencanaan pendidikan sangat khusus sifatnya Karena telah memiliki beberapa model analsisis yang siap digunakan. Kedua, tugas prediktif. Prediksi pada dasarnya merupakan kegiatan memilih alternatif mengenai kondisi organisasi yang ideal di masa mendatang. Harus bersifat realistis berupa kondisi masa depan yang diperkirakan dapat diwujudkan. Stategi atau cara dan program untuk mncapai kondisi yang diprediksi di masa depan itu, harus dirumuskan ke dalam perencanaan pendidikan. Tugas prediksi harus dilakukan secara cermat dan relaistik, agar benar-benar dapat dilaksanakan dan tujuannya dpat dicapai secara efektif dan efisien. Ketiga, tugas kontrol. Perencanaan sebagai kegiatan kontrol sangat penting bagi setiap dan semua organisasi pendidikan karena berpengaruh langsug bagi setiap usaha dan mengembangkan ekesestensinya. Kemampuan tersebut harus diwujudkan dalam penyususnan perencanaan pendidikan yang berisi program dan kegiatan yang lebih baik.

Dalam bidang pendidikan, konsep perencanaan biasanya mengacu dan diarahkan kepada beberapa aspek, yaitu:

Pertama, perencanaan pendidikan adalah proses mengambil keputusan, yang diartikan sebgai rangkaian kegiatan memilih alternatif untuk dilakanakan dalam rangka mencapai satu atau beberapa tujuan pendidikan. Kedua, keputusan yang ditetapkan dalam perencanaan pendidikan harus dimulai dari kegiatan memperjelas kondisi pendidikan pada masa sekarang, dilanjutkan dengan meprediksi problem dan tantangan pendidikan di masa yang akan datang. Dalam memanfaatkan data sebagai sumber perencanaan, perencanaan pendidikan dapat dibagi menjadi tiga tingkat dalam menggunakan data sebagai spektrum dalam pembuatan keputusan, yaitu:

1. Keakuratan tinggi (*certainity*). Dipergunakan data kuantitatif yang lengkap dengan analisis stasistik yang relevan. Namun spektrum ini terbatas pada prediksi untuk membuat perencaan pendidikan secara kuantitatif bukan untuk kualitatif. Keputusan ini memiliki tingkat keakuratan tinggi karena sudah diketahui konsekuensinya. Pengujian dilakukan dengan menetapkan tingkat signifikansi yang umumnya 95%.
2. Kedua, keputusan beresiko (*risk*). Keputusan ini merupakan hasil analisis data kuantitatif yang tidak lengkap, kemudian dilengkapi dengan informasi yang kualitatif, sehingga penggunaan statistik menjadi terbatas. Analisis data/informasi kualitatif sebagai penunjang cenderung menghasilkan beberapa alternatif keputusan. Setiap alternatif telah diketahui dampak dan konsekuensinya, jika dipilih untuk direncanakan. Pemilihan salah satu alternatif selain ditetapkan menjadi keputusan sangat tergantung pada kemampuan menetapkan yang terbanyak positifnya atau paling sedikit negatifnya. Pilihan tergolong buruk jika alternatif yang dipilih berimbang antara kemungkinan

keberhasilan dan kegagalannya, dan merupakan pilihan yang sangat buruk jika yang dipilih justru alternatif yang lebih besar kemunginkan kegagalannya. Analisis yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan berisiko ini adalah analisis SWOT *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), *Threath* (hambatan), dengan kata lain sebuah alternatif yang akan dipilih harus diketahui kekuatan, kelamaha, peluang dan hambatannya.

3. Ketiga, seringkali bersifat tidak akurat (*uncertainty*). Dilakukan dengan cara menggunakan informasi kualiatif karena tidak tersedia data kuantitatif yang akurat. Analisa kualitatif yang dilakukan menghasilkan beberapa alternatif untuk dipilih supaya salah satu di antaranya dapat ditetapkan sebgai keputusan. Setiap alternatif tidak diketahui kelebihan dan kelemahannya atau kebaikan dan keburukannya.

C. Strategi Perencanaan Pendidikan Islam

Strategi pengembangan perencanaan pendidikan Islam di Indonesia, pertama-tama mengasumsikan bahwa penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia perlu dilakukan reposisi, sehingga pendidikan Islam dapat benar-benar mencapai tujuannya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan reposisi perencanaan Pendidikan Islam di Indonesia meliputi: Pertama, mengembangkan kesadaran tentang pentingnya Perencanaan Pendidikan Islam. Kedua, mengembangkan sikap menghargai profesi perencana di bidang pendidikan. Ketiga, mengembangkan sistem Perencanaan Pendidikan Islam yang handal dan sistematis. Keempat, memperbaiki kualitas dan akurasi data kependidikan Islam. Kelima, menetapkan model dan metode Perencanaan Pendidikan Islam yang paling sesuai dengan karakteristik

dan tujuan Pendidikan Islam. Keenam, mengembangkan manajemen sistem informasi Pendidikan Islam. Ketujuh, mengembangkan sistem perencanaan berbasis penelitian (*research base planning*).

1. Mengembangkan Kesadaran Pentingnya Perencanaan Pendidikan Islam

   Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya Perencanaan Pendidikan (*EducationalPlanning*) di kalangan para pengambil kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia amatlah penting. Pengembangan kesadaran itu sangat perlu dan mendesak, mengingat selama ini, para pengambil kebijakan di bidang Pendidikan Islam kurang memperhatikan arti penting bidang perencanaan Pendidikan Islam. Sehingga, kalau pun secara formal perencanaan dilakukan, tetapi rumusan strategi, substansi, dan program-programnya hanya dibuat seadanya dan sekenanya. Akibatnya, arah dan tujuan Pendidikan Islam menjadi tidak jelas dan kabur.

2. Mengembangkan Sikap Menghargai Profesi Perencana di Bidang Pendidikan

   Selama ini, profesi perencana di lingkungan Pendidikan Islam, mulai dari tingkat pusat hingga institusi mikro pendidikan (Madrasah, PTAI, dll), dipandang sebagai profesi yang tidak strategis dan tidak penting. Padahal, kebijakan pendidikan, termasuk kebijakan Pendidikan Islam, tanpa didukung oleh perencana-perencana yang mumpuni, pasti tidak akan berjalan secara optimal. Tanpa penghargaan yang proporsional terhadap profesi perencana, maka setiap orang akan berpandangan bahwa jabatan di institusi perencanaan akan dipandang sebagai jabatan "buangan".

Bila profesi perencana di bidang Pendidikan Islam dihargai secara proporsional, maka akan berdampak pada peningkatan mutu dan profesionalisme para perencana di bidang Pendidikan Islam, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu dan kehandalan Perencanaan Pendidikan Islam.

3. Mengembangkan Sistem Perencanaan Pendidikan Islam yang Handal dan Sistemtis

Sistem Perencanaan Pendidikan Islam yang handal dan sistematis adalah prasyarat mutlak untuk mengembangkan masa depan Pendidikan Islam. Strategi untuk mengembangkan sistem perencanaan yang handal dan sistematis dimulai dengan melakukan analisis SWOT untuk kepentingan pengenalan diri. Analisis SWOT mengharuskan adanya kejujuran dan kevalidan survei internal tentang *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan), serta kejelian survei eksternal atas *opportunities* (peluang/kesempatan) dan *threats* (ancaman). Pengenalan potensi diri dan posisi diri baik eksternal dan internal yang jujur dan valid adalah suatu prasyarat sebelum Perencanaan Pendidikan Islam dilakukan.

Setelah analisis SWOT dilakukan Perencanaan Pendidikan Islam dilanjutkan dengan mengembangkan beberapa kriteria Perencanaan Pendidikan Islam agar dokumen perencanaannya betul-betul dapat menjadi panduan dan pedoman pengembangan Pendidikan Islam di masa kini dan masa mendatang. Beberapa kriteria Perencanaan Pendidikan Islam yang handal dan sistematis adalah:

- Jelas tujuannya. Tujuan Pendidikan Islam yang jelas adalah tujuan yang dapat memandu arah Pendidikan

Islam, dan pencapaian tujuan dapat menjadi tolok ukur untuk menilai kinerja institusi pendidikan Islam. Kriteria perumusan tujuan yang baik sekaligus mencerminkan hasil yang diinginkan oleh institusi dan memberikan kontribusi pada pencapaian misi yang diembannya.

- Jelas sasarannya. Sasaran institusi Pendidikan Islam yang jelas adalah sasaran yang dapat diukur. Ukuran tersebut pada umumnya adalah kuantitatif. Bagi sasaran yang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, sasaran dinyatakan dengan merumuskan indikator-indikator, yang menggambarkan bagaimana sasaran tersebut tercapai. Kriteria perumusan sasaran yang baik adalah SMART: Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time Bonding (khusus, dapat diukur, dapat diwujudkan, realistik, berjangka waktu tertentu).
- Jelas kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat tercapai. Rumusan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan harus benar. Rumusan kegiatan ini seringkali dibatasi oleh kebijakan atau policy.
- Jenis sumber daya, jumlah dan besarnya harus jelas.
- Waktu mulai dan selesainya harus jelas.

  Jelas kebijakan yang harus dilaksanakan.

Karena kebutuhan untuk menetapkan kriteria tersebut di atas tidak mudah, maka diperlukan perencana-perencana yang ahli, terampil, berwawasan luas yang memiliki:

- Kemampuan prediktif. Kegiatan perencanaan selalu berkaitan dengan masa yang akan datang, oleh sebab itu kemampuan prediksi sangat penting. Berbagai

teknik manajemen yang ada sekarang dapat digunakan untuk membantu kemampuan prediksi.

- Kemampuan menghitung biaya. Perencanaan biasanya sampai dengan penyusunan anggaran, oleh sebab itu perencana yang profesional harus memiliki kemampuan di bidang penyusunan anggaran.
- Kemampuan komunikasi. Perencanaan umumnya berkaitan dengan kegiatan untuk memadukan berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Perencana harus mampu menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga dapat dihasilkan suatu perencanaan yang terpadu.
- Penguasaan teknik-teknik manajemen. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (khususnya teknologi komputer, informasi, dan komunikasi), teknik-teknik manajemen juga berkembang pesat. Perencanaan pada umumnya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang sebaik-baiknya, atau pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang sehemat-hematnya. Untuk itu penguasaan berbagai teknik manajemen yang berkaitan dengan optimasi sangat diperlukan.
- Kemampuan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui hasil/pencapaian kinerja pada periode waktu yang tertentu. Evaluasi dari hasil pengukuran kinerja diperlukan oleh pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut.

4. Memperbaiki Kualitas dan Akurasi Data Kependidikan Islam

Data yang akurat dan berkualitas menjadi salah satu prasyarat perencanaan pendidikan, termasuk Perencanaan Pendidikan Islam. Tanpa data yang akurat, maka kegiatan perencanaan hanya akan menghasilkan "dokumen sampah" yang tidak bermanfaat, sekaligus dapat membahayakan masa depan kebijakan Pendidikan Islam.

Selama ini harus diakui bahwa data-data yang mendukung kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Islam di Indonesia simpang siur dan akurasinya amat diragukan. Sayangnya, berbekal data-data yang tidak akurat itulah, kegiatan Pendidikan Islam direncanakan, dan berbagai kebijakan Pendidikan Islam ditetapkan berdasarkan "data sampah". Akibatnya, dokumen perencanaan di lingkungan Pendidikan Islam seringkali tidak digunakan sebagai panduan dan pedoman, baik dalam menyusun kebijakan maupun dalam kegiatan operasionalnya.

5. Menetapkan Model dan Metode Perencanaan Pendidikan Islam

Model dan Metode yang dapat digunakan dalam sistem Perencanaan Pendidikan memang banyak, tetapi para perencana di bidang Pendidikan Islam perlu memilih suatu model dan metode yang dipandang paling baik dan sesuai dengan lingkungan pendidikan Islam.

Sebagaimana diketahui, selama ini dikenal beberapa model perencanaan, di antaranya:

- Model Perencanaan Komperehensif. Model ini terutama digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan-tujuan yang lebih luas.

- Model Target Setting. Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi atau pun memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Dalam persiapannya dikenal: (1) model untuk menganalisis demografis dan proyeksi penduduk; (2) model untuk memproyeksikan pendaftar jumlah siswa terdaftar suatu lembaga pendidikan Islam; dan (3) model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja.
- Model costing dan keefektifan biaya. Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien, efektifitas dan ekonomis. Dengan model ini dapat diketahui proyek yang paling fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternatif penanggulangan masalah yang dihadapi. Penggunaan model ini dalam pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari masalah pembiayaan. Dan, dengan sejumlah biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan, diharapkan dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan benefit tertentu.
- Model PPBS. Model PPBS (*planning, programming, budgeting system*) bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan satu sama lainnya. PPBS merupakan suatu proses yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Dalam istilah lain, model PPBS merupakan suatu pendekatan yang sistematik yang berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan

program-program, menentukan besarnya biaya, dan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang. Untuk memahami PPBS secara lebih baik, maka perlu diperhatikan sifat-sifat esensial dari sistem ini, yakni: (1) memerinci secara cermat dan menganalisis secara sistematik terhadap tujuan yang hendak dicapai; (2) mencari alternatif-alternatif yang relevan, serta cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan; (3) menggambarkan biaya total dari setiap alternatif, baik langsung atau pun tidak langsung, biaya yang telah lewat atau pun biaya yang akan datang, baik biaya yang berupa uang maupun biaya yang tidak berupa uang; (4) memberikan gambaran tentang efektifitas setiap alternatif dan bagaimana alternatif itu mencapai tujuan; dan (5) membandingkan dan menganalisis alternatif tersebut, yaitu mencari kombinasi yang memberikan efektivitas yang paling besar dari sumber yang ada dalam pencapaian tujuan.

Selain menentukan model perencanaan yang paling sesuai dengan karakteristik Pendidikan Islam, para perencana Pendidikan Islam juga perlu menentukan metode perencanaan yang dipandang paling efektif untuk merencanakan Pendidikan Islam. Metode-metode yang dikenal dalam perencanaan pendidikan di antaranya:

- Metode *mean-ways and analysis* (analisis mengenai alat, cara dan tujuan).
- Metode ini digunakan untuk meneliti sumber-sumber dan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Tiga hal yang perlu dianalasis dalam metode ini, yaitu: means yang berkaitan dengan sumber-sumber yang

diperlukan; ways yang berhubungan dengan cara dan alternatif tindakan yang dirumuskan dan bakal dipilih; dan ends yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketiga aspek tersebut ditelaah dan dikaji secara timbal balik.

- Metode *input-output analysis*. Metode ini dilakukan dengan mengadakan pengkajian terhadap interelasi dan interdependensi berbagai komponen masukan dan keluaran dari suatu sistem. Metode ini dapat digunakan untuk menilai alternatif dalam proses transformasi.
- Metode *econometric analysis*. Metode ini menggunakan data empirik, teori ekonomi dan statistika dalam mengukur perubahan dalam kaitan dengan ekonomi. Metode ekonometrik mengembangkan persamaan-persamaan yang menggambarkan hubungan ketergantungan di antara variabel-variabel yang ada dalam suatu sistem.
- Metode *cause-effect*. Metode ini digunakan dalam perencanaan dengan menggunakan sekuen hipotetik untuk memperoleh gambaran tentang masa depan. Metode ini sangat cocok untuk perencanaan yang bersifat stratejik.
- Metode *Delphi*. Metode ini bertujuan untuk menentukan sejumlah alternatif program. Mengeksplorasi asumsi-asumsi atau fakta yang melandasi judgments tertentu dengan mencari informasi yang dibutuhkan untuk mencapai suatu konsensus. Biasanya metode ini dimulai dengan melontarkan suatu masalah yang bersifat umum untuk diidentifikasi menjadi masalah yang lebih spesifik. Partisipan dalam metode ini

biasanya orang yang dianggap ahli dalam disiplin ilmu tertentu.

- Metode *heuristic*. Metode ini dirancang untuk mengeksplorasi isu-isu dan untuk mengakomodasi pandangan-pandangan yang bertentangan atau karena adanya ketidakpastian. Metode ini didasarkan atas seperangkat prinsip, prosedur, dan langkah-langkah dalam usaha pemecahan masalah secara sistematis.
- Metode *life cycle analysis*. Metode ini digunakan terutama untuk mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikan aspek-aspek produksi, proyek, program atau aktivitas. Dalam kaitan ini seringkali digunakan bahan-bahan komparatif dengan menganalogkan data. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ini adalah: (1) Fase Konseptualisasi; (2) Fase Spesifikasi; (3) Fase Pengembangan Prototype; (4) Fase Pengujian dan Evaluasi; (5) Fase Operasi; dan (6) Fase Produksi. Metode ini bisa dipergunakan dalam bidang Pendidikan Islam terutama dalam mengalokasikan sumber-sumber pendidikan dengan melihat kecende-rungan-kecenderungan dari berbagai aspek yang dapat dipertimbangkan dalam merumuskan rencana dan program.
- Metode *value added analysis*. Metode ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan produksi atau pelayanan. Dengan demikian, kita dapat mendapatkan gambaran singkat tentang konstribusi dari aspek tertentu terhadap aspek lainnya.

6. Mengembangkan Manajemen Sistem Informasi Pendidikan Islam

Dalam konteks perencanaan Pendidikan Islam, kedudukan manajemen sistem informasi pendidikan amatlah penting. Manajemen Sistem Informasi Pendidikan ini setidaknya harus mencakup pengelolaan informasi tentang siswa, karyawan, bangunan, program, dan finansial

- Manajamen sistem informasi pendidikan yang berkenaan dengan siswa pada lingkungan lembaga Pendidikan Islam meliputi:
  - Menyediakan informasi tentang tingkat, jumlah, skor, tes kesehatan, kehadiran, dan faktor-faktor kesiswaan lainnya.
  - Menyediakan informasi tentang pengalaman siswa di luar lembaga pendidikan yang mempunyai pengaruh signifikan dalam proses pembelajaran.
  - Memberikan informasi perbandingan prestasi siswa dengan siswa lain di komunitasnya serta dalam lingkungan wilayah lembaga pendidikan.
  - Memberikan informasi kurikuler, ekstrakurikuler, dan program-program pengayaan yang didukung oleh masyarakat.
  - Memberikan informasi tentang sejumlah identifikasi yang memungkinkan siswa dapat mengikuti jenjang karir jika ia pindah dari lembaga pendidikan ke suatu lembaga pendidikan yang lain.
- Manajamen sistem informasi pendidikan yang berkenaan dengan karyawan meliputi:

- menyediakan informasi tentang kemampuan dan preferensi guru, serta dalam mempersipkan proses pembelajaran.
- Menyediakan informasi tentang tugas dan alokasi jadwal guru.
- Menyediakan informasi tentang fungsi-fungsi yang sesungguhnya yang berkenaan dengan performansi guru.
- Menyediakan informasi tentang efektivitas pembelajaran yang dapat dilakukan oleh para guru.
- Memberikan informasi tentang prakiraan kebutuhan untuk menunjang keterampilan mengajar.

Manajamen sistem informasi pendidikan yang berkenaan dengan bangunan meliputi:

- Menyediakan informasi tentang lokasi, jenis, ukuran, kapasitas, sistem struktur, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya.
- Menyediakan informasi tentang perlengkapan lembaga pendidikan, lokasi, usia, biaya, dan pemanfaatannya.
- Menyediakan informasi tentang kualitas lingkungan lembaga pendidikan, dukungan komunitas dan lain sebagainya.

Manajamen sistem informasi pendidikan yang berkenaan dengan program meliputi:

- Memberikan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh peserta didik, bagaimana

mengerjakannya, oleh sispa, berapa banyak biaya yang diperlukan dan lain-lain.

- Menyediakan informasi tentang kurikulum yang ada, proses pembelajaran dan prosedur evaluasi.
- Memberikan informasi tentang hasil dari pencapaian kurikulum yang diajarkan.
- Memberikan informasi tentang perbandingan dan efektifitas berbagai proyek yang dilaksanakan.
- Semua sistem informasi pendidikan tersebut direncanakan dalam suatu perencanaan pendidikan. Bahan-bahan yang disajikan dalam manajemen sistem informasi pendidikan itu diperoleh dari suatu hasil penelitian yang akurat yang didukung oleh data-data kuantitatif maupun kualitatif.

7. Mengembangkan Sistem Perencanaan Berbasis Penelitian (*Research Base Planning*)

Untuk mengembangkan sistem perencanaan Pendidikan Islam yang efektif, maka sistem Perencanaan Pendidikan Islam mesti didasarkan pada hasil penelitian (Research Base Planning). Dengan perencanaan berbasis penelitian, maka Perencanaan Pendidikan Islam akan memiliki landasan data yang memiliki validitas dan reliabilitas yang baik, sehingga proses Perencanaan Pendidikan Islam tidak hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dan perkiraan-perkiraan tanpa data yang akurat.

Pentingnya penelitian sebagai basis Perencanaan Pendidikan Islam, adalah karena dengan penelitian, maka akan dihasilkan data-data empirik yang valid, akurat, dan tidak didasarkan pada dugaan-dugaan.

Selama ini, kegiatan Perencanaan Pendidikan Islam pada umumnya tidak didasarkan pada penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Akibatnya, manfaat dari Perencanaan Pendidikan Islam kurang dirasakan. Oleh itu perlu ada political will dari para pengambil kebijakan bidang pendidikan Islam, sehingga perencanaan dapat diaplikasikan sesuai dengan teori-teori perencanaan pendidikan yang diakui secara luas di dunia pendidikan. Dalam hal ini upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem perencanaan Pendidikan Islam dalam arti yang sesungguhnya. Perencanaan Pendidikan Islam dalam arti yang sesungguhnya berarti memandang perencanaan sebagai proses pemilihan dan penetapan tujuan, stategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan sesuatu kegiatan". Hal itu berarti bahwa prencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu di antara beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicpai oleh suatu organisasi. Kemusian memilih strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan Pendidikan dalam arti yang sesungguhnya juga bermakna pemilihan dan penetapan kegiatan, selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa atau suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan; rencana haruslah diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan perbaikan agar tetap berguna. "Perencanaan kembali" kadang-kadang dapat menjadi faktor kunci agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin. Dengan kata lain, perencanaan yang

sesungguhnya dan bukan asal-asalan adalah "perencanaan" sebagai "suatu proses yang berkesinambungan", yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Dengan demikian, maka Perencanaan Pendidikan Islam diarahkan untuk mempersiapkan semua komponen pendidikan, agar dapat terlaksana proses belajar mengajar yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan serta dalam mencapai sasaran keluaran pendidikan seperti yang diharapkan. Pengorganisasian pendidikan ditujukan untuk menghimpun semua potensi komponen pendidikan dalam suatu organisasi yang sinergis untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

BAB XII

STATISTIK DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN

Konsep statistik sering dipergunakan untuk menggambarkan data angka yang terkumpul. Dalam pengertian yang lebih umum, statistik adalah seperangkat teknik matematika untuk mengumpulkan, mengorganisasi, menganalisis, dan menginterprestasikan data angka. Jika penelitian menghasilkan data kuantitatif, maka statistik menjadi alat pokok ukuran, evaluasi, dan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan statistik akan memperoleh gambaran perilaku kelompok atau karakteristik kelompok yang telah dideskripsikan, dianalisis dan disimpulkan dari hasil observasi atas sejumlah individu yang memungkinkan untuk dibuat suatu generalisasi yang memperjelas fenomena dan memprediksi peristiwa di masa yang akan datang, terutama dalam perencanaan dan pembangunan bidang pendidikan.

Para perencana pendidikan perlu memiliki pengetahuan mengenai beberapa prosedur statistik agar mampu menganalisis dan mentafsirkan data dan menyimpulkan gejala atau peristiwa yang diamati. Untuk membantu para perencana pendidikandalam memberikan gambaran keadaan penduduk (terutama usia sekolah), dan pendidikan di masa sekarang dan di masa yang akan datang dengan menggunakan ilmu statistik, para ahli telah banyak menemukan teori-teori dan rumus-rumus statistik terkait dengan perencanaan pendidikan.

Dari sekian banyak teori dan rumus-rumus statistik yang ada, berikut ini akan disampaikan beberapa metode statistik yang sering digunakan dalam penyususnan rencana pendidikan, yaitu: (1) proyeksi penduduk, (2) sprague multiplier, yaitu metode pencarian jumlah penduduk usia tunggal dari jumlah penduduk yang dikelompokkan lima tahunan, (3) enrolmen ratio, yaitu suatu metode pencarian perbandingan penduduk usia sekolah dengan penduduk usia sekolah yang bersekolah, (4) metode proyeksi tenaga pendidik dan kependidikan, (5) metode proyeksi siswa, (6) metode proyeksi sarana dan prasarana, (7) metode proyeksi biaya pendidikan, (8) analisis kohort, yaitu metode analisis perkembangan arus siswa, (9) analisis efesiensi internal, yaitu metode pencarian tingkat efesiensi penyelenggaraan pendidikan dan (10) metode analisis indiktor-indikator pendidikan.

A. Proyeksi Penduduk

Kegiatan proyeksi penduduk adalah suatu usaha untuk memperkirakan jumlah penduduk pada masa yang akan datang dengan memperhitungkan data penduduk di masa lalu dan masa sekarang, terutama yang terkait dengan kecenderungan pertumbuhannya. Dalam aktivitas memproyeksikan penduduk banyak menggunakan rumus-rumus statistik, dan akan menghasilkan data dan informasi dalam bentuk grafik tentang pertumbuhan penduduk di masa depan untuk setiap tahun, termasuk kecenderungan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun.

Rata-rata tingkat perkembangan penduduk merupakan dasar yang penting dalam masalah demografi. Ini sangat berguna dan dapat membantu perencana pendidikan dalam melakukan proyeksi penduduk. Untuk dapat melakukan perhitungan mencari rata-rata perkembangan penduduk, diperlukan data

penduduk pada suatu wilayah tertentu. Misalnya, dibawah ini disajikan data (fiktif) penduduk indonesia tahun 2000 sampai dengan 2010 sebagai berikut:

Tahun	Penduduk (dalam ribuan)
2000	120.149
2001	123.115
2002	126.088
2003	129.083
2004	132.110
2005	135.190
2006	138.342
2007	141.579
2008	144.912
2009	148.349
2010	151.895

Dari data di atas, kita dapat mencari rata-rata pertumbuhan penduduk indonesia selama 10 tahun yang lalu dengan cara melakukan perhitungan dengan menggunakan rumussebagai berikut:

Perkembangan penduduk

P0= penduduk pada tahun awal

Pn= penduduk pada tahun terakhir.

Sehingga berdasarkan data di atas, dapat dihitung tingkat rata-rata pertumbuhan penduduk sebagai berikut:

Pertumbuhan penduduk adalah

Dari data di atas, kita dapat menghitung rata-rata perkembangan penduduk tahunan dengan rumus sebagai berikut:

Dari tabel data di atas, kita dapat mengetahui P0 = 120149, Pn = 151895, dan n = 10. Untuk menghitung "r" digunakan perhitungan secara logaritma dengan rumus:

Log Pn = log p0 + n log (1 + r) dapat di susun lagi menjadi

Dari data logaritma diperoleh data log Pn (log dari 151895) adalah = 5.1815 dan log p0 (log dari 120149) adalah 5.0797. dengan data ini maka dapat dihitung:

1 + r = anti log dari 0,0102= 1.023, jadi 'R' = 0,023 atau 2.3%

Selanjutnya untuk dapat menghitung jumlah penduduk indonesia pada tahun – tahun yang akan datang, misalnya untuk tahun 2011, 2012, 2013, dan seterusnya, maka kita menggunakan rumus proyeksi penduduk sebagai berikut:

dan seterusnya.

= tahun terakhir dalam data

= satu tahun untuk tahun berikutnya

= dua tahun berikutnya dari tahun terakhir dalam data

= tiga tahun berikutnya dari tahun terakhir pada data.

%PP= presentase rata-rata pertumbuhan penduduk tahunan di masa lalu.

Dari data di atas dengan menggunakan rumus proyeksi, kita dapat menghitung atau memproyeksikan jumlah penduduk indonesia tahun 2011, 2012, dan 2013 sebagai berikut:

Jumlah penduduk tahun 2011 adalah = 151.895 + (2,3% x 151.895) = 151895 + 3494 = 155389

Jumlah penduduk tahun 2012 adalah = 155389 + (2,3% x 155389) = 155389 + 3574 = 158963

Jumlah penduduk tahun 2013 adalah = 158963 + (2,3% x 158963) = 158963 + 3656 = 162619

B. Sprague Multiplier

Sprague multiplier adalah suatu metode untuk mencari atau menghitung jumlah penduduk usia tertentu misalnya usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, dan 12 tahun untuk siswa SD dari jumlah penduduk yang usianya dikelompokkan lima tahunan seperti 0-4 tahun, 5-9 tahun , dan seterusnya dengan menggunakan tabel koefisien pengali. Tabel koefisien pengali tersebut terdiri dari lima buah, yaitu:

1. tabel 1 untuk menghitung jumlah penduduk usia 0 sampai 4 tahun
2. tabel 2 untuk menghitung jumlah penduduk usia 5 sampai 9 tahun
3. tabel 3 (tabel peralihan) untuk menghitung jumlah penduduk usia 10 sampai usia 69 tahun
4. tabel 4 untuk menghitung jumlah penduduk usia 70 sampai 74 tahun
5. tabel 5 untuk menghitung jumlah penduduk usia 75 tahun ke atas.

Dari kelima tabel koefisien pengali di atas, tabel 4 dan 5 bersifat tidak fungsional untuk perencanaan pendidikan, sehingga jarang disertakan dalam keseluruhan tabel itu. Dengan kata lain, tabel koefisien pengali sprague multiplier yang digunakan dalam perencanaan pendidikan adalah tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 seperti di bawah ini.

Tabel dan usia	F-2	F-1	F0	F+1	F+2	F+3
Tabel 1						
Usia 0 tahun			+0,3616	-0,2768	+0,1488	-0,0336
Usia 1 tahun			+0,2640	-0,0960	+0,0400	-0,0080
Usia 2 tahun			+0,1840	+0,0400	-0,0320	+0,0080
Usia 3 tahun			+0,1206	+0,1360	0,0720	+0,0160
Usia 4 tahun			+0,0704	0,1968	-0,0848	+0,0176

Tabel 2						
Usia 5 tahun		+0,0336	+0,2272	-0,0752	+0,0144	
Usia 6 tahun		+0,0080	+0,2380	-0,0480	+0,0080	
Usia 7 tahun		-0,0080	+0,2160	-0.0080	+0,0000	
Usia 8 tahun		-0,0160	+0,1840	+0,0400	-0,0080	
Usia 9 tahun		-0,0176	+0,1408	+0,0912	-0,0144	
Tabel 3						
Usia 10,15,20,25, dst	-0,0128	+0,0848	+0,1504	-0,0240	+0,0016	
Usia 11, 16, 21, 26,, dst	-0,0016	+0,0144	+0,2224	-0,0416	+0,0016	
Usia 12, 17, 22, 27,, dst	+0,0064	-0,0336	+0,2544	-0,0336	+0,0064	
Usia 13, 18, 23, 28, dst	+0,0064	-0,0416	+0,2224	+0,0144	-0,0016	
Usia 14, 19, 24, 29, dst	+0,0016	-0,0240	+0,1504	+0,0848	-0,0128	

Tabel di atas terdapat fraksi (F) yang menunjukkan jumlah penduduk yang dikelompokkan lima tahunan, dimana F 0 adalah jumlah penduduk lima tahunan, yang usia tunggalnya sedang dihitung (dicari). F+1 adalah jumlah penduduk lima tahunan satu tungkat setelah F 0: F+ 2 adalah jumlah penduduk lima tahunan dua tingkat setelah F 0 : F+3 adalah jumlah penduduk usia lima tahunan tiga tingkat setelah F 0, dan F-1 adalah jumlah penduduk usia lima tahunan satu tungkat sebelum F 0, dan F-2 adalah jumlah penduduk lima tahunan dua tingkat sebelum F 0.

Untuk memudahkan cara mengoperasikan tabel pengali sprague multiplier di atas, di bawah ini akan dicontohkan jenis data yang dibutuhkan dan cara menghitungnya.

Misalkan, data fiktif hasil sensus penduduk di DKI Jakarta tahunan 2012 seperti di bawah ini:

Usia	Penduduk
0-4 tahunan	148.349
5-9 tahun	144.912
10-14 tahun	141.579
15-19 tahun	138.342
20-24 tahun	135.190
25-29 tahun	132.110
30-34 tahun	129.083

Dari data di atas, perencana pendidikan diminta untuk menginformasikan jumlah penduduk DKI Jakarta yang berusia 3-6 tahun (PAUD), usia, 7-12 tahun (SD), usia 13-15 tahun (SMP/MTS), dan usia 16-18 tahun (SMA/SMK/MA). Untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, maka yang bersangkutan harus menghitung dengan mengoperasikan tabel koefisien pengali di atas.

Berikut ini dicontohkan cara mencari jumlah penduduk DKI Jakarta yang berusia 7 ahun sebagai berikut:

(-0,0080xF-1) + (+0,2160 x F 0) + (-0,0080 x F+1) + (0,0000 x F+2) = (-0,0080 x 148.349) + (+0,2160 x 144.912) + (-0,0080 x 141.579) + (+0,0000 x 138.342) = - 1186,792 + 31300,992 – 1132,632 + 0 = 28981,568, dibulatkan menjadi 28982.

Dengan mengikuti cara perhitungan di atas, perencana pendidikan dapat menemukan jumlah penduduk usia sekolah di DKI Jakarta sesuai dengan yang dibutuhkan.

C. Rasio Siswa (*Enrolment Ratio)*

Enrolment ratio pada umumnya dipakai sebagai indikator untuk melihat perbandingan jumlah siswa terhadap kelompok

penduduk usia sekolah atau terhadap kelompok umur tertentu. Defenisi yang tepat mengenai *Enrolment ratio* ini tidak selalu mudah untuk dmengerti, sebab ada beberapa tipe *Enrolment ratio* yang antara satu dengan yang lain berbeda, dan dalam penggunaannya tidak selalu dinyatakan dengan jelas, tergantung dengan maksud tertentu. *Enrolment ratio* tidak bisa dilihat secara universal berlakuumum setiap negara, karena setiap negara memiliki batasan yang berbeda pula. Ada empat jenis *Enrolment ratio* yaitu crude *Enrolment ratio* (angka partisipasi kasar), *net or levelEnrolment ratio* (angka partisipasi murni), *age spesifikEnrolment ratio* (rasio siswa umur tertentu) dan *intake ratio* (angka pemasukkan siswa baru)

1. Crude *Enrolment Ratio* atau angka partisipasi kasar (APK) yaitunperbandingan kasar antara jumlah penduduk usia sekolah di suatu wilayah tertentu dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah di suatu wilayah tetentu dengan rumus sebagai berikut:

   E= enrolment (jumlah siswa pada suatu jenjang tertentu dan pada tahun tertentu).

   P= jumlah penduduk usia sekolah tertentu pada tahun tertentu.

   Misalnya diketahui data siswa SD di DKI Jakarta tahun 2012 sebanyak 546.753 orang. Dan jumlah penduduk DKI Jakarta yang berusia 7-12 tahun. Tahun 2012 adalah 539.623 orang. Dari data ini kita dapat menghitung *crude enrolment ratio* sebagai berikut:

2. *Net Or LevelEnrolment Ratio* atau angka partisipasi murni (APM) yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah tertentu dengan jumlah siswa yang memiliki usia sekolah tertentu dengan rumus berikut:

Eha = jumlah siswa pada sekolah tertentu, pada umur tertentu serta tahun tertentu.

Pa = jumlah penduduk pada usia sekolah tertentu dan pada tahun tertentu.

Misalnya, diketahui data penduduk DKI Jakarta pada tahun 2012 yang berusia 7-12 tahun adalah 539.623 orang, dan jumlah siswa SD di DKI Jakarta tahun 2012 yang berusia 7-12 tahun adalah 531.753 orang. Maka net enrolment ratio adalah

3. Spesific enrolment ratio atau angka partisipasi khusus yaitu merupakan perbandingan antara umur atau kelompok umur tertentu dari siswa dibandingkan dengan umur atau kelompok umur tertentu dari penduduk dengan rumus sebagai berikut:

   Jika umur atau kelompok umur yang dimaksud meliputi siswa yang juga berada di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, atau dalam tingkat pendidikan lain, maka untuk menghitungnya dapat dipakai rumus:

   EPA = SD, ESA = SMP/MTS, dan EHA = SMA/SMK/MA.

4. Intake ratio atau new entrans, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk pada usia tertentu pada tahun tertentu (usia siswa baru) dengan jumlah siswa baru pada usia tertentu di tahun tertentu dengan rumus sebagai berikut:

   Ptt = jumlah penduduk yang berusia 7 tahun, atau jumlah lulusan SD dan jumlah lulusan SMP/MTS

   Ett = jumlah siswa baru berusia 7 tahun untuk SD, jumlah siswa baru tingkat I untuk SMP/MTs, dan jumlah siswa baru tingkat I untuk SMA/SMK/MA

D. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan

Kegiatan proyeksikan kebutuhan personil pendidikan lebih sulit dan lebih kompleks dibandingkan dengan melakukan proyeksi terhadap siswa, karena selain dapat berbagai jenis tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan, perubahan kurikulum dan perubahan ketentuan beban kerja serta besar kelas ikut juga mempengaruhi perhitungan kebutuhan akan personel sistem pendidikan.

Untuk melakukan proyeksi personil pendidikan yang dibutuhkan oleh sistem pendidikan, perlu tersedia data tentang tambahan jumlah siswa setiap tahun dimasa depann (hasil proyeksi siswa), data tentang trend personil sistem pendidikan yang meninggalkan profensinya karena pensiun atau alasan lainnya di masa lalu, ketentuan tentang besar kelas, dan beban kerja personil, termasuk juga data tentang kebijakan-kebijakkan lainnya yang diambil dari pemerintah. Misalnya, kebijakkan tentang perubahan struktur sistem pendidikan. Berikut ini dicontohkan cara memproyeksikan kebutuhan guru berdasarkan kecenderungan guru meninggalkan profesinya di masa lalu.

Usia tahun	guru	Angka kematian	Jumlah meninggal	Jumlah pensiun	Alasan lain % jml	Total
19	720	0,0020	1		0,061 44	45
20-24	1.760	0,0021	4		0,050 88	92
25-29	4.910	0,0024	12		0,031 152	164
30-34	3.916	0,0028	11		0,030 117	128
35-39	1.823	0,0035	6		0,026 47	53
40-44	912	0,0044	4		0,019 17	21
45-49	532	0,0055	3		0,005 3	6
50-54	425	0,0075	3		0 0	3
55-59	317	0,0105	3		0 0	3
60	236	0,0136	3	40	0 0	43
19-60	15.553		50	40	468	558

Dari data di atas dapat dihitung jumlah guru yang meninggalkan profesinya di masa lalu dengan rumus:

GMP = guru meninggalkan profesinya

GS = guru seluruhnya

Yaitu:

Untuk memperkirakan jumlah guru yang dibutuhkan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, perencana akan membutuhkan data tentang:

1. Jumlah siswa seluruhnya
2. Rata-rata jumlah jam belajar siswa per minggu
3. Rata-rata besar kelas
4. Rata-rata jumlah jam mengajar guru per minggu

Jika perencana pendidikan memiliki data tersebut di atas, maka kebutuhan guru pada suatu jenis dan jenjang tertentu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

N = jumlah guru yang dibutuhkan

E = jumlah siswa seluruhnya

Et = rata-rata besar kelas

hs = rata-rata jumlah jam belajar siswa per minggu

ht = rata-rata jumlah jam mengajar guru per minggu

jika jumlah jam mengajar guru per minggu sama dengan jumlah jam belajar siswa per minggu, maka kebutuhan guru dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebaagi berikut:

Kadan-kadang terjadi bahwa rasio siswa dan guru di atur oleh suatu ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Pada kasus seperti ini, maka digunakan rumus:

Dimana "r" adalah rasio siswa dengan guru atau rata-rata jumlah siswa per minggu.

E. Metode Proyeksi Siswa

proyeksi siswa penting dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan di masa depan terkait dengan aspek sarana, tenaga dan biaya pendidikan. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah siswa pada tahun-tahun yang akan datang, yaitu dengan melakukan proyeksi terhadap siswa baru saja, dan memproyeksikan siswa secara keseluruhan dari setiap jenis dan jenjang sistem pendidikan.

1. Proyeksi siswa baru

Untuk membuat proyeksi menurut usia harus berhati-hati, khususnya di indonesia, karena pada umumnya siswa baru kelas I SD terdiri dari anak-anak yang berusia 6 tahun sampai dengan 12 atau 13 tahun. Dengan menggunakan last squares method akan terdapat kelemahan-kelemahan tertentu,

dan harus didukung oleh data yang lengkap untuk melihat kecenderungan – kecenderungan yang ada.

Rumus yang dipakai adalah: Y = a + bt

Untuk dapat mengoperasikan rumus di atas, dibutuhkan bantuan data, misalkan seperti di bawah ini.

usia	2010	2011	2012
6	14,6	14,9	16,8
7	33,5	35,6	40,1
8	22,8	24,7	28,0
9	10,5	11,9	12,0
10	3,3	4,2	4,3
11	1,4	1,6	1,8

Berdasarkan data yang ada pada tabel 1 di atas, selanjutnya dapat dilakukan menyusun proyeksi siswa baru untuk SD sampai beberapa tahun ke depan. Untuk mempermudah, dapat digunakan tabel bantu untuk perhitungan regresi. Misalnya menghitung rata-rata perkembangan siswa baru usia 7 tahun.

TI	YI	(tI – t)	(yI-Y)	(tI – t)(YI-Y)	(tI – t)2
I	33,5	-I	-2,9	2,9	I
2	35,6	0	-0,8	0	0
3	40,I	+I	+3,7	3,7	I
N=6 t=2	I09,2 Y=36,4			6,6	2

(t1 – t)2

I = 1

a = Y – bt

a = 36,4 – 3,3 (2) = 29,8

Y = a + bt (t adalah tahun yang dimaksudkan)

Y = 29,8 + 3,3 (4) = 43,0

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa proporsi siswa baru usia 7 tahun pada tahun 2003 adalah sebesar 43,0% terhadap penduduk umur 7 tahun pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan angka 3,3 merupakan faktor kenaikan dalam proyeksi garis lurus dalam membuat proyeksi siswa baru umur 7 tahun pada tahun berikutnya.

2. Proyeksi Siswa

Untuk membuat proyeksi siswa secara keseluruhan, dibutuhkan data kecenderungan-kecenderungan di masa lalu mengenai angka *intake ratio* , angka siswa naik tingkat/lulus , angka siswa tinggal kelas, dan angka siswa putus sekolah untuk selama beberapa tahun. Dalam kasus keterbatasan data karena hanya tersedia untuk dua tahun saja, maka hal ini membutuhkan informasi tentang kebijakkan dari pemerintah tentang angka-angka tersebut di atas. Kebijakkan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan angka *intake ratio* serta siswa naik/lulus di tahun-tahun mendatang, dan menurunkan angka tinggal kelas dan putus sekolahnya.

Tahun	Penduduk usia 7 th	Intake ratio	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	Tingkat IV	Tingkat V	Tingkat VI	Total

5%2% 3%3% 2% 2%

2011 1067 - 1235 1004 907850801 742 5539

21% 11% 8% 7% 10% 7%

2012 1097 92% 1265 1024 946 867 845 757 5704

Kohort siswa SD di atas hanya dilengkapi oleh data selama 2 tahun yaitu data tahun 2011 dan 2012. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk dapat melakukan proyeksi siswa dengan data yang terbatas seperti ini dibutuhkan adanya

suatu kebijakkan, misalnya kebijakkan di masa depan tentang *intake ratio* tinggal kelas, dan putus sekolah. *Intake ratio* (angka pemasukkan) akan ditingkatkan 1% pada tahun – tahun mendatang untuk setiap tahunnya. Angka tinggal kelas dari tingkat I sampai serendah-rendahnya angka diturunkan 1% setiap tahunnya sampai serendah-rendahnya angka tinggal kelas menjadi 5%, kecuali tinggal kelas di tingkat VI akan tetap seperti tahun sebelumnya, termasuk angka putus sekolah di setiap tingkat dan setiap tahun akan tetap seperti tahun 2011/2012. Sementara itu, angka pertumbuhan penduduk yang berusia 7 tahun juga akan tetap dari tahun ke tahun.

F. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan atau proyeksi kebutuhan fasilitas sekolah mencakup berbagai pertimbangan, mungkin membutuhkan keahlian teknik yang tinggi di luar kemampuan ahli perencana pendidikan. Meskipun demikian adalah tugas perencana pendidikan perlu mengetahui informasi penting apa saja yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan atau mengkonstruksi gedung sekolah dan sarana lainnya. Ini akan berkaitan dengan informasi mengenai fasilitas sekolah yang harus perencana kumpulkan dan sediakan untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada perencana, perumus pembiayaan dan pengkonstruksi fasilitas sekolah.

Tugas pertama perencana dalam hal ini adalah mengumpulkan data untuk menentukan persediaan sarana pendidikan yanga da saat ini berdasarkan jenis dan jenjang pendidikan, termasuk bagaimana kualitasnya. Untuk itu, perencana dapat melakukan survei pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan atau standar-standar yangb ada guna memperoleh informai apakah

sarana yang ada di sekolah-sekolah tersebut kondisinya baik dan buruk.

Berikut ini adalah contoh data hasil survai pada jumlah sekolah dan standar-standar yang berlaku untuk setiap indikator pendidikan.

Komponen fasilitas pendidikan	Data hasil survei	Standar yang ada
Siswa perkelas	56	45
Luas ruang kelas	30 m2	36 m2
Luas area bermain per siswa	1 m2	3 m2
Luas area tempat duduk per siswa	1,6 m2	4 m2
Pemakain toilet oleh siswa.	150	50
Penggunaan listrik per siswa	51%	100%
Penggunaan air per siswa	40%	100%
Meja per siswa	0,56	1
Kursi per siswa.	0,31	1

Dari data tabel di atas, dapat kita lakukan kesimpulan diagnosis sebagai berikut:

1. Ada kelebihan 11 siswa pada setiap kelas, ini berarti dibutuhkan tambahan ruang kelas di masa depan
2. Alam ketentuan dinyatakan bahwa luas ruang kelas per siswa adalah 0,8 meter2 (36 dibagi 45 = 0,8 m2), sementara data hasil survei adalah 0,54 m2 per siswa, atau 33% kurang dari standar yang ditentukan.
3. Tempat duduk dan tempat bermain anak-anak terlalu sempit, dan mungkin tidak dapat berbuat apa-apa jika tidak tersedia tanah untuk membangun sekolah.

4. Sanitasi dan pelayanan listrik dan air sangat kurang memuaskan.
5. Di sana terdapat hampir 2 siswa yang menepati 1 meja, dan 3 siswa menepati 1 kursi/bangku. Ini membuat siswa sulit untuk dapat belajar dengan tenang dan baik.

Berdasarkan informasi di atas, kita dapat merumuskan kebutuhan-kebutuhan fasilitas pendidikan dimasa depan sebagai bagian dari suatu kegiatan proyeksi sarana dan prasarana pendidikan.

G. Proyeksi Kebutuhan Biaya Pendidikan

Untuk memperkirakan biaya pendidikan yang dibutuhkan di masa depan, kita harus menggunakan data pembiayaan pendidikan yang ada di masa lalu dan masa sekarang. Data pembiayaan pendidikan yang ada harus komprehensif, di samping mencakup untuk berbagai jenis dan jenjang pendidikan, tetapi juga harus ada untuk periode waktu tertentu selama beberapa tahun yang lalu.

Untuk dpat memproyeksikan kebutuhan pembiayaan pendidikan di masa depan, kita membutuhkan data pembiayaan seperti di bawah ini.

1. Jumlah pembiayaan pendidikan masyarakat suatu negara meliputi pembiayaan dari pemerintah pusat, dari provinsi, dan kabupaten/kota untuk kegiatan pendidikan.
2. Total anggaran pemerintah.
3. Gross national product (GNP) atau pendapatan nasional suatu negara.
4. Investasi swasta di bidang pendidikan.
5. Jumlah bantuan luar negeri pada dunia pendidikan.

Dengan data di atas, dan pengetahuan tentang perhitungan indikator yang berhubungan dengan biaya, kita akan mampu menghitung *trend* pertumbuhan pembiayaan pendidikan di masa lalu. Untuk melakukannya, kita membutuhkan data selama beberapa tahun, atau untuk satu periode perencanaan. Ini akan memberikan beberapa alternatif asumsi bagaimana *trend* pembiayaan akan kontinu satu periode rencana di masa depan.

Berikut ini dicontohkan cara memproyeksikan biaya pendidikan pada masa yang akan datang berdasarkan pada data di bawah ini.

Periode rencana	Rata-rata angka pertumbuhan
1996-2000	2,4%
2001-2005	3,5%
2006-2010	4,7%

Dari data di atas, sekarang kita dapat membuat beberapa alternatif asumsi bagaimana kecenderungan di masa lalu dapat terus berlangsung pada periode rencana pada masa depan (periode rencana 2011-2015), yaitu:

1. Pembiayaan pendidikan akan terus tumbuh sama seperti pada masa lalu. Ini berarti kita secara sederhana melakukan ekstrapolasi berdasarkan trend sebelumnya, dan menghasilkan peningkatan satu periode rencana di masa depan (2011-2015) jadi 6%.
2. Angka pertumbuhan harus diperiksa untuk alasan stabilitas (austerity), dan ini akan membatasi pada periode rencana sebelumnya yaitu periode rencana 2006 – 2010 sebesar 4,7%.

3. Pembiayan pendidikan tanpaknya akan suram (getting out of hand) pada masa depan, dan angka pertumbuhan akan menjadi angka pertumbuhan rata-rata selama tiga periode rencana masa lalu (15 tahun) yaitu sebesar 3,5%.

Dari data di atas disertai dengan menggunakan beberapa asumsi, maka pembiayaan pendidikan untuk periode rencana tahun 2011-2015 dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Asumsi	2011	2012	2013	2014	2015	Total
1	4187	4438	4705	4987	5286	23603
2	4136	4330	4534	4747	4970	22717
3	4088	4231	4379	4533	4691	21922

Bersamaan dengan perkiraan kita mengenai pertumbuhan keseluruhan biaya pendidikan, kita juga harus melihat pada *trend* pertumbuhan biaya pendidikan dari anggaran pemerintah. Ini berarti kita akan menganalisis total pembiayaan pemerintah untuk pendidikan. Selain itu, kita juga harus melihat *trend* pertumbuhan pembiayaan pendidikan dari GNP.

Untuk melakukan proyeksi biaya rutin, dibutuhkan konsep tentang biaya satuan (*unit cost*). Perlu dilihat penggunaan *unit cost* untuk tujuan diagnosis. Ketika kita menggunakan indikator ini untuk biaya, kita akan beralasan bahwa apabila jumlah siswa bertambah di masa depan, maka proyeksi kita diperkaya dengan *unit cost* dan kta harus menghindari perhitungan kasar biaya rutin pada mada yang akan datang. Jika jumlah guru meningkat akibatnya adanya peningkatan jumlah siswa, dan jika gaji guru tetap sama, *unit cost* akan berbeda sedikit. Jika gaji guru meningkat karena angka inflasi, maka akan mempengaruhi *unit cost*. *Unit cost* di masa yang akan datang adalah sama dengan jumlah siswa dikali dengan *unit cost,* tentu saja ini harus dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis dan

jenjang pendidikan. Cara yang lebih tepat untuk menentukan biaya rutin di masa depan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Cy = pembiayaan rutin pada jenjang pendidikan tertentu untuk tahun y

P = jumlah penduduk usia jenjang pendidikan tertentu dan tahun y

R = rasio kasar siswa (angka partisipasi kasar) pada jenjang pendidikan tertentu

S = rata-rata gaji guru pada jenjang pendidikan tertentu

C = rata- rata jumlah biaya rutin non gaji yang dihabiskan per guru pada jenjang pendidikan tertentu.

S/T = rasio siswa / guru pada jenjang pendidikan tertentu.

H. Analisis Kohort

Kohort berasal dari Romawi yang berarti kelompok di dalam ketentaraan. Kohort ini selanjutnya diterapkan pada dunia kependudukan yang diartikan sebagai kelompok penduduk yang lahir pada suatu tahun yang sama (kelompok umur yang sama). Selanjutnya di bidang pendidikan juga menggunakan istilah kohort untuk kelompok siswa yang berada pada suatu tingkat yang sama pada tahun tertentu di dalam suatu sistem pendidikan tertentu pula, misalnya kelompok siswa di kelas I SD pada tahun 2011 di DKI Jakarta disebut kohort kelas I SD tahun 2011.

Data yang dibutuhkan untuk dapat menyusun kohort adalah:

1. Jumlah tahun pelajaran dalam satu siklus pendidikan tertentu.
2. Jumlah siswa baru yang masuk di kelas I

3. Jumlah siswa per kelas
4. Jumlah siswa yang naik kelas/lulus
5. Jumlah siswa yang tinggal kelas
6. Jumlah siswa yang putus sekolah
7. Jumlah siswa yang mutasi.

Khort pada intinya merupakan bagan yang memperlihatkan arus pergerfakkan siswa dari sejak masuk di kelas I sampai yang bersangkutan menyelesaikan program pendidikannya atau lulus.

I. Analisis Efesiensi Internal Penyelenggaraan Pendidikan

Untuk mengukur tingkat efesiensi internal penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dengan menganalisis data yang terdapat pada kohort siswa. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu dengan menggunakan kohort lengkap dan kohort yang belum lengkap. Untuk pendekatan pertama ada tiga indokator yang harus dihitung yaitu:

1. Lulusan yang merupakan beberapa bagian dari kelompok siswa yang masuk mulai kelas I diberi symbol "L" dengan rumus:

   L = n1 x n3 x n4 x n5 x n6 (untuk SD)

   L = n1 x n2 x n3 (untuk sekolah lanjutan
2. Rata-rata jumlah tahunan ajaran yang dialami oleh seorang siswa yang masuk mulai kelas I dalam suatu sistem pendidikan, diberi symbol "P" dengan rumus:

   P = 1 + b1 + b2 + b3 +b3 +b4 +b5 (untuk SD)

   P = 1 + b1 + b2 (untuk sekolah lanjutan).

3. Rata-rata jumlah tahun ajaran yang perlu diberikan untuk menghasilkan satu lulusan terhitung mulai kelas I, disimbolkan dengan "H" dengan rumus:

   Untuk dapat mengoperasikan rumus L, dibutuhkan informasi tentang harga n6. Untuk mencari nilai n digunakan rumus sebagai berikut:

   n = Koefisien siswa naik kelas

   Js = Jumlah siswa dalam suatu kelas

   K = Kelas yang bersangkutan

   T = Tahun yang bersangkiutan

   K + 1 = Kelas satu tungkat di atas yang bersangkutan

   T + 1 = Satu tahun setelah tahunyang bersangkutan

   Untuk dapat menghitung nilai P, maka harus diketahui terlebih dahulu nilai b1 sampai b5 untuk SD, dan b1 sampai b2 untuk sekolah lanjutan dengan rumus sebaagi berikut:

   B1 = 1 x n1

   B2 = b1 x n2

   B3 = b2 x n3

   B4 = b3 x n4

   B5 = b4 x n5

Sedangkan untuk pendekatan yang kedua terdapat dua indikator yang harus di cari yaitu:

1. Rasio masukkan dan keluaran dengan rumus:

   Kt = keluaran dari sistem pendidikan (jumlah isis yang lulus dikalikan dengan tahun

   M = masukan dari sistem pendidikan (jumlah siswa yang masuk sistem pendidikan mulai dari kelas I dikalikan dengan tahun)

Untuk mencari nilai "M" digunakan rumus satuan yaitu S/T (siswa dibagi dengan tahun).

2. Rata-rata jumlah tahun ajaran yang perlu diberikan untuk menghasilkan satu lulusan terhitung mulai tingkat 1 dengan rumus:

   K = keluaran dari sistem pendidikan (jumlah siswa yang lulus)

   Mt = masukan dari sistem pendidikan (jumlah siswa yang masuk sistem pendidikan mulai dari kelas I dikalikan dengan tahun

J. Metode Analisis Indiktor-Indikator Pendidikan

Indikator pendidikan yang harus dianalisis untuk kebutuhan diagnosis sistem pendidikan meliputi:

1. Indikator input sistem pendidikan terdiri atas:

a. Sumber daya manusia, meliputi rasio siswa menurut jenis dan jenjang sekolah.

b. Angka pemasukkan (admisission rate) pada jenis dan jenjang pendidikan.

c. Rasio siswa-guru menurut jenis dan jenjang pendidikan.

d. Persentase guru yang berkualifikasi tinggi menurut jenis dan jenjang pendidikan, atau menurut keahlian bidang studi.

2. Indikator sumber-sumber finansial dan sarana yang meliputi:

a. Rasio siswa per ruang kelas menurut jenis dan jenjang pendidikan.

b. Rasio buku teks per siswa menurut jenis dan jenjang pendidikan.

c. Biaya satuan menurut jenjang dan jenis pendidikan.

d. Biaya pendidikan dari pemerintah sebagai persentasi dari APBN
e. Jumlah keseluruhan biaya pendidikan sebagai persentase dari GNP.

3. Indikator performance sistem pendidikan meliputi:

a. Angka putus sekolah
b. Angka tinggal kelas atau mengulang kelas
c. Angka naik kelas atau lulus
d. Angka melanjutkan sekolah
e. Standar hasil ujian
f. Keterlibatan siswa perempuan
g. Orientasi studi.

4. Indikator disparitas pelayanan pendidikan, meliputi:

a. Disparitas antara kota dan desa
b. Disparitas antar wilayah
c. Disparitas antar kelompok etnis, suku dan ras
d. Disparitas antar jenis kelamin
e. Disparitas antar agama

5. Indikator output pendidikan, meliputi:

a. Tamatan sekolah
b. Spesialisasi lulusan

Rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung nilai dari setiap indikator yang disebutkan di atas tidak disertakan di sini karena terlalu banyak, dan diperkirakan akan mengganggu keserasian penjelasan yang diberikan.

Dari berbagai penjelasan yang telah diutarakan di atas. Jelas bahwa statistik baik sebagai ilmu maupun sebagai metode mempunyai peranan penting dalam kegiatan perencanaan

pendidikan. Pengelolaan data perencanaan pendidikan tidak mungkin dapat dilakukan jika tidak memanfaatkan statistik sebagai metodenya. Oleh sebab itu, sudah menjadi suatu keharusan bagi perencana pendidikan untuk memahami dan menguasai ilmu

DAFTAR BACAAN

---------, *Dasar- Dasar Perencanaan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995

Abidin Syamsuddin Makmum, *Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif,* Bandung: Remaja Rosdakarya: 2007

Allan G. Johnson, *Human Arangements: An Introduction to Sociology, Harcourt Brace Jovanovich*, Inc, Orlando-Florida,1985

Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Asmendri. *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah/ Madrasah*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press. 2012

Asmendri. *Manajemen Peserta Didik. Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Batusangkar: STAIN Batusangkar. 2014.

Bryson dan John M, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008

Conyers & Hills, *Creative Human Resource Planning and Applications : A Strategic Approach*, New York Prectice Hall, 1994

Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terj. Samodra Wibawa dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000

Gibson, Ivansevic & Donelly, *Organizations: Behavior, Structure, Proceses*, USA: Mc Graw Hill, 2001

Hadari Nawawi, *Perencanaan SDM untuk Organiasi Profit*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2001

Husaini Usman, *Manajemen*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008

John R. Kelly, *Leisure, Prentice-Hall*, Inc, Englewood Cliffs, NJ, 1993

Jusuf Enoch *Dasar- Dasar Perencanaan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995

Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Dengan Pendekatan Sistem,* Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005

Matin, *Perencanaaan Pendidikan*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Indonesia, 2013

Nanang Fattah, *Landasan Menejemen Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosakarya Bandung, 2008

Sa'ud Udin Syaefudin, dkk, *perencanaan pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2009

Sa'ud Udin Syaefudin dan Abidin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

Supardi dan Darwyan Syah, *Perencanaan Pendidikan suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: Diadit Media, 2010

Tilaar, H.A, *Manifesto Pendidikan; Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Cultural*. Kompas, 2005

Wahyudi, *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2002

Wina sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta:* Kencana Prenada Media Group, 2010

Yahya, *Perencanaan Pendidikan*, Padang: Sukabina Press, 2009

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Asmendri lahir di Kab. Limapuluh kota, Sumbar tahun 1970. Rumah di Jl Green Bariang Indah III E Anduring Padang. Pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam Fak. Tarbiyah IAIN Padang 1994, S2 Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Padang 1999. Kandidat doktor manajemen pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Padang ini juga telah mengikuti Visiting Scholar ke Ohio State University, Columbus, Negara Bagian Ohio, Amerika Serikat tahun 2008-2009. Alamat email: asmendri.25@gmail.com

Penulis adalah dosen tetap STAIN Batusangkar yang membina matakuliah Manajemen Pendidikan, Pengantar Pendidikan dan Profesi Kependidikan. Di samping itu juga sebagai dosen luar biasa pada STKIP PGRI Sumatera Barat, dan Dosen Tutor Universitas Terbuka UPJJ Padang.

Artikel ilmiah yang telah ditulis dan dipublikasikannya sebagai berikut: Pembinaan akhlak peserta didik melalui peran dan komitmen kepala sekolah (2002), Supervisi Kepala Sekolah dalam Pembinaan Guru Madrasah (2003), Strategi Manajemen Berbasis Pesantren Moderen di Era Dunia Global (2003), Penyesuaian Kebijakan dalam Manajemen Pendidikan Tinggi di Era Globalisasi (2004), Profesionalisme Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Menerapkan Manajemen Pendidikan yang Inovatif (2005), Model Pendidikan Budi Pekerti pada

Sekolah (2006), Aplikasi Model Sistem Manajemen Penjaminan Mutu di PTAI (2007), Peranan Guru PAI dalam Pemeliharaan Kebersihan dan Kesehatan di Sekolah (2008), Konstribusi Prodi PAI terhadap Profesionalisme Lulusan di Madrasah (2009), Pemberdayaan Kelembagaan Muslimat NU Ranting Dinoyo Kota Malang (2010). The Roles of School Principal in Implementation of Character Education at Boarding School (2014).

Penelitian yang pernah dilakukannya: Manajemen Pesantran Moderen Terpadu Prof. Hamka (2002), Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah di MTsN Gadut Kab. 50 Kota (2003), Penerapan Model Pembelajaran Interaktif pada Pembelajaran PAI di SDN 26 Jati Padang (2006), Model Pendidikan Budi Pekerti di SDIT Azkiyah Padang (2004), Persepsi Siswa tentang Kompetensi Guru Mata Pelajaran Qur'an Hadis di MAN Kab. Tanahdatar (2007), Kontribusi Prodi PAI STAIN Batusangkar terhadap Profesionalisme Lulusan di Madrasah (2008), Pemberdayaan Kelembagaan Muslimat NU Ranting Dinoyo Kota Malang Jawa Timur (2009-2010) dan Pengembangan Model Perkuliahan Berbasis Masalah (PBM) pada Matapelajaran Manajemen Pendidikan di STAIN Batusangkar Melalui Survei Manajemen Sekolah (2011). Analisis Kompetensi Kepala MAN Kota Padang Berdasarkan Permendiknas No.13 Tahun 2007 (2014), dan Implementasi Aspek-aspek Manajemen Pendidikan pada MAN Kab. Tanahdatar (2015).

Buku ilmiah yang telah diterbitkan: Pengantar Studi Manajemen Pendidikan (2008, STAIN Batusangkar Press), Manajemen Peningkatan Mutu Madrasah/Sekolah (2012, STAIN Batusangkar Press) dan Manajemen Peserta Didik, Teori, Konsep dan Riset Pendidikan (2014, STAIN Batusangkar Press).



Firman, lahir di Tanjung Barulak Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, pada Tanggal 12 Juni 1989, anak kesembilan dari 8 bersaudara. ayah bernama Ikhsan dan ibu Syamsiar.

Jenjang pendidikan, Sekolah Dasar 10 Lingkung Kawat 2001, Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Barulak 2004, Madrasah Aliyah Keagamaan (MAN/MAKN 2) Batusangkar 2007. Dilanjutkan pendidikan S1 Prodi Pendidikan Agama Islam 2012. Jenjang pendidikan terakhir S2 Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana STAIN Batusangkar 2014.

Pengalaman organisasi: aktif dalam organisasi IMM (ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, aktif dalam Himpunan mahasiswa prodi PAI, Remaja Mesjid Al-marif.

Penulis adalah dosen luar biasa STAIN Batusangkar pernah membina mata kuliah manajemen pendidikan, perencanaan pendidikan, bimbingan karya tulis ilmiah, tokoh pendidikan islam, manajemen kurikulum, Manajemen Lembaga PAUD. Penulis juga penah mengajar di MTsN Pangian Lintau serta mengajar di Sekolah Dasar.

Penelitian yang pernah dilakukan: konsep evaluasi *(al-bala')* dalam perspektif Islam, manajemen kepemimpinan kepala sekolah di sekolah dasar terakreditasi A se Kecamatan Tanjung Emas. Menulis jurnal tentang kepemimpinan kepala sekolah yang efektif.